

DIALOG GLOBAL

8.3

3 Edisi per tahun dalam 17 bahasa

Membahas Sosiologi dengan Nancy Fraser

Christine Schickert

Demokrasi yang Tertantang

Hauke Brunkhorst
Christian Fuchs
Andrea Silva-Tapia
Hlengiwe Ndlovu
Gerassimos Kouzelis
Haryati Abdul Karim
Esteban Torres Castaños
Amy Austin Holmes
Peter Wahl

Dalam Kenangan: Anibal Quijano

Nicolás Lynch
Raquel Sosa Elizaga

Menghadapi Kemiskinan

Joshua Budlender
Vassilis Arapoglou
Juliana Martínez Franzoni
Fabian Kessl
Mustafa Koç

Perspektif Teoretis

Sujata Patel

Sosiologi di Polandia

Marta Bucholc
Jan Czarzasty
Juliusz Gardawski
Adam Mrozowicki
Vera Trappmann
Katarzyna Dębska
Sara Herczyńska
Justyna Kóscinińska
Kamil Trepka
Maciej Gdula

MAJALAH



International
Sociological
Association
isa

VOLUME 8 / EDISI 3 / DESEMBER 2018
<http://globaldialogue.isa-sociology.org/>

DG



› Editorial

Di banyak negara di dunia, institusi-institusi dan proses-proses demokratis menghadapi peningkatan tantangan dan tekanan. Kecenderungan otoriter dapat diamati pada [praktik-praktik] demokrasi muda maupun tua di mana kepemimpinan dari atas (*top-down*) memperoleh reputasi kembali, nasionalisme meningkat, dan masyarakat sipil diperlemah melalui pembatasan hak-hak politik. Hak-hak perempuan dan minoritas, khususnya, sedang memperoleh serangan. Dalam wawancara yang membuka edisi *Dialog Global* ini Nancy Fraser, salah seorang pemikir feminis yang paling terkenal dan mempunyai pemikiran menantang, mengangkat beberapa aspek perkembangan ini ketika ia memperdebatkan pertanyaan mengenai upaya membangun gerakan feminis yang lebih inklusif dan mendiskusikan pemikirannya mengenai feminisme bagi 99% [kaum perempuan].

Artikel-artikel dalam simposium pertama kami tentang “Demokrasi yang Tertantang” mengkaji bagaimana demokrasi berada di bawah tekanan di belahan-belahan khusus dunia, dari situasi pasca-*apartheid* Afrika Selatan hingga ke politik penghematan yang mengancamnya di negara seperti Yunani dan penghapusan kontribusi perempuan dalam kisah mengenai Revolusi Mesir. Ketika para penulis menggambarkan dan menganalisis perkembangan-perkembangan yang baru seperti kebangkitan [kekuasaan] otoriter dalam kapitalisme, mereka juga mengevaluasi konsep-konsep dan ide-ide yang bertujuan untuk memperkuat proses-proses demokratis.

Pada bulan Mei 2018, Anibal Quijano, salah seorang sosiolog ternama Peru dan Amerika Latin, meninggal dunia pada usia 87 tahun. Hasil karyanya mengenai imperialisme, kolonialisme, dan konsepnya mengenai “kolonialitas kekuasaan” (*coloniality of power*) mempengaruhi generasi-generasi sosiolog di manapun. Dua orang rekan dan sahabatnya melihat kembali kehidupannya dan menghormati warisan pemikirannya.

Untuk simposium kedua kami yang berjudul “Menghadapi Kemiskinan,” kami mengumpulkan makalah-makalah yang menganalisis berbagai manifestasi kemiskinan, mulai dari dampak politik penghematan di Yunani hingga peningkatan jumlah perempuan miskin di Amerika Latin, walaupun terdapat juga ekonomi politik yang ramah. Enam orang penulis dari seluruh dunia diundang untuk menjelaskan perkembangan regional yang spesifik mengenai kemiskinan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kebijakan-kebijakan untuk memberantasnya.

Dalam artikelnya tentang modernitas global, Sujata Patel, seorang sosiolog terkemuka dari India, mendiskusikan sifat dan isi teori mengenai dunia yang mengglobalisasi. Ia memberikan pandangan sejarah dan teoretis mengenai konsep modernitas majemuk dan kritik yang dikemukakan terhadapnya.

Sejak awal, para pemikir Polandia telah memainkan suatu peran penting dalam pengembangan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu dan oleh karena itu edisi ini menawarkan pandangan mengenai sejarahnya di Polandia. Namun bukan hanya sejarahnya yang merangsang kita untuk memfokuskan pada negara ini, tetapi juga kejelasan keterlibatan sosiologinya saat ini dalam banyak isu di masa kita. Artikel-artikel tersebut memperkenalkan pembaca pada penelitian-penelitian saat ini, seperti kajian-kajian tentang pekerja prekariat muda, perilaku memilih saat ini pada masyarakat Polandia maupun perubahan-perubahan di ruang publik Polandia dan implikasi-implikasinya pada sosiologi masa kini. ■

Brigitte Aulenbacher dan **Klaus Dörre**,
Editor *Dialog Global*

› **Dialog Global** dapat diperoleh dalam 17 bahasa pada [website ISA](#).

› Naskah harap dikirim ke globaldialogue.isa@gmail.com.

ISA International
Sociological
Association

**GLOBAL
DIALOGUE**



> Dewan Redaksi

Editor: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

Asisten Editor: Johanna Grubner, Christine Schickert.

Rekan Editor: Aparna Sundar.

Editor Pelaksana: Lola Busuttil, August Bagà.

Konsultan: Michael Burawoy.

Konsultan Media : Gustavo Taniguti.

Editor Konsultasi :

Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloisa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

Editor Wilayah

Dunia Arab: Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Argentina: Juan Ignacio Piovani, Alejandra Otamendi, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh: Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Jewel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury, Md. Eunos Ali.

Brasil: Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri Cerboncini Fernandes.

Prancis/Spanyol: Lola Busuttil.

India: Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Nidhi Bansal, Pragya Sharma.

Indonesia: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriayati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

Iran: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, Sayyed Muhammad Mutallebi, Vahid Lenjanzade.

Jepang: Satomi Yamamoto, Sara Maehara, Masataka Eguchi, Riho Tanaka, Marie Yamamoto, Kaori Hachiya, Ayana Kaneyuki, Erika Kuga, Kaya Ozawa, Tsukasa Shibagaki, Michiaki Yuasa, Rikuho Baba.

Kazakstan: Aigul Zabirowa, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel.

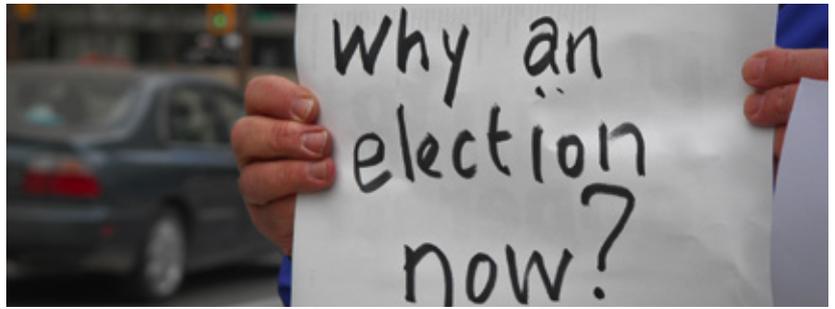
Polandia: Jakub Barszczewski, Iwona Bojadzjewa, Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Krzysztof Gubański, Sara Herczyńska, Justyna Kościńska, Łucja Lange, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Anna Wandzel, Jacek Zych.

Rumania: Cosima Rughiniş, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Luciana Anăstăsoaie, Adriana Lavinia Bulumac, Cristian Chira, Denisa Dan, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Alecsandra Irimie-Ana, Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rareş-Mihai Muşat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Alina Cristina Păun, Codruţ Pînzaru, Susana Maria Popa, Adriana Sohodoleanu, Elena Tudor.

Rusia: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

Taiwan: Jing-Mao Ho.

Turki: Gül Çorbacıoğlu, İrmak Evren.



Demokrasi di berbagai penjuru dunia kini sedang mengalami tekanan. Dalam simposium ini delapan orang sosiolog menyoroti tantangan yang dihadapi demokrasi di berbagai negara, juga membahas bagaimana orang memperjuangkan lebih banyak hak demokratis, dan secara kritis menganalisis praktik sosial di masa kini.



Topik kemiskinan dan realitas yang dialami orang yang menghadapi kemiskinan selalu merupakan suatu isu yang mendesak bagi para sosiolog. Dalam simposium ini lima orang ilmuwan dari berbagai penjuru dunia membahas keadaan (atau ketiadaan) pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan di berbagai kawasan tertentu dan menganalisis berbagai jalur berbeda dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia di bidang khusus seperti keamanan pangan.



Seksi ini menyajikan suatu pengantar ke dalam pengembangan sejarah sosiologi Polandia maupun wawasan mengenai penelitian sosiologi masa kini di negara ini.



Global Dialogue dapat terselenggara berkat dana hibah dari **SAGE Publications**.

› Dalam Edisi Ini

Editorial **2**

› MEMBICARAKAN SOSIOLOGI

Feminisme di Era Neoliberal:
Wawancara dengan Nancy Fraser
oleh Christine Schickert, Jerman **5**

› DEMOKRASI YANG TERTANTANG

Krisis Demokrasi
oleh Hauke Brunkhorst, Jerman **9**

Kebangkitan Kapitalisme Otoriter
oleh Christian Fuchs, Inggris **11**

Kewarganegaraan yang Dietniskan sebagai Kewarganegaraan Tidak Sah
oleh Andrea Silva-Tapia, Jerman **13**

Kekeliruan Demokrasi di Afrika Selatan Pasca-1994
oleh Hlengiwe Ndlovu, Afrika Selatan **15**

Demokrasi di Athena
oleh Gerassimos Kouzelis, Yunani **17**

Media Sosial dan Demokrasi – Pedang Bermata Dua?
oleh Haryati Abdul Karim, Malaysia **19**

Kemunduran Demokrasi di Argentina
oleh Esteban Torres Castaños, Argentina **21**

Penghapusan Perempuan dari Revolusi Mesir
oleh Amy Austin Holmes, Mesir **23**

Tata Kelola Global:
Sebuah Konsep untuk Tatanan Dunia yang Demokratis?
oleh Peter Wahl, Jerman **25**

› MENGENANG: ANÍBAL QUIJANO 1930-2018

Cendekiawan Unggulan
oleh Nicolás Lynch, Peru **27**

Kebahagiaan Pejuang
oleh Raquel Sosa Elízaga, Meksiko **29**

› MENGHADAPI KEMISKINAN

Ciri-ciri Kunci Kemiskinan Pasca-*Apartheid*
oleh Joshua Budlender, AS **30**

Kesejahteraan Pasca-*Bailout*: Wajah Baru
Kemiskinan di Yunani
oleh Vassilis Arapoglou, Yunani **32**

Mengapa Ada Lebih Banyak Perempuan Miskin
di Amerika Latin?
oleh Juliana Martínez Franzoni, Kosta Rika **34**

“Ekonomi Belas-kasih”: Dalam Bayang-bayang Negara
Kesejahteraan
oleh Fabian Kessl, Jerman **36**

Wacana Ketahanan Pangan: Tantangan untuk Abad 21
oleh Mustafa Koç, Kanada **38**

› PERSPEKTIF TEORETIS

Modernitas Global
oleh Sujata Patel, India **40**

› SOSIOLOGI DI POLANDIA

Apakah (Di manakah) Kami Bermakna? Kilas Balik
Sosiologi Polandia
oleh Marta Bucholc, Jerman/Polandia **43**

Pekerja Muda yang Rawan di Polandia dan Jerman
**oleh Jan Czarzasty, Juliusz Gardawski,
Adam Mrozowicki, Polandia, dan Vera Trappmann,
Inggris Raya** **45**

Mengapa Rakyat Memilih Partai Sayap Kanan?
**oleh Katarzyna Dębska, Sara Herczyńska, Justyna
Kościńska, dan Kamil Trepka, Polandia** **48**

Prospek bagi Sosiologi dalam Ranah Publik yang Baru
oleh Maciej Gdula, Polandia **50**

“**Dalam dunia kita masa kini, kita tidak dapat lagi memikirkan negara-bangsa yang homogen secara budaya, ras, atau etnis. Mendengarkan orang-orang yang telah dibungkam merupakan sebuah utang sejarah yang harus dibayar untuk memperdalam demokrasi**”

Andrea Silva-Tapia

› Feminisme di Era Neoliberal

Wawancara dengan Nancy Fraser



Nancy Fraser.

Nancy Fraser adalah salah seorang teoretikus kritis dan pemikir feminis terkemuka saat ini. Dia adalah Profesor Filsafat dan Politik di Sekolah Baru untuk Penelitian Sosial (*The New School for Social Research*) di New York. Di sejumlah publikasi yang banyak dibaca, di antaranya *Redistribution or recognition? A Political-Philosophical Exchange* (2003), sebuah perdebatan dengan Axel Honneth, dia mengembangkan sebuah konsep teoretis tentang keadilan dan ketidakadilan, dengan berargumen bahwa keadilan dapat dikonseptualisasikan dengan dua cara: sebagai keadilan distributif dan keadilan pengakuan. Dia mengklaim bahwa redistribusi dan pengakuan merupakan hal pokok untuk memerangi ketidakadilan saat ini. Dia juga telah menerbitkan sejumlah besar buku dan artikel tentang feminisme dan isu-isu feminis, baik sebagai seorang ilmuwan maupun sebagai aktivis, di antaranya *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis* (2013). Di sini dia diwawancarai oleh **Christine Schickert**, direktur administratif dari Kelompok Penelitian tentang Masyarakat Pascaperumbuhan di Departemen Sosiologi Universitas Jena, Jerman dan asisten editor *Dialog Global*.

CS: Hampir sepuluh tahun sudah berlalu sejak artikel Anda “*Feminism, Capitalism and the Cunning of History*” diterbitkan. Di dalamnya Anda pada dasarnya berargumen bahwa feminisme arus utama atau feminisme liberal telah dikooptasi oleh kapitalisme untuk tujuan-tujuannya sendiri. Bisakah Anda menguraikan argumen Anda di sini?

NF: Saya menulis makalah itu pada momen yang sangat spesifik, tepat ketika krisis finansial dunia sedang berlangsung, dan Barack Obama yang berbicara tentang harapan

dan perubahan, telah terpilih menjadi presiden. Ini adalah periode di mana semua orang mengakui bahwa kita berada pada momen yang sangat menentukan dan menakutkan, dan ada banyak harapan bahwa sesuatu yang berbeda mungkin terjadi. Ada sesuatu tentang momen tersebut yang membuat saya tiba-tiba mampu berpikir tentang sejarah saat-saat itu dan sejarah feminisme secara keseluruhan. Dalam kurun waktu yang lama saya tidak senang dengan arah yang diambil oleh feminisme liberal atau feminisme arus utama, yang sudah saya coba tulis sebelumnya dengan berbicara mengenai fokus yang ber-

lebih pada pengakuan (*recognition*) dan kurangnya perhatian pada distribusi, tetapi persoalan ini membuat saya berpandangan lebih jelas lagi mengenai momen krisis ini.

Perasaan saya adalah bahwa telah terjadi pergeseran besar dalam sifat masyarakat kapitalis yang berjalan bersamaan dan sejajar dengan perkembangan feminisme. Ketika gelombang feminisme kedua terjadi pada akhir 1960-an dan awal tahun 70-an, kami benar-benar berada di titik puncak, dan kami berpikir bahwa kami masih berjalan dalam rezim sosial demokrat atau rezim kapitalis negara yang kuat. Kami berpikir [saat itu] bahwa keuntungan yang dibawa rezim itu kurang-lebih aman dan kita bisa berangkat dari sana menuju dunia yang lebih egaliter radikal dan demokratis di mana feminisme akan menjadi pemain utama.

Yang justru terjadi adalah krisis demokrasi sosial, yang baru saja akan berkembang, dan kebangkitan neoliberalisme. Ini adalah bentuk kapitalisme yang benar-benar baru, dan kaum feminis—dan tidak hanya feminis tetapi banyak aktor gerakan sosial yang progresif—sangat lambat menyadari hal ini; sederhananya, kami masih melanjutkan agenda yang fokus pada pengakuan tanpa memahami tentang bagaimana ekonomi politik telah berubah. Bukan hanya kami lupa tentang redistribusi, tetapi tanpa disadari—atau setidaknya banyak orang tidak menyadarinya—kami sebenarnya telah menyumbangkan sesuatu yang positif dan penting untuk neoliberalisme. Kami telah memberikannya semacam karisma dan legitimasi, yang memungkinkannya untuk menggunakan kharisma pembebasan yang emansipatoris sebagai semacam alat legitimasi atau alibi untuk rezim ekonomi politik baru yang regresif yang sedang diperkenalkan.

Itu argumennya. Karena kami nampaknya berada dalam momen krisis, pada tahun 2008-9, saya berpikir bahwa itu adalah saat—seperti yang saya katakan di akhir esai—untuk dapat berpikir besar, untuk berpikir di luar kotak, dan untuk memperkenalkan jenis feminisme baru melalui perubahan atau koreksi haluan, di mana kita bisa menjadi bagian dari suatu proyek anti-neoliberal yang nyata.

CS: Saya dapat membayangkan bahwa banyak perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai aktivis atau ilmuwan feminis yang melihat kerja mereka untuk haluan feminis, menjadi dipertanyakan dan memberikan tanggapan defensif terhadap analisis Anda.

NF: Ketika saya menerbitkan esai, saya mengharapkan saya akan mendapatkan banyak sekali penolakan. Kenyataannya adalah bahwa saya mendapatkan jauh lebih sedikit daripada yang saya perkirakan, setidaknya dari lingkaran feminis akademis yang saya jalani. Bahkan jika orang-orang tidak sepenuhnya setuju dengan saya, mereka berpikir bahwa saya sedang melakukan sesuatu dan

ada sesuatu yang sedang salah dengan feminisme. Ada perasaan yang umum bahwa dunia yang kita pikir akan kita buat bukanlah dunia yang sebenarnya kita tinggali. Ada lebih banyak orang daripada yang saya duga yang bersedia memikirkan tentang tesis ini.

Saya merasa bahwa ini bukan tuduhan atau soal memperlakukan, melainkan suatu kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana suatu bentuk hegemoni neoliberal progresif tertentu dapat membangun dirinya sendiri dan memenangkan pertempuran akal sehat saat itu. Saya pikir kita perlu memahami peran apa yang mungkin telah kita mainkan tanpa disadari, sehingga kita bisa berbuat lebih baik dan melakukan suatu koreksi terhadap haluan kita. Tidak ada feminis kulit putih yang suka mendengar dari perempuan kulit hitam bahwa kita, tanpa bermaksud untuk itu, telah mereplikasi banyak asumsi yang terikat pada supremasi kulit putih atau sama sekali tidak peka terhadap situasi yang berbeda dari perempuan kulit berwarna. Tetapi kita harus mendengarkannya dan kita harus menyikapinya, dan saya pikir hal yang sama juga berlaku untuk ini. Reaksi pertama sering defensif, tetapi Anda tidak bisa hanya tetap berada dalam keadaan tersebut.

CS: Tapi saya berasumsi bahwa para feminis liberal tidak melihat diri mereka sebagai pendukung suatu agenda neoliberal melainkan berjuang untuk kesetaraan gender yang lebih besar...

NF: Pertanyaannya di sini adalah: apa yang kita maksud dengan kesetaraan? Kesetaraan adalah salah satu di antara konsep-konsep dasar yang dikontestasikan dengan interpretasi yang bersaing. Interpretasi liberal adalah apa yang saya sebut sebagai interpretasi meritokratis. Ini adalah gagasan bahwa pada akhirnya perempuan adalah individu dan mereka, sama seperti laki-laki, harus memiliki kesempatan dan peluang untuk melangkah sejauh bakat mereka akan membawa mereka sebagai individu. Kesetaraan di sini berarti mencoba membongkar hambatan-hambatan yang menyebabkan diskriminasi; masalah ketidaksetaraan adalah masalah diskriminasi, dan dengan menghilangkan hambatan-hambatan diskriminatif, para individu perempuan yang berbakat ini bisa melangkah sama tingginya dengan laki-laki.

Hal pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa ini adalah cita-cita spesifik kelas. Maksud sebenarnya adalah bahwa mereka ingin setara dengan laki-laki kulit putih heteroseksual dari kelas mereka sendiri. Arti feminisme bagi saya adalah gagasan kesetaraan yang lebih kuat dan radikal yang benar-benar tidak mendiversifikasi hierarki seksual, tetapi menghapusnya—atau setidaknya tidaknya sangat mengurangnya. Jadi ide persamaan meritokrasi ini tidak akan benar-benar saya sebut sebagai kesetaraan. Meritokrasi liberal sebagai suatu interpretasi kesetaraan telah membawa beberapa keuntungan nyata tetapi hanya untuk suatu lapisan sangat tipis dari para perempuan. Mayoritas

utama kaum perempuan tidak memecahkan langit-langit kaca [batas-batas yang selama ini tak dapat ditembus] ; mereka terjebak di ruang bawah tanah, mereka [hanya] membersihkan dan menyapu pecahan kaca. Saya adalah bagian dari upaya untuk mengembangkan sejenis feminisme alternatif terhadap feminisme liberal meritokratis ini.

CS: Sejak terpilihnya sejumlah pemimpin sayap kanan di Amerika Serikat dan Eropa, muncul perdebatan seputar pertanyaan apakah fokus yang berat sebelah pada “identitas” dalam gerakan sosial dengan mengorbankan ketidaksetaraan ekonomi terletak pada akar keberhasilan sayap kanan. Apa makna debat ini bagi gerakan feminis, yang di permukaan mempunyai satu faktor penggerak, yakni identitas bersama kita sebagai perempuan?

NF: Saya pikir kita bisa mengatasinya pada level yang berbeda. Pada tingkat konseptual, saya selalu berargumen bahwa gagasan yang mengatakan bahwa beberapa gerakan merupakan gerakan identitas dan beberapa gerakan merupakan gerakan kelas merupakan suatu kesalahpahaman. Gerakan berbasis kelas memiliki dua aspek. Mereka memiliki aspek struktural yang saya coba teorikan dalam hal distribusi walaupun ada cara lain untuk menjelaskannya, dan mereka selalu memiliki aspek identitas dalam artian bahwa semua perjuangan kelas, bahkan ketika mereka tidak secara eksplisit fokus pada hal ini, menyampaikan suatu citra mengenai perjuangan tentang siapakah mereka itu—baik menguntungkan atau merugikan, dll. Menurut saya feminisme tidak ada bedanya; subordinasi perempuan dalam masyarakat kapitalis sama tersudutnya secara struktural seperti eksploitasi kelas. Jadi saya merasa kesal ketika orang mengatakan bahwa feminisme adalah gerakan identitas dan hal lain ini adalah gerakan kelas. Saya pikir klaim kami memiliki kedalaman struktural dan akar yang sama dengan yang biasa mereka katakan tentang kontradiksi-kontradiksi utamanya. Pada saat yang sama, semua gerakan memiliki suatu basis identitas.

Namun dasar identitas dapat menyesatkan Anda. Sekarang ada suatu jargon, interseksionalitas (*intersectionality*). Saya memiliki beberapa kritik terhadap bahasa itu, tetapi poin utamanya adalah benar. Poin utamanya adalah bahwa tidak semua perempuan berada di perahu yang sama, tidak semua orang kelas pekerja berada di perahu yang sama, dan tidak semua orang kulit berwarna berada di perahu yang sama. Ada asimetri struktural lintas sektoral; asimetri kekuasaan, keuntungan dan kerugian, dll. Suatu feminisme yang mengatakan bahwa “kita tidak akan melihat isu-isu tersebut, kita hanya akan berbicara tentang perempuan” pada akhirnya hanya akan berbicara atas nama lapisan perempuan yang mempunyai hak istimewa saja. Itulah yang menurut saya yang sudah dilakukan oleh feminisme liberal dan meritokratis. Feminisme harus sedikit banyak berbicara tentang dan peka terhadap kelas, ras, dan semua poros utama penindasan lainnya dalam masyarakat kapitalis.

CS: Anda sendiri, bersama dengan sejumlah pemikir feminis terkemuka lainnya, baru-baru ini membahas masalah penciptaan suatu gerakan feminis yang lebih inklusif dan mengembangkan ide untuk “feminisme bagi yang 99 persen.” Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang inisiatif ini?

NF: Ini adalah bahasa populis yang kami pinjam dari [gerakan] *Occupy*. Dapat dikatakan bahwa, dari sudut pandang sosiologis yang ketat, ini tidak sepenuhnya tepat, tetapi hal ini memiliki kekuatan memobilisasi yang luar biasa dan dengan segera menyatakan bahwa ini bukan feminisme Christine Lagarde dan Hillary Rodham Clinton. Ini nyaris merupakan suatu cara “perang kata-kata” untuk menggambarkan diri Anda yang sedang melawan langit-langit kaca yang retak, *lean-in feminism* (feminisme asertif). Ini justru merupakan suatu upaya koreksi haluan. Apa yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, ketika saya mendiagnosisnya dalam esai itu, adalah bahwa dalam suatu pengertian tertentu feminisme—atau feminisme yang penting, dan dominan—entah bagaimana telah tersedot ke dalam sejenis aliansi atau, seperti yang dikatakan oleh Hester Eisenstein, sebuah “hubungan yang berbahaya” dengan kekuatan-kekuatan neoliberal semacam ini dan tampil sebagai alibi bagi mereka. Oleh karena itu, antitesis dari kekuatan-kekuatan neoliberal yang mewakili yang 1% adalah feminisme yang mewakili yang 99%. Itu adalah strategi retorik yang sangat sederhana. Hal yang menarik tentang hal ini—dan hanya beberapa dari kami yang memimpikannya—adalah bahwa itu benar-benar membumi dan agak tertanam, yang bagi saya menunjukkan bahwa ada sesuatu di sana yang sedang menunggu berlangsungnya sesuatu seperti ini. Ada kebutuhan nyata yang dirasakan untuk itu.

Feminisme bagi yang 99% ini benar-benar berkaitan dengan situasi mayoritas perempuan yang melakukan bagian terbesar dari reproduksi sosial dan pekerjaan upahan dan mereka yang kondisi kehidupannya memburuk di bawah rezim kapitalisme finansial yang neoliberal ini. Bentuk kapitalisme ini membutuhkan lebih banyak jam kerja berbayar per rumah tangga daripada jenis kapitalisme sebelumnya, menyerang kesejahteraan sosial dan semua jenis rezim perlindungan sosial di tingkat nasional, dan menggunakan utang sebagai senjata. Perempuan berada di garis depan serangan terhadap reproduksi sosial ini, dan kaum feminis yang 99% memusatkan aspek-aspek tersebut dan benar-benar mengikat mereka pada permasalahan bentuk kapitalisme ini. Kami sedang mencoba untuk memberi nama pada sistemnya, seperti yang biasanya kami katakan di SDS (Mahasiswa untuk Masyarakat Demokratis), dan ketika feminisme liberal mendapatkan akses ke sistem tersebut, kita berbicara mengenai cara-cara di mana sistem membuat hidup kita tidak layak.

CS: Tetapi 53% di antara perempuan kulit putih di Amerika Serikat memilih Donald Trump pada tahun



2016, seorang kandidat yang tidak hanya seksis secara terbuka tetapi juga tidak peduli dengan apapun jenis kesetaraan gender. Dapatkah gagasan tentang feminisme bagi yang 99% menjangkau para perempuan ini?

NF: Tidak semuanya, tapi saya pikir sebagian besar dari mereka. Tentu saja, beberapa dari mereka hanya seperti laki-laki yang memilih Trump; mereka orang Partai Republik yang membenci Hillary Clinton dan tidak akan mau memilihnya, orang-orang bisnis, mereka yang menginginkan pasar bebas, dll. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang biasanya diduga memilih [Partai] Republik, tapi tidak semua. Beberapa dari mereka adalah perempuan kelas pekerja dari daerah deindustriasi yang telah benar-benar hancur oleh pergeseran manufaktur ke luar Amerika Serikat dan beberapa dari mereka adalah perempuan dari [Negara Bagian] Selatan. Ada industrialisasi baru di Selatan, sering tanpa serikat pekerja, yang dalam beberapa tahun terakhir telah hancur juga. Mereka telah terhempaskan juga. Ada juga perempuan pedesaan, perempuan dari kota kecil di mana penganggurannya mengerikan, kecanduan opioid merajalela, dan seterusnya. Intinya adalah bahwa mereka ini bukan orang-orang yang akan mendapat manfaat dari *lean-in feminism* (feminisme asertif) atau dari versi apapun dari neoliberalisme progresif.

Sekarang belum terlalu banyak dijumpai, tetapi nantinya diharapkan akan ada kajian etnografi yang serius dan teliti tentang mengapa mereka memilih seperti yang sudah mereka lakukan,. Dalam beberapa wawancara yang telah saya lihat—dan ini tidak sistematis—Anda bisa merasakan apa yang orang rasakan. Ketika mereka mendengar rekaman *Hollywood Access* (yang terjadi menjelang pemilihan ketika Trump menyombongkan diri tentang memegang genital perempuan), mereka mengatakan hal-hal seperti itu membuat mereka benar-benar merasa tidak enak, mereka tidak menyukainya, itu tidak sopan, dan mereka tidak ingin dia berbicara seperti itu, tetapi mengingat hal-hal lain, dia masih menjadi yang terbaik bagi mereka. Selain itu, saya pikir ada juga orang-orang yang mungkin tidak suka cara dia berbicara tentang orang Meksiko atau Muslim, tetapi andaipun dia tidak menghormati orang-orang tersebut sampai sejauh itu, bagaimanapun juga dia berbicara tentang hal-hal yang akan dilakukannya untuk memperbaiki keadaan mereka.

Tentu saja, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa semua pendukung Trump adalah rasis. Ada pemilih Trump yang benar-benar rasis, tetapi mereka orang-orang yang tidak dapat kami jangkau dan saya tidak peduli terhadap

mereka. Saya peduli dengan mereka—dan saya pikir sejumlah besar di antara mereka—yang bisa dijangkau oleh kaum kiri. Kami tahu bahwa ada 8.5 juta orang Amerika yang memilih Trump pada tahun 2016 yang telah memilih Obama pada tahun 2012.

Yang paling penting adalah bahwa pada saat pemilihan November tiba, satu-satunya pilihan lain hanyalah Hillary Clinton, dan itu berarti neoliberalisme progresif. Bernie Sanders telah mewakili sesuatu yang lain, tetapi pada saat itu dia sudah keluar dari pertarungan.

CS: Jadi bagaimana menurut Anda 8.5 juta orang Amerika ini bisa dijangkau oleh kaum kiri?

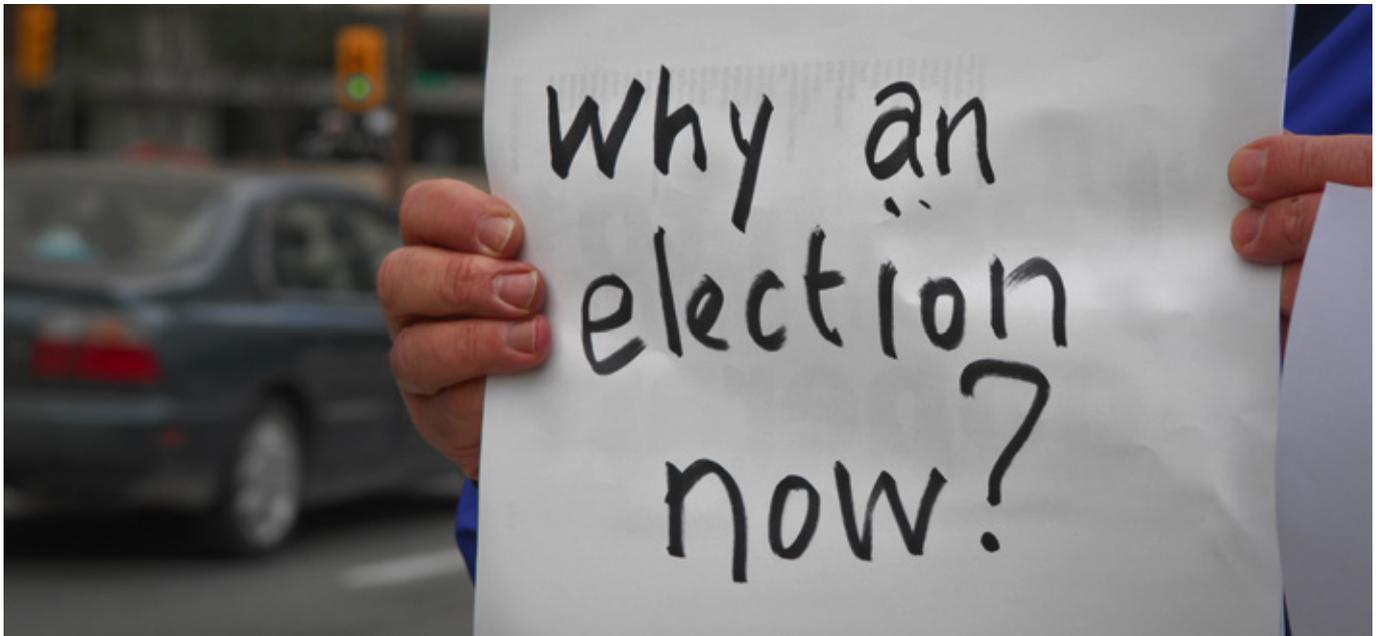
NF: Politik yang saya dukung, di mana feminisme bagi yang 99% adalah salah satu bagiannya, adalah mencoba untuk menghidupkan kembali sesuatu seperti opsi Sanders (saya hanya menggunakan namanya sebagai sebuah singkatan). Ini melibatkan setiap gerakan sosial progresif, mencoba membaginya antara mereka yang mendukung yang 99% dan mereka yang mendukung yang 1%—tentu saja ini kasar, tetapi ide harus jelas—dan menempatkan mereka bersama-sama. Apa yang Anda miliki dengan Sanders adalah gagasan bahwa Anda dapat menggabungkan banyak isu pro-kelas-pekerja dan pro-keluarga-pekerja, isu-isu pencarian nafkah sehari-hari (*bread-and-butter*): di antaranya, *Medicare* [asuransi kesehatan] untuk semua, membubarkan bank-bank [besar], dan biaya kuliah gratis.

Ketika saya mengatakan kelas pekerja, saya tidak hanya bermaksud orang kulit putih. Di Amerika Serikat, kelas pekerja memiliki banyak orang kulit berwarna dan perempuan di dalamnya, dan mereka semakin menganggap diri mereka sebagai kelas pekerja. Jadi ambillah isu-isu pencarian nafkah sehari-hari yang bisa bermanfaat bagi yang 99% dan bergabunglah dengan mereka dengan hal-hal seperti mereformasi sistem peradilan pidana, yang merupakan masalah mendesak bagi orang kulit berwarna, dengan kebebasan reproduksi, yang merupakan masalah mendesak bagi perempuan, dan dengan isu-isu serupa lainnya yang bersifat struktural dan material yang—meskipun seharusnya tidak perlu dianggap demikian—dianggap sebagai masalah identitas. Jadi saya pikir feminisme bagi yang 99% adalah contoh gerakan sosial untuk diikuti yang lainnya. Jadi mari kita lakukan, misalnya, environmentalisme bagi yang 99%. Kita memiliki aliran-aliran ini, tetapi marilah kita benar-benar menamakannya demikian dan menyatukannya dengan cara yang jelas. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Nancy Fraser <frasern@earthlink.net>

› Krisis Demokrasi

oleh **Hauke Brunkhorst**, Universitas Flensburg, Jerman



Bahwa demokrasi sedang berada dalam keadaan krisis merupakan suatu analisis yang kini tersebar luas dalam ilmu-ilmu sosial. Flickr/ItzaFineDay. Hak Cipta tertentu.

Setelah seabad penuh pertentangan kelas, perang dunia dan revolusi yang berdarah-darah dan brutal, negara kapitalis telah berubah menjadi negara *kosmopolitan* (misalnya Pasal 23 hingga 26, Konstitusi Jerman), *demokratis dan sosial* (Pasal 20 dan 28, Konstitusi Jerman). Di kawasan Global Utara, keadilan telah menjadi suatu “konsep mapan” (Hegel).

Relasi-relasi produksi untuk sebagian telah disosialisasikan [menjadi hal yang wajar dalam masyarakat], dengan harta yang dipecah-pecah menjadi berbagai bentuk khas milik pribadi dan milik umum yang jumlahnya tak terhingga. Para kapitalis dan buruh berlibur di tempat tetirah pantai yang sama, yang kapitalis dengan pemandangan menghadap laut sementara buruh dengan pemandangan menghadap jalan. Tetapi mereka berenang di air yang sama, bermain di pantai yang sama, dan anak-anak mereka sekolah di sekolah publik yang sama—dan inilah inti persoalannya. Buruh mengendarai mobil kecil, majikan mengendarai mobil yang lebih besar, tetapi masing-masing terjebak kemacetan yang sama, karena masih belum tersedia gedung pencakar langit dengan landasan helikopter bagi orang kaya—tetapi juga belum ada gedung tinggi dengan alat pemadam kebakaran yang memadai bagi orang miskin.

Akan tetapi kemakmuran di kawasan Utara Global harus dibayar mahal dengan kehancuran di kawasan Selatan Global. Negara kesejahteraan nasional berciri *kulit putih, laki-laki dan heteroseksual*. Tidak ada keadilan tanpa “kontradiksi mapan”

(Hegel). Demokrasi berakhir—di mana-mana—di garis batas *warna kulit* dan *gender*. Sejak dekade 1960an, gerakan sosial baru telah berkali-kali memprotes hal ini, dan secara bertahap berhasil memenangkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak sipil untuk orang kulit berwarna, emansipasi perempuan, hak-hak kaum difabel, hak atas identitas seksual, perlindungan lingkungan, dan budaya kosmopolitan. Ketika buruh dan mahasiswa bersatu di Paris pada bulan Mei 1968, mimpi penyatuan *kritik seni* dan *kritik sosial* terhadap kapitalisme modern (Boltanski) tampaknya menjadi kenyataan pada akhirnya. Menuntut hal yang mustahil tampaknya menjadi hal yang realistis. Akan tetapi yang kemudian terjadi adalah resesi ekonomi—yang membawa kaum politik kanan ke tampuk kekuasaan.

› Dari pasar yang tertanam dalam negara menjadi negara yang tertanam dalam pasar

Kudeta militer berdarah di Chile (1973) dan Argentina (1976) yang sangat didukung Barat merupakan *experimentum crucis* [eksperimen penting untuk mendukung hipotesis], sementara kemenangan neokonservatif di pemilihan umum Inggris Raya (1979) dan Amerika Serikat (1981) membukakan jalan, dan penghancuran diri sendiri oleh sosialisme birokratis (1989) pada akhirnya menyingkirkan hambatan terakhir bagi globalisasi neoliberal. Dalam jangka waktu hanya beberapa tahun, pasar yang tertanam dalam negara telah berubah menjadi negara yang tertanam dalam pasar. Keutamaan hukum publik telah digantikan oleh rezim-rezim transnasional (yang berjum-

lah semakin banyak) yang tunduk pada hukum perdata yang seperti halnya Hukum Perdata Romawi di zaman dulu, yang hanya bertujuan melayani kepentingan kelas penguasa di seluruh kekaisaran. Formalisme hukum yang membebaskan kita semua dari kuasa informal, beriringan dengan hukum informal yang sangat dinamis yang menyingkap realitas suatu “Negera ganda” (*Dual State*) baru (Fraenkel) yang menyandingkan hukum tertulis formal dan hukum penyelesaian perkara yang informal.

Satu contoh paradigmatik yang menggambarkan situasi itu adalah *Eurogroup* [kumpulan tak resmi para menteri keuangan negara-negara yang memakai mata uang Euro]. Setelah dikeluarkan dari kelompok ini pada puncak krisis tahun 2015, menteri keuangan Yunani menyelidiki apakah ada dasar hukum bagi tindakan tersebut. Ketua *Eurogroup* meminta para ahli hukumnya untuk menjelaskan bahwa kelompok ini tidak mempunyai peraturan prosedur baku, karena secara hukum kelompok ini pada dasarnya tidak ada, dan anggota-anggotanya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan asal bukan pembunuhan.

Kuasa ekonomi negara untuk melakukan intervensi dihalang-halangi oleh ditegakkannya kepatuhan pada pasar, sementara kekuatan kelembagaan dan kuasa kepolisian tetap tak berubah agar bisa melakukan tugas mereka sebagai “pasukan pengendali di pabrik,” yang menjamin keberlanjutan “tatanan pasar secara keseluruhan” tetapi tetap “tertanam” dalam kekuasaan negara (Hayek). Ketertanaman atau keterikatan dalam pasar dunia menjamin bahwa investor dapat secara bebas memilih negara tujuan, sementara negara tidak bisa memilih investor sehingga terpaksa ikut dalam perebutan antarnegara untuk menciptakan iklim investasi yang menarik. Akibatnya, perbedaan sosial antarkelas, bangsa, kebangsaan, dan generasi melonjak drastis ke ketinggian yang memuncak.

Dalam banyak hal sepak bola adalah cerminan dari masyarakat global. Besaran penghasilan pemain profesional di Liga Primer Inggris tahun 1985 adalah dua kali lipat dari penghasilan penggemarnya, namun kini sudah 200 kali lipat. Bersamaan dengan naiknya penghasilan pemain, harga tiket juga naik. Penggemar setia sepak bola yang tidak mampu mengikuti kenaikan ini lalu mundur dan tak lagi hadir, dan bangku-bangku penonton sekarang diisi oleh mereka yang lebih mampu membayar. Situasi yang sama juga terjadi di luar stadion: penduduk kawasan kumuh yang tak mampu lagi bergabung dengan masyarakat yang baru kemudian menjadi apatis terhadap politik dan terjebak dalam penyalahgunaan alkohol dan prostitusi yang terkait dengan narkoba. Kurang dari 30% pemilih di tempat itu datang ke tempat pemungutan suara, sementara di perumahan yang kaya lebih dari 90% ikut memilih sehingga orang kaya merasa berada di garis depan kemajuan. Bahkan jika kemajuan itu ternyata tidak sebesar yang dibayangkan, mereka masih tetap berdompet tebal. Jelas saja, partai-partai kiri yang terus-menerus kehilangan pemilih, makin bergeser ke kanan pada setiap pemilihan umum—sebagaimana dapat diharapkan dalam situasi ekonomi pasar yang berlandaskan persaingan evolusi tanpa ujung.

› Kesenjangan sosial menciptakan kesenjangan politik

Prestasi-prestasi penting gerakan feminis dan multikultural, yang menghancurkan relasi dominasi yang sudah berlangsung selama beberapa dasawarsa, sedang kehilangan “makna sejatinya” (*fair value*) (Rawls). Para pengangguran, orang Yahudi, lesbian, dan mantan narapidana perempuan kulit hitam tidak bisa lagi meninggalkan “ikatan darah” (Marx) dari ghetto aslinya—di mana ia rentan terhadap segala prasangka anti-Semit, homofobia, dan misogini yang sama seriusnya dengan seksisme dan kekerasan oleh polisi serta geng-geng laki-laki yang dihadapinya.

Bilamana kampanye elektoral hanya menawarkan alternatif-alternatif *teknis* yang berisi strategi ekonomi mikro demi penyesuaian diri dengan pasar dunia, dan bukan alternatif-alternatif *politik* terhadap ekonomi pasar neoliberal, maka keberadaan demokrasi akan berakhir.

“Kemurungan yang gemerlap” (Kant) yang tampak di pusat-pusat perbelanjaan memperlihatkan wajahnya yang tidak gemerlap di padang pasir Libya, di laut, dan di kamp-kamp sepanjang perbatasan di sebelah selatan [Jerman]. Di bekas kamp pengungsi Moria di pulau Lesbos di Yunani, yang sekarang diubah menjadi suatu pusat deportasi, Uni Eropa sedang mengorbankan prinsip-prinsip yang dulu dianutnya. “Kawasan kebebasan, keamanan dan keadilan” (Pasal 4, Perjanjian tentang Beroperasinya Uni Eropa, disingkat TFEU) “yang menghargai hak-hak dasar” (Pasal 67, TFEU), menjamin “hak untuk mendapatkan suaka” internasional (Pasal 18, Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa) dan “ketaatan pada prinsip *non-refoulement*” [anti pemulangan paksa] (Pasal 78, TFEU), di mana “rasisme dan xenofobia” dicegah dan diperangi (Pasal 67, TFEU), sedang diubah menjadi hukum kongkret melalui tiga jenis perbatasan di kamp Moria di Lesbos yang sangat jorok, miskin peralatan medis, dan penuh sesak: Yang pertama, perbatasan tembok yang mengepung kamp tahanan menjadi tempat menempatkan pencari suaka yang ditolak dan orang-orang yang baru saja datang secara ilegal dan sudah disetujui untuk dideportasi. Perbatasan kedua, terbuat dari kawat berduri, menara pengawas, dan penjaga bersenjata, mengepung kawasan tempat permukiman pengungsi yang di tengahnya ada kamp tahanan. Yang ketiga adalah laut, dan pulau yang tak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Berkat perbatasan berupa laut yang melindungi hakikat kawasan pasar [Eropa], perbatasan menjelma sebagai bagian dari hukum alam. Siapapun yang datang akan ditahan, seolah-olah menyelamatkan diri merupakan suatu kejahatan. Seperti dikatakan Carolin Wiedermann: “Tempat-tempat seperti Moria itu sedang dirancang di seluruh Uni Eropa. Tempat-tempat tersebut nantinya akan dinamai ‘Pusat-pusat Terkendali’ (*Controlled Centers*) [dalam bahasa Jerman: *Kontrollierte Zentren*]. Lebih baik orang tidak menduga-duga apa istilah singkatan [dalam bahasa Jerman] dari nama ini.” ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Hauke Brunkhorst
<brunkhorst@uni-flensburg.de>

› Kebangkitan Kapitalisme Otoriter

oleh **Christian Fuchs**, Universitas Westminster, Inggris Raya

Politik ekstrim kanan dewasa ini telah meluas dan mengkonsolidasi kekuasaannya. Kita punya Donald Trump (Partai Republik) di AS, Viktor Orbán (Fidesz) di Hungaria, Heinz-Christian Strache (Partai Kebebasan) di Austria, Geert Wilders (Partai untuk Kebebasan) di Belanda, Narendra Modi (Partai Bharatiya Janata) di India, Recep Tayyip Erdoğan (AKP) di Turki, Partai Alternatif bagi Jerman, Jarosław Kaczyński (Partai Hukum dan Keadilan) di Polandia, Marine Le Pen (mantan anggota Front Nasional) di Prancis, Liga Utara (*Lega Nord*) di Italia, Vladimir Putin (Front Seluruh Rakyat Rusia) di Rusia, dll. Bagaimana sebaiknya menjelaskan perkembangan ini? Kategori sosiologis macam apa yang paling tepat untuk menjelaskan hal ini?

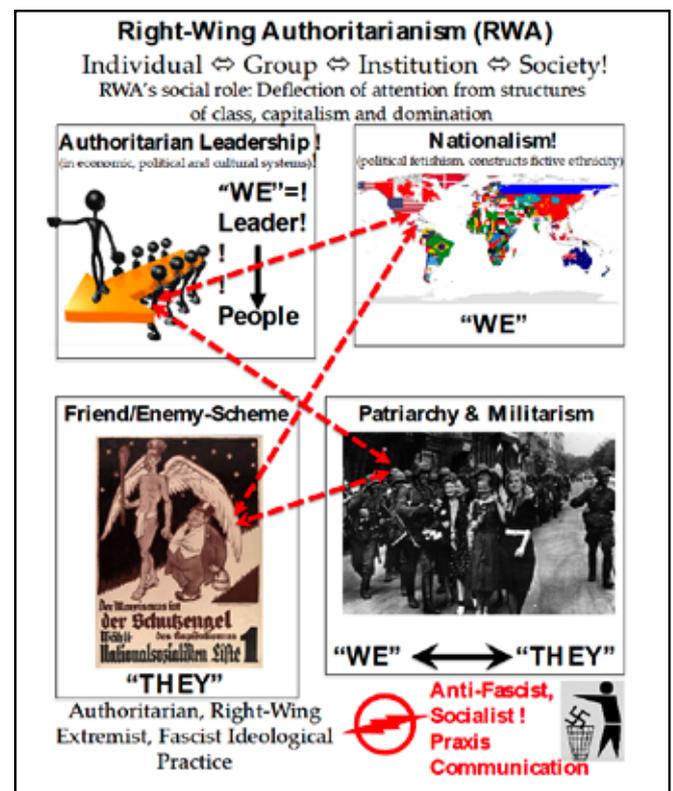
Satu usulan yang cukup banyak diterima adalah penggunaan konsep populisme. Jan-Werner Müller (2017) baru-baru ini memperbaharui gagasan tersebut dalam bukunya *What Is Populism?* Dalam buku ini dia mendefinisikan populisme sebagai “suatu imajinasi politik moralistik tertentu, cara memahami dunia politik yang mengadu rakyat [...] yang sepenuhnya bersatu dan secara moral murni dengan elit yang dianggap korup atau secara moral lebih rendah. [...] Tokoh populis selalu antikebhinekaan: mereka mendaku bahwa mereka, dan hanya merekalah, yang mewakili rakyat.” Dia juga menulis bahwa populisme adalah “suatu bentuk eksklusif dari politik identitas” yang “membahayakan demokrasi” dan bertujuan untuk “membungkam masyarakat sipil.”

Pendekatan-pendekatan semacam itu memakai kategori yang satu dan sama untuk Syriza, Evo Morales, Podemos, atau Bernie Sanders di sayap kiri dan Donald Trump, Geert Wilders, atau Marine Le Pen di sayap kanan. Hasilnya adalah bahwa, seperti halnya teori totaliterisme, kaum kanan radikal dibandingkan dengan kiri radikal sehingga bahaya yang ada pada kaum kanan terkesan diremehkan. Bagi Müller, Donald Trump dan Bernie Sanders sama-sama sama populis. Bernie Sanders memang bukan seorang politisi konvensional, tetapi bila dibandingkan dengan Trump, orientasi demokratisnya tidak perlu diragukan lagi.

Saya memakai pendekatan yang berbeda dalam buku saya *Digital Demagogue: Authoritarian Capitalism in the Age of Trump and Twitter* (2018) yaitu menggabungkan ekonomi politik kritis, kritik ideologi, dan psikologi kritis. Otoriterisme sayap kanan (*right-wing authoritarianism*, RWA) mengandung empat elemen (lihat Gambar 1): keyakinan pada perlunya kepemim-

pinan dari atas (*top-down leadership*); nasionalisme; skema kawan/lawan; dan patriarki militan (kebijakan tertib hukum; pemujaan terhadap perang dan tentara; penindasan terhadap musuh-musuh rekaan; relasi gender yang konservatif). RWA mengabdikan tujuan ideologis untuk mengalihkan perhatian dari peran struktur kelas sosial dan kapitalisme sebagai landasan dan penyebab dari masalah-masalah sosial. Pengungsi, imigran, negara-negara berkembang, Muslim, dll., dijadikan kambing hitam bagi masalah-masalah seperti pengangguran, upah rendah, kemandegan ekonomi, kemerosotan pelayanan publik, krisis perumahan, dan kriminalitas. Trump menyalahkan Meksiko dan Tiongkok untuk deindustrialisasi dan kemerosotan sosial tanpa pernah menyebut bahwa modal asal AS mengeksploitasi buruh baik di AS sendiri maupun di negara-negara lain yang menjadi tujuan investasi Amerika, termasuk di pabrik-pabrik pemeras buruh di Tiongkok dan *maquiladoras* Meksiko.

Gambar 1: Model otoriterisme sayap kanan



Sumber: C. Fuchs, 2018.

RWA bukan sebentar kesadaran atau struktur atau tipe masyarakat. Ia adalah suatu proses yang bisa terjadi di macam-macam tingkat masyarakat: individu (struktur kepribadian yang otoriter, kesadaran, perilaku politik individu), kelompok dan gerakan politik, ideologi, lembaga, masyarakat sebagai keseluruhan. Ekstremisme sayap kanan dan fasisme adalah bentuk intensif dari RWA yang membiarkan atau malah aktif menganjurkan kekerasan fisik dan teror sebagai alat politik.

Penjelasan kultural mengenai kebangkitan RWA menda-ku bahwa kebangkitan suatu masyarakat “pasca-materialis” telah menciptakan jurang antargenerasi, di mana generasi yang lebih tua teguh memegang nilai-nilai konservatif sambil mengeluhkan hilangnya kejayaan masa lalu. Akan tetapi, misalnya, hipotesis pasca-materialisme tidak dapat menjelaskan mengapa di pemilihan umum federal Austria tahun 2017, kaum ekstrem kanan menang di kelompok usia 16-29 (30%), tetapi hanya menjadi nomer tiga di antara orang berusia 60 tahun ke atas.

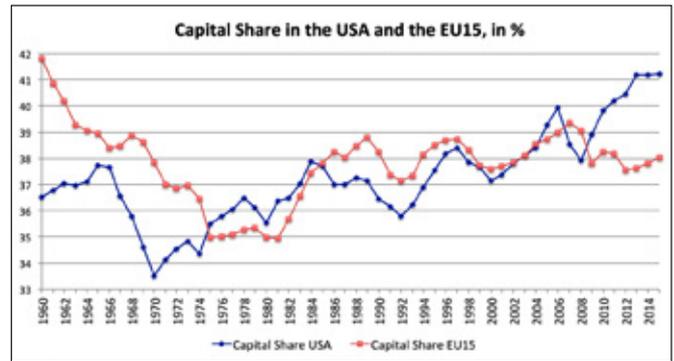
Suatu penjelasan alternatif memakai pendekatan ekonomi politik secara serius. Dalam hal ini, pendekatan yang dipakai teoretikus politik kritis Franz L. Neumann dalam esainya [Anxiety and Politics](#) (1957) sangat berguna. Menurut penjelasan ini kebangkitan otoriterisme sayap kanan terkait dengan alienasi buruh (lihat Gambar 2 dan 3); kompetisi yang destruktif; alienasi sosial yang menciptakan ketakutan pada kemerosotan sosial; alienasi dari sistem politik, politisi dan partai politik; dan pelembagaan kegelisahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan yang menakut-nakuti orang dan menggunakan politik pengkambinghitaman.

Gambar 2: Upah dalam GDP AS dan Uni Eropa secara lintas waktu



Sumber Data: AMECO.

Gambar 3: Kapital dalam GDP AS dan Uni Eropa secara lintas waktu



Sumber Data: AMECO.

Kapitalisme otoriter adalah hasil dari dialektika negatif kapitalisme neoliberal. Kontradiksi antara kebebasan pasar dan kebebasan sosial menghasilkan melebarnya kesenjangan dan krisis yang berubah wujud sesudah kerontokan ekonomi tahun 2008. Borjuisisasi dan neoliberalisasi demokrasi sosial, kelemahan kelompok kiri, dan politik identitas pascamodern yang meremehkan pentingnya politik kelas dan analisis kelas membuat kebangkitan ekstrem kanan dan kapitalisme otoriter makin menjadi-jadi. Kapitalisme neoliberal mengakibatkan universalisasi alienasi. Sebagaimana dikatakan oleh Harvey, Hardt dan Negri, dan saya sendiri [di tempat lain](#), neoliberalisme menghasilkan komodifikasi hampir segala-galanya sehingga kita mengalami akumulasi primitif yang tak berkesudahan yang terjadi lewat perampasan hak milik dan penundukan masyarakat di bawah kapital. Menurut David Harvey: “Alienasi yang meluas telah menghasilkan gerakan-gerakan Pendudukan (*Occupy movements*) maupun populisme ekstrem kanan dan gerakan-gerakan nasionalis bigot dan rasis. Donald Trump adalah Presiden alienasi.” ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada <christian.fuchs@triple-c.at>

› Kewarganegaraan yang Dietniskan

sebagai Kewarganegaraan Tidak Sah

oleh **Andrea Silva-Tapia**, Universitas Humboldt Berlin and Universitas Justus Liebig Giessen, Jerman

› Kewarganegaraan dan pengembangan negara-bangsa dalam dunia yang masih kolonial

Kewarganegaraan (*citizenship*) sebagai sebuah konsep bersifat ambigu dan perdebatan tentang maknanya agak luas. Sementara bagi beberapa orang istilah tersebut mengacu pada status hukum murni yang diberikan oleh negara atau kebangsaan yang dimiliki seseorang, bagi orang lain hal tersebut berkonotasi sebagai suatu bentuk identitas. Menggabungkan berbagai definisi dan mengikuti [pendapat] beragam penulis seperti T.H. Marshall, Margaret Somers, T.K. Oommen, Engin F. Isin dan Patricia K. Wood, kewarganegaraan dapat digambarkan sebagai suatu bentuk keanggotaan modern dalam ruang politik dan geografis. Oleh karena itu, konsep kewarganegaraan mengekspresikan ikatan *hukum* dan *simbolis* [seseorang] terhadap suatu negara-bangsa. Ini tampaknya suatu definisi yang sederhana tetapi menjadi lebih kompleks jika kita mempertimbangkan konteks historis di mana konsep kewarganegaraan muncul.

Kewarganegaraan dalam bentuk modernnya berkembang seiring dengan asal-usul negara-bangsa. Kewarganegaraan adalah sebuah konsep yang secara bersamaan terkait dengan modernitas, pengembangan negara-bangsa, dan suatu rasa memiliki (*a sense of belonging*). Hal ini dapat ditelusuri kembali pada gagasan di akhir abad ke-18 tentang suatu negara-bangsa, yang disuarakan dalam revolusi-revolusi Prancis dan AS serta kemerdekaan dari negara-negara kolonial, yang mengikuti pola pengembangan negara-bangsa yang sama. Suatu negara-bangsa yang modern didefinisikan sebagai negara merdeka, dengan konstitusi tertulis, dan menjalankan kekuasaan atas nama warga negara yang setara. Dengan demikian, prinsip-prinsip legitimasi berubah dari monarki (atau Hak Ilahi) menjadi representasi dari suatu bangsa dengan warga negara yang setara. Namun, konsep-konsep kewarganegaraan dan negara-bangsa ini didasarkan pada suatu cara yang tunggal (yang Eurosentris)

dalam membangun negara-bangsa, di mana kolonialitas berjalan dengan kuat dan masih tetap berlangsung.

Kewarganegaraan yang tidak sah adalah suatu cara lain untuk menamai suatu kewarganegaraan yang bersifat kolonial yang disisipkan ke dalam sistem dunia kita masa kini yang patriarkal, Eurosentris, dan berpusat pada agama Kristen. Sistem dunia kolonial ini bekerja melalui hirarki ras/etnis global, yang menentukan kelompok mana yang pantas mendapatkan prestise dan mana yang tidak. Anja Weiss berpendapat bahwa kita dapat berbicara tentang rasisme “ketika suatu penanda jangka panjang dan bersifat tetap seakan-akan membuat sesuatu yang diduga liyan (*otherness*) menjadi terlihat dan berdampak pada klasifikasi sosial, praktik dan institusi-institusi dengan cara menyematkan hak yang lebih rendah pada kolektif dari kategori-kategori tersebut, terlepas dari apakah penanda ini mengacu pada perbedaan biologis atau jenis-jenis perbedaan lain yang bersifat tetap.” Kewarganegaraan yang dietniskan (*ethnicized*) atau dirasialkan (*racialized*) ini dialami tidak hanya oleh kelompok etnis setempat dan minoritas di seluruh dunia, tetapi juga oleh para migran yang mengalami proses etnisasi (*ethnicization*)/rasialisasi (*racialization*), seperti yang terjadi dengan orang Turki di Jerman atau orang Amerika Latin di AS. Proses etnisasi ini berarti bahwa suatu kelompok direndahkan dan dianggap sebagai suatu kelompok homogen karena karakteristik rasial atau budayanya.

Dalam gagasan negara-bangsa ini yang berada pada suatu sistem dunia yang Eurosentris, bangsa merupakan esensi di mana negara-negara modern dibangun dan merupakan dasar legitimasi mereka. Hubungan antara bangsa dan negara modern tampak jelas dan biasanya tidak dipertanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menggunakan istilah “bangsa,” “negara,” dan “negeri” secara bergantian. Dan kadang-kadang kita bahkan menganggap kewarganegaraan sebagai suatu sinonim untuk kesemua hal tersebut.

“Warga negara yang dirasialkan, warga negara yang tidak sah, selalu digambarkan sebagai bagian dari suatu kelompok, dan tidak pernah menjadi subyek individu yang otonom”

› Warga negara yang sah dan tidak sah

Orang-orang yang mengintegrasikan bangsa sebagai suatu kelompok budaya yang homogen dianggap sebagai warga negara yang sah, sementara warga-warga yang di-etnisikan dianggap tidak sah. Mereka ini dianggap sebagai warga negara tetapi bukan yang sah atau yang “sebenarnya.” Keabsahan yang terkait dengan etnisasi dan devaluasi ras ini merupakan suatu jenis khusus ketidaksetaraan yang mempengaruhi martabat orang dan peluang yang tersedia bagi mereka dan mengarah pada diskriminasi dan penghinaan. Ketidaksetaraan ini dimulai sebagai suatu ketidaksetaraan kewarganegaraan bersamaan dengan kelahiran negara-bangsa, tetapi hal ini mengikuti klasifikasi dan struktur yang datang dari masa sebelumnya (masa pra negara-bangsa atau masa kolonial). Para pemimpin yang membangun negara-bangsa atau gerakan kemerdekaan mempromosikan suatu identitas nasional homogen yang mengesampingkan banyak kekhususan, seperti yang terjadi pada kasus Mapuches (masyarakat adat di Cile), atau warga wilayah Timur-laut (Northeasterners) di India (yang mewakili beberapa kelompok etnis yang berbeda di India, tetapi distereotip dan diesklusikan dengan cara yang sedikit-banyak sama) dan, seperti yang sekarang terjadi dengan para migran yang teretnisasi (seperti kaum migran Turki di Jerman). Warga Mapuches di Cile dan warga wilayah Timur-laut di India tinggal di daerah dengan lebih sedikit perkembangan industri di mana kesempatan kerja dan pendidikan juga lebih sedikit. Kedua kelompok mengalami serangkaian konflik dengan negara dan polisi (dalam kasus warga Timur-laut India, bahkan mereka konflik dengan tentara) dan identitas mereka dihadapkan pada identitas nasional yang hegemonik. Dalam kasus warga Timur-laut India, mereka juga menghadapi kekerasan dan pelecehan dari penduduk lain, terutama ketika mereka meninggalkan wilayah Timur Laut dan bermigrasi ke kota-kota seperti Delhi, Mumbai atau Bangaluru.

Warga negara yang sah dan tidak sah adalah dua jenis warga negara, terlepas dari pengakuan hukum terhadap keduanya. Namun, dimensi ‘menjadi bagian’ (*belonging*) hanya diakui untuk yang jenis warga pertama, yang menurunkan warga yang tidak sah sebagai warga sekunder. Warga negara yang tidak sah [dianggap] “kekurangan” sesuatu, budaya dan perilaku mereka dipandang tidak lengkap, dan ini memancing diskriminasi dan penghinaan yang tidak tampak oleh masyarakat lainnya.

› Konsekuensi bagi demokrasi

Kewarganegaraan adalah sebuah konsep yang mengacu pada individu, tetapi ketika itu dirasialkan atau di-etnisikan, individualitas subjek tersebut diambil. Warga negara yang dirasialkan, warga negara yang tidak sah, selalu digambarkan sebagai bagian dari kelompok: “imigran,” “Arab,” “Muslim,” “masyarakat adat,” “orang India Timur Laut,” dan tidak pernah menjadi subjek individu yang otonom. Individualitas ini [hanya] disediakan untuk orang kulit putih. Sebagai akibatnya, kegagalan seorang kulit putih Eropa atau keturunan Eropa dianggap [hanya] merupakan kesalahan individu; [karena] mereka memiliki hak istimewa untuk menjadi warga negara individual. Hal ini telah dikonsepsikan sebagai “hak istimewa kaum kulit putih” (*white privilege*). Di sisi lain, kegagalan subjek kolonial, kesalahan warga negara yang tidak sah, dianggap berkaitan dengan budaya, bangsa, ras, etnisitas mereka, tetapi tidak pernah berkaitan dengan individu sebagai seorang warga negara yang otonom. Para warga negara yang tidak sah selalu terpenjara oleh etnisitas dan ras mereka dengan cara yang tidak dialami oleh orang-orang yang menikmati hak istimewa kaum kulit putih. Hak istimewa kaum kulit putih beroperasi sebagai suatu kepastian yang terselubung; [yang berarti] etnisitas dan ras mereka yang memperoleh keistimewaan tidak pernah disebutkan atau diakui. Hal-hal tersebut tidak ada dan fakta inilah yang memunculkan kebebasan individualitas. Pencapaian dan kegagalan orang-orang yang memiliki hak istimewa tersebut dilihat sebagai prestasi individu dan bukan sebagai bagian dari etnis atau ras yang mereka miliki.

Tidak adanya pengakuan tentang pengalaman kelompok-kelompok tertentu dapat menyebabkan terjadinya konflik dan bahkan kekerasan jika tuntutan mereka tidak ditanggapi secara serius. Di dunia kita masa kini, kita tidak dapat lagi memikirkan negara-bangsa yang homogen secara budaya, ras, atau etnis. Mendengarkan orang-orang yang telah dibungkam merupakan sebuah utang sejarah yang harus dibayar untuk memperdalam demokrasi. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Andrea Silva-Tapia
<andrea.silva-tapia@sowi.uni-giessen.de>

› Kekeliruan Demokrasi

di Afrika Selatan Pasca-1994

oleh **Hlengiwe Ndlovu**, Universitas Witwatersrand, Afrika Selatan



Buku *Rioting and Writing* muncul dari gerakan #FeesMustFall (turunkan uang kuliah) dan penghimpunan artikel dari para aktivis mahasiswa. Hak Cipta: SWOP

Meskipun konsep demokrasi memiliki beragam penafsiran yang mencakup pemerintahan yang dipilih secara demokratis, pemilihan umum yang bebas dan adil, dan pelaksanaan beragam hak-hak asasi manusia dan individu, namun bagi banyak orang Afrika Selatan makna demokrasi sangat berakar pada sejarah eksklusi yang dialami mayoritas penduduk. Di samping berabad-abad perbudakan dan kolonialisme, ada 46 tahun perjuangan memerangi sistem *apartheid* yang rasis yang dengan sengaja memisahkan dan menyingkirkan warga kulit hitam dari ruang-ruang sosiokultural dan peluang-peluang ekonomi. Warga kulit hitam Afrika Selatan mengharapkan makna-makna konkrit dari demokrasi. Yang terpenting, gagasan “bangsa pelangi” yang dicetuskan oleh salah seorang ikon perjuangan, Uskup Desmond Tutu, menganjurkan bahwa dengan hilangnya *apartheid*, warga Afrika Selatan yang terbelah-belah secara rasial akan menjadi satu bangsa dengan kesempatan-kesempatan yang setara untuk memperoleh sumber-sumber daya sosial budaya dan ekonomi.

Gerakan #FeesMustFall adalah sebuah perjuangan yang dibangun di seputar kesadaran bahwa demokrasi hanyalah sebuah lelucon dan bangsa pelangi hanyalah sebuah mitos. Meskipun sebagian besar institusi kulit putih yang bersejarah seperti Universitas Witwatersrand (Wits) dan Universitas Cape Town (UCT), antara lain, membanggakan perubahan populasi mahasiswanya dengan meningkatnya jumlah mahasiswa kulit hitam, hal ini sesungguhnya jauh dari kenyataan. Kedua universitas ini masih berada di antara universitas paling mahal di negara ini dengan kekerasan budaya dan epistemik yang mengakar. Selain itu, sementara jumlah mahasiswa kulit hitam meningkat, lembaga-lembaga pendidikan tinggi secara sistematis terus mengeksklusi mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai latar-belakang miskin secara sosial, geografis, budaya, dan ekonomi.

Dalam beberapa tahun belakangan, Afrika Selatan telah dicengkeram oleh gerakan mahasiswa dengan militansi yang agaknya belum pernah ada sebelumnya sejak pemberontakan mahasiswa Soweto tahun 1976. Gerakan #FeesMustFall (turunkan uang kuliah) muncul pada tahun 2015 dan berlanjut sampai tahun 2016. Tuntutan tersebut diajukan di seputar akses terhadap pendidikan berkualitas yang murah, serta transformasi dan dekolonisasi lembaga pendidikan tinggi. Gerakan ini menjangkau seluruh universitas negeri dan dicirikan oleh suatu aliansi yang unik antara para mahasiswa dan para pekerja alih daya (*outsourced*) universitas. Inti dari perjuangan tersebut sebenarnya adalah konfrontasi langsung terhadap kegagalan demokrasi dan kekeliruan gagasan tentang “bangsa pelangi (*rainbow nation*)” [sebuah sebutan untuk bangsa Afrika Selatan yang multikultur] yang diobral kepada masyarakat Afrika Selatan setelah 1994.

Di Afrika Selatan muncul harapan bahwa, setelah tahun 1994, kelompok-kelompok yang sebelumnya tereklusi akan memperoleh manfaat dari keberadaan organisasi demokratis; partai pembebasan utama, Kongres Nasional Afrika (ANC) yang mempunyai slogan “kehidupan yang lebih baik untuk semua.” Orang-orang berharap kehidupan mereka akan membaik di semua bidang—termasuk akses kepada pendidikan

berkualitas seperti yang diusulkan oleh Piagam Kebebasan, akses memiliki perumahan yang layak, air bersih, listrik, kesempatan kerja, dan sanitasi—seperti yang dijabarkan dalam dokumen kebijakan Program Rekonstruksi dan Pengembangan (RDP). [Tetapi] gelombang-gelombang protes yang terkait penyelenggaraan pelayanan yang menghancurkan kota-kota yang dihuni mayoritas kulit hitam setelah 1994, kekerasan di sektor perburuhan seperti pembunuhan massal Marikana di tahun 2012, dan protes-protes gerakan *#FeesMustFall*, antara lain, memperlihatkan kegagalan negara Afrika Selatan dalam memberikan hasil yang diharapkan dari demokrasi.

Universitas-universitas Afrika Selatan tidak dapat dipisahkan dari tatanan sosial yang lebih luas. Untuk membongkar krisis demokrasi pasca-1994, penting untuk meninjau ulang transisi demokrasi Afrika Selatan, yang pernah dinegosiasikan sebagaimana kemerdekaan-kemerdekaan lain di seluruh Afrika dinegosiasikan. Negosiasi semata-mata berarti reposisi strategis dari pihak-pihak yang berunding yang disamarkan sebagai sebuah upaya putus asa untuk mencapai “transisi damai.” Hal ini mengakibatkan orang Afrika Selatan kulit hitam mendapatkan kekuatan politik hanya untuk menggunakan hak mereka memilih dan mengorganisir—suatu hak yang terus terancam oleh kekerasan negara pasca-1994. Di sisi lain, kekuatan ekonomi dan sumber daya strategis seperti tanah, bank, dan tambang terus-menerus berada di tangan pemilik sebelumnya yang mempertahankan dominasi sistem supremasi kulit putih. Ini terus mengeksklusikan hampir 80% penduduk kulit hitam dari kegiatan ekonomi. Berbicara tentang demokrasi di Afrika Selatan pasca-1994 oleh karenanya menjadi tidak mungkin tanpa menghadapi ketidaksetaraan ekonomi struktural.

Gerakan *#FeesMustFall* muncul untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tentang eksklusivitas dan menuntut akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas yang murah, transformasi, dan dekolonisasi proyek akademik dan budaya universitas. Menariknya, universitas-universitas yang secara historis didominasi warga kulit hitam seperti Universitas Fort Hare (di mana banyak para ikon perjuangan Afrika dididik), antara lain, telah melakukan perjuangan ini sepanjang ingatan sejarah. Namun, diperlukan fenomena lain yang problematik—[seperti] romantisasi universitas-universitas yang secara historis berwarga kulit putih oleh media supremasi kulit putih Afrika Selatan—untuk mengangkat perjuangan menjadi sorotan internasional, di mana digambarkan bahwa perjuangan ini dimulai di Universitas Wits. Yang paling penting, gerakan *#FeesMustFall* muncul beberapa bulan setelah gerakan *#RhodesMustFall* [gerakan mahasiswa merubuhkan patung Rhodes yang menyimbolkan perlawanan terhadap ketidakadilan rasial dalam pendidikan] di UCT [Universitas Cape Town] telah mengangkat isu-isu transformasi dan dekolonisasi kurikulum serta sistem pendidikan tinggi yang lebih luas. Berkaitan erat dengan proyek dekolonisasi, perjuangan ini menjadi bagian dari kritik terhadap sebuah proyek global komersialisasi dan marketisasi universitas-universitas dengan mengorbankan kemajuan ontologis dan epistemologis.

Meskipun secara historis lembaga-lembaga yang didominasi kulit putih mengklaim telah mengalami transformasi dalam populasi mahasiswanya, eksklusivitas yang sistematis dan struktural terus-menerus mendistribusikan ketidaksetaraan di sepanjang lini rasial. Biaya [kuliah] yang terlalu tinggi berarti bahwa mereka yang mampu membayar—kebanyakan

para mahasiswa kulit putih yang diuntungkan dan beberapa mahasiswa kulit hitam kelas menengah—akan memiliki akses, sementara sebagian besar mahasiswa kulit hitam secara sistematis tereksklusi—[sehingga] menggagalkan angan-angan tentang sebuah bangsa pelangi. Selanjutnya, staf akademik—baik yang internasional maupun dari Afrika Selatan—tetap [didominasi] kulit putih, sementara kurikulum akademisnya tetap didominasi ciri Eurosentris. Ini menciptakan ketidakcocokan dan bentrokan budaya. Kegagalan sebagian besar staf akademik untuk mengadopsi metode-metode yang Afrosentris dalam produksi pengetahuan ontologis dan epistemologis terus menjadi tantangan bagi mayoritas mahasiswa kulit hitam dari kota-kota yang miskin.

Gerakan *#FeesMustFall* muncul untuk menghadapi kegagalan sistem politik demokratis dalam mencapai demokrasi konkrit dan mewujudkan impian suatu bangsa pelangi. Meskipun gerakan itu menjadi tantangan besar bagi universitas-universitas dan negara, gerakan tersebut juga memiliki tantangan tersendiri. Pada tahap-tahap awal gerakan ini dicirikan oleh kesatuan antar afiliasi politik, ras, dan pemisahan kelas. Namun, sejak awal, gerakan tersebut secara internal rentan karena kurang demokratis di seputar isu-isu ideologis dan masalah-masalah gender. Meskipun gerakan ini dimulai oleh kaum *womxn* [kelompok feminis yang inklusif], rekan-rekan mereka yang laki-laki dengan sengaja mengambil alihnya sehingga mendominasi perjuangan dan menggerogoti peran kaum *womxn* serta mereka yang menganut gender non-konformis. Namun, kaum *womxn* di *#FeesMustFall* bertekad untuk tidak mereproduksi sistem patriarkal yang sama dengan yang mereka perangi. Hal ini memecah gerakan, karena banyak yang menuduh bahwa suara-suara yang tidak setuju itu sedang memecah-belah. Lebih dari itu, negara dan universitas-universitas menjadi sangat represif dan ganas. Polisi antihuru-hara dikerahkan di berbagai kampus dan diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan yang berlebihan. Aktivis mahasiswa menjadi sasaran, ditangkap, dan beberapa dikeluarkan dari universitas. Dengan adanya sifat represif dari negara yang tidak demokratis tersebut, gerakan harus mundur dan menjajaki cara-cara alternatif untuk memajukan perjuangan.

Gerakan *#FeesMustFall* saat ini dalam keadaan tak berkepastian. Beberapa aktivis mahasiswa masih mendekam di penjara dan beberapa sedang menjalani proses pengadilan. Meskipun negara Afrika Selatan mengalami kemajuan dalam menggulirkan pendidikan gratis bagi kaum miskin, perjuangan untuk memperoleh pendidikan berkualitas yang murah dan terdekolonisasi terus berlanjut. Demokrasi tetap merupakan peristiwa yang terjadi di jalan-jalan Afrika Selatan pada tahun 1990-an. Itu diakhiri dengan pelepasan sang ikon perjuangan almarhum Nelson Mandela dan para tahanan politik lainnya dari Pulau Robben. Bagi mayoritas orang Afrika Selatan, demokrasi tetap merupakan sebuah kekeliruan dan bangsa pelangi merupakan sebuah mitos. Untuk aktivis *#FeesMustFall*, perjuangan terus berlanjut, dan untuk *womxn* dan badan-badan lain yang terpinggirkan lainnya, demokrasi tetap menjadi suatu perjuangan hingga berabad-abad mendatang. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Hlengiwe Ndlovu <hlengiwepn@gmail.com>

Demokrasi di Athena

oleh **Gerassimos Kouzelis**, Universitas Athena, Yunani



Protes melawan langkah-langkah penghematan di depan Parlemen Yunani. Flickr/konterz. Hak Cipta tertentu.

Pembahasan topik demokrasi langsung di masa kini dapat terdengar sebagai hal yang sangat indah karena potensi penerapannya sangatlah terbatas. Ide bahwa demokrasi memiliki kontrol substansial di luar parlemen, seperti yang dikemukakan pada literatur masa kini, terdengar seperti klaim kaum radikal dengan unsur-unsur utopis. Bagaimana rakyat, “*dem*,” mampu melaksanakan kekuasaan dan pengawasan, bahkan dengan melalui perantara, dalam sebuah rezim di mana persyaratannya ditetapkan oleh aktor-aktor eksternal—organisasi-organisasi internasional—yang tidak terstruktur secara demokratis? Kondisi-kondisi di Yunani, yang didasarkan pada “*nota kesepahaman*,” bukanlah kondisi yang memungkinkan demokrasi untuk berfungsi. Parlemen—para wakil rakyat—tidak dapat bertindak secara otonom; keputusan mereka untuk sebagian besar sudah ditentukan sebelumnya.

Fakta bahwa kedaulatan nasional untuk sebagian besar sudah dikompromikan—sebagaimana halnya hak parlemen untuk membuat keputusan otonom—adalah sebuah produk (yang dibenarkan oleh banyak pihak) dari suatu krisis yang dianggap bersifat fiskal dan yang berimplikasi finansial yaitu, utang Yunani. Krisis yang telah memaksa Yunani untuk menerapkan penghematan serta mengompromikan kedaulatan nasional *memang* bersifat fiskal—ekonomisme yang berlaku

benar dalam aspek tersebut—tetapi aspek fiskal tersebut disebabkan oleh faktor sosiopolitik maupun ideologis. Potensi maupun keharusannya disebabkan oleh dilucutinya suatu negara sosial yang mengatur; prevalensi ideologi liberal yang bersifat menghancurkan karena absennya suatu pihak oposisi; restrukturisasi politik dan sosial yang tidak terkendali di antara beberapa sektor ekonomi; dan, terutama, konsolidasi modal dan pengorganisasian blok kekuasaan ekonomi. Dengan demikian suatu korelasi yang spesifik di antara berbagai kekuatan memungkinkan, memupuk, dan mengeksploitasi krisis tersebut.

Meskipun istilah “*dominasi neoliberal*” cenderung menyederhanakan permasalahan, istilah tersebut berguna untuk memperlihatkan bagaimana kemunduran demokrasi sejak awal diiringi oleh adanya suatu diskursus (“*neoliberalisme*”) yang menangkap, melegitimasi, serta memperluas dominasi jenis ini. Khususnya dari sudut pandang krisis Yunani, dekonstruksi mendalam terhadap demokrasi jelas terlihat sebagai *kebenaran* nyata yang keras mengenai neoliberalisme. Tumbuhnya seperangkat perkembangan yang terkait dengan prevalensi diskursus ini, kondisi artikulasinya maupun konsekuensinya, dinamika reproduksi kapitalis, maupun tren jangka pendek yang dipaksakan, keseluruhannya saling bersilang dalam memperkuat *otoriterisme sosial*.

Di bawah ini, saya telah mencatat beberapa poros yang telah banyak dibahas, yang menandai kurun waktu 2010-2015, sebelum terjadinya perubahan-perubahan politik:

- Kekuatan ekonomi yang meningkat secara radikal dan intervensinya dalam lingkup organisasi sosial di luar produksi yang ditandai dengan jenis dan tingkat skandal yang meresap di para “elite” serta menjalin kepentingan ekonomi dengan kepentingan politik.
- Komersialisasi sepenuhnya dari media dan praktik-praktik budaya (terutama media massa dan kompleks pers monopolistik yang diorganisasi berdasarkan kepartaian).
- Kemunduran dan rekonstruksi proses-proses perwakilan politik laksana pemasaran bisnis (partai-partai “melampaui” politik, ditampilkan sebagai produk komersial dan direpresentasikan oleh “bintang-bintang” televisi).
- Adanya kelaziman dari dasar pemikiran yang menekankan arus sirkulasi barang yang buta sebagai prinsip utamanya (“pasarlah yang akan menunjukkan jalannya”).
- Diberlakukannya dan diimplementasikannya proses “manajemen demokrasi” selama suatu masa ekspansi dari kekuasaan eksekutif dan sebagian kekuasaan yudikatif secara berkesinambungan yang merugikan kekuasaan legislatif (melalui keputusan-keputusan menteri tanpa persetujuan parlemen dan intervensi yudikatif yang bersifat politis dan mengarah pada kesewenang-wenangan).
- Destabilisasi kedaulatan negara, baik di dalam formasi sosial nasional maupun dalam keterikatan internasional (melalui justifikasi sehari-hari terhadap “persyaratan Troika” [terdiri atas Uni Eropa, Dana Moneter Internasional, dan Bank Sentral Eropa]).
- Pembentukan gugus-gugus yang tidak terjamah oleh kontrol demokrasi yang jauh dari publisitas dan tidak terlihat oleh parlemen itu sendiri, seperti halnya bidang kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga sebagian besar dari apa yang diputuskan di Brussels (sehingga benar-benar merupakan suatu “state of exception” [pengecualian dalam keadaan darurat yang melampaui kewenangan hukum]).

Saat terjadi perubahan politik pada tahun 2015, aspek-aspek poros-poros ini berubah pula. Dengan demikian, tujuan yang kuat dan eksplisit untuk memperkuat proses demokratis—suatu pilihan kebijakan sentral untuk Syriza—berhasil membalikkan tren poros terkini, sehingga untuk sebagian besar namun belum secara menyeluruh memulihkan kontrol parlemen, dalam artian bahwa sebagian besar keputusan masih didikte oleh pusat-pusat eksternal atau terhubung dengan komitmen pada (apa yang saat ini disebut) “institusi-institusi.”

Secara umum, kondisi politik baru ini membatasi maraknya dinamika ancaman langkah-langkah keamanan, pengawasan, dan penindasan otoriter oleh aparat keamanan yang secara terbuka bekerjasama dengan kelompok-kelompok Nazi, dan memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan langkah-langkah demokratis. Demokrasi dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari menjadi “normal” kembali.

Namun demikian, tetap ada dua wilayah di mana wacana neoliberal tetap menentukan persyaratan, sehingga mempersulit efektivitas pelaksanaan kebijakan pemulihan. Yang pertama adalah definisi yang sinis mengenai realitas sebagai seperangkat data fiskal, sebagai serangkaian perangkat rumit yang tidak dapat difahami atau dinilai oleh “rakyat,” dan dengan demikian, pada dasarnya tidak dapat dikontrol dan berada di luar tanggung jawab perencanaan demokratis atau

keputusan kolektif. Wilayah kedua adalah dekonstruksi ruang publik dan oleh karenanya, tidak memungkinkan pembentukan pendapat umum yang berdasarkan penilaian yang dapat diandalkan. Dominasi wacana media yang dikontrol oleh segelintir orang tetap merupakan sistem utama yang memonopoli “konstruksi realitas,” meskipun kancah politik telah berubah, sedangkan konsultasi dan pertukaran argumen menjadi tidak lazim.

Ketidakmampuan membalikkan momentum di kedua bidang ini mengingatkan kita bahwa dekonstruksi proses demokrasi tidaklah sedemikian terkait dengan bagaimana manajemen neoliberal menangani krisis, melainkan lebih terkait dengan aspek organisasi sosial yang diakui bersifat “sistemik” dan telah dicatat sebagai unsur-unsur krisis demokrasi dewasa ini.

Di sisi lain, gambaran telah berubah akibat berkembangnya wacana buruk yang membenarkan menyusutnya demokrasi atas dasar krisis ekonomi, yaitu retorika mengenai “diperlukannya” suatu pembatasan pada hak-hak. Hal ini tidak hanya mengacu pada hak-hak sosial, melainkan—sebagaimana nampak pada krisis pengungsi maupun manipulasi teroristik terhadap derasnya tuntutan berekspresi secara publik (melalui pemilu umum maupun referendum)—juga pada hak-hak politik. Selama lima tahun pertama krisis, pemerintah mulai secara radikal mengekang hak-hak sosial (pekerjaan, kesejahteraan sosial, kesehatan) dan juga menolak tuntutan politik (kontrol dan pendapat umum), menumbuhkan gagasan bahwa keseluruhan hak tersebut adalah “kemewahan” di tengah kurangnya sumber daya ekonomi. Pemerintahan baru, dengan mengutamakan prinsip solidaritas demokratis yang telah terlupakan, telah menunjukkan bahwa krisis hanyalah sebuah dalih.

Saat di mana lanskap belum cukup berubah dan krisis terus berlangsung, maka kedua hal tersebut, baik secara ideologis maupun substantif, akan dijumpai dalam semua hal yang terkait dengan organisasi kehidupan seluruh warga negara terutama menyangkut pandangan, perspektif, pola pikir, serta harapan mereka terhadap keluarga dan masa depan komunitas mereka maupun mereka sendiri. Hal ini sangat penting karena kurangnya perspektif adalah inti dari bergulirnya sikap totaliter dan antidemokratis.

Kekuatan neo-Nazi merupakan suatu ancaman. Ancaman tersebut memang tumbuh secara membahayakan, dan terlibat dalam manifestasi organisasi politik yang menawarkan fenomena baru bagi Yunani, dalam bentuk “pemerasan,” salah satu ciri khas para-ekonomi dan delinkuensi sehari-hari. Wacana mengenai kekuatan politik tertentu yang memupuk nasionalisme dan populisme, dan bahkan aspek-aspek wacana neoliberal yang berlaku mengenai keuntungan dan kekuasaan (“kepribadian yang kuat” maupun “pengambilan keputusan yang efektif,” mengabaikan peraturan-peraturan institusional dan kendala “birokratis”) telah memainkan suatu peran yang sangat negatif, yang terlalu sering bukan hanya hanyut ke arus retorika yang kosong, namun bahkan turut mentoleransi terbentuknya gerombolan “politik.” Dengan demikian, demokrasi, yang melemah dalam kondisi masa kini, dengan demikian memerlukan kewaspadaan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Gerassimos Kouzelis
<gkouzelis@pspa.uoa.gr>

› Media Sosial Dan Demokrasi

Pedang Bermata Dua?

oleh **Haryati Abdul Karim**, Universiti Malaysia Sabah (UMS), Malaysia



19

Telepon seluler dan media sosial telah menjadi bagian integral dari aktivisme politik. Flickr/Sakuto. Hak Cipta tertentu.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa salah satu efek yang paling mendalam dari media sosial di masyarakat ialah sejauh mana ia telah menjadi alat pemberdayaan bagi warga negara biasa untuk menentukan masa depan kehidupan mereka. Kehidupan sosial saat ini dicirikan oleh aktivisme Internet, di mana orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah dilibatkan melalui telepon cerdas (*smartphone*) di telapak tangan mereka. Ini tentu membuka jalan bagi warga biasa untuk berpartisipasi dan terlibat lebih bebas dalam diskusi publik tentang negara mereka dan dunia luar, dengan tetap berkedudukan relatif

anonim. Ini khususnya sangat berharga di negara-negara di mana kebebasan berekspresi bukanlah suatu budaya atau norma.

Dalam perkembangan baru ini Malaysia tidak terkecuali. Saat ini orang Malaysia menggunakan media sosial secara teratur untuk mengekspresikan diri mereka dalam berbagai isu—suatu hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk mengirim komentar, berbagi atau mengunggah sesuatu di akun media sosial dan situs web mereka tentang isu-isu yang sangat mengusik perasaan mereka, dan memulai



diskusi daring di antara teman-temannya. Media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *YouTube* semuanya sangat populer di kalangan orang Malaysia. Tetapi *Facebook* menduduki puncaknya: sekitar 81% orang Malaysia menggunakan *Facebook*; hampir 90% di antaranya mengaksesnya melalui telepon cerdas.

Sejauh mana media sosial telah benar-benar “membebaskan” orang Malaysia dapat dilihat dari bagaimana mereka secara terbuka mengekspresikan pandangan mereka secara vokal tentang pemerintah dan isu-isu yang dianggap sensitif, seperti agama dan etnisitas, meskipun ada undang-undang yang melarang diskusi seperti itu. Hal ini membentuk suasana yang sehat dan bersemangat bagi orang-orang untuk terlibat dalam isu-isu nasional yang mempengaruhi mereka. Selain politik, media sosial juga memungkinkan orang Malaysia untuk mengekspresikan dan mengukir suatu identitas hibrida global-lokal.

Di negara-negara di mana negara memiliki kontrol kuat terhadap media, baik melalui kepemilikan langsung media atau melalui perundang-undangan, ketersediaan sebuah saluran komunikasi untuk pandangan alternatif menjadi terbatas. Oleh karena itu, publik dipaksa untuk masuk ke bawah tanah melalui media baru. Media sosial ternyata menjadi jauh lebih efektif dibandingkan dengan portal berita alternatif dalam membentuk opini publik. [Gerakan] *Arab Spring* menjadi contoh di mana saluran komunikasi sangat terbatas dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan media arus utama. Media sosial menjadi satu-satunya sumber informasi bagi orang-orang, dan ruang di mana mereka dapat menyatakan pandangan mereka.

Di Malaysia, media sosial telah berkontribusi terhadap apa yang disebut sebagai “tsunami politik” selama proses pemilihan umum 2008, yang menyaksikan hegemoni pemerintah Koalisi Nasional (Barisan Nasional atau BN) perlahan-lahan runtuh. Lawan politik BN, yang kemudian dikenal sebagai Aliansi Harapan (Pakatan Harapan atau PH) terus bergerak di bawah tanah karena dieksklusikan terus-menerus dari media arus utama. Media sosial menjadi alat bagi pasukan dunia maya (*cybertroopers*) dan pendukung kuat PH untuk menyebarkan pandangan mereka ke rakyat. Dengan menggunakan laman *Facebook*, isu-isu pelik seperti Pajak Barang dan Jasa (GST), biaya hidup yang tinggi, dan dugaan praktik korupsi oleh pemerintah BN disorot secara sistematis. Ini menyebabkan diskusi di antara warga dan menciptakan suatu ruang publik. Para Blogger yang merupakan pendukung kuat dari Aliansi menggunakan blog mereka untuk membentuk opini publik yang menguntungkan mereka. Dalam pemilihan umum keempat belas yang telah terselenggara baru-baru ini, *WhatsApp* mulai digunakan sebagai suatu alat kampanye di samping *Twitter* dan *Facebook*. Tidak seperti *Facebook*, *WhatsApp* menjangkau individu secara pribadi. Suatu ranah publik dibuat di antara individu dalam grup obrolan *WhatsApp* untuk membahas pesan kampanye PH. Barangkali strategi kampanye yang sangat terorganisasi dengan baik di mana PH berfokus pada isu-isu spesifik dan meng-

komunikasikannya berulang kali inilah yang menyaksikan digulingkannya pemerintah BN yang berusia 61 tahun. BN lambat dalam beralih ke media sosial, karena mengandalkan media arus utama. Hasil dari strategi komunikasi PH tersebut adalah bahwa dalam pemilihan 9 Mei 2018 PH memenangkan 113 dari 222 kursi parlemen, sementara BN hanya berhasil mengamankan 79 kursi.

Ketika menyangkut masalah media sosial, kebebasan pers, dan demokrasi, media sosial adalah sebuah pedang bermata dua. Sementara ia membuka lebih banyak pintu untuk kebebasan berekspresi dan pemberdayaan diri, media sosial juga membuka jalan bagi terciptanya berita palsu dan menjadi viral. Berita palsu telah menjadi suatu isu utama di kalangan orang Malaysia. Dalam pemilihan umum baru-baru ini, pemilih lebih dibanjiri dengan berita palsu di media sosial ketimbang dengan laporan berita otentik. Berita palsu yang mendistorsi informasi dengan sempurna pada akhirnya menghalangi hak warga untuk mengetahui kebenaran. Ketergantungan yang berlebihan pada media sosial sebagai satu-satunya sumber informasi semakin berkontribusi terhadap berkembangnya berita palsu karena warga jarang memeriksa kembali fakta. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan menegahkan Undang-Undang Anti Berita Palsu pada tahun 2018 gagal untuk mendefinisikan dengan jelas apa yang merupakan “palsu” ketika menyangkut berita. Bagaimanapun juga, undang-undang itu tampak berumur pendek, karena pemerintah baru telah mengumumkan niatnya untuk mencabutnya.

Ancaman lain yang ditimbulkan media sosial saat ini adalah ketika fanatisme politik pendukung kelas dominan mengguguli pandangan-pandangan lain di dunia maya. Mereka yang memiliki posisi alternatif mengalami perundungan melalui dunia maya (*cyberbullying*) sedemikian seringnya sehingga mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi demokratis; sementara yang lain mengalami trauma karena respon bermusuhan dari mereka yang fanatik politik. Bahkan jika beberapa poin yang diangkat adalah benar, para fanatik politik berkerumun bersama dan mengutuk para pengguna dengan hal-hal yang tidak senonoh, menyangkal hak dan kebebasan mereka untuk menyatakan pendapat. Kurangnya kesantunan dan rasionalitas di tataran orang-orang awam ini meredam semangat masyarakat untuk terlibat dalam diskusi yang sehat tentang isu-isu publik.

Agar media sosial menjadi suatu alat yang efektif untuk demokrasi sejati, kesopanan dan literasi media harus terlebih dahulu menjadi sebuah norma dan budaya di antara warga negara. Warga negara harus belajar untuk memahami makna komunikasi yang rasional. Hanya dengan cara demikian reformasi bangsa yang sejati melalui pertukaran ide dapat dilangsungkan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Haryati Abdul Karim <haryati@ums.edu.my>

› Kemunduran Demokrasi di Argentina

oleh **Esteban Torres Castaños**, Universitas Nasional Cordoba dan Dewan Penelitian Ilmiah dan Teknik Nasional (CONICET), Argentina



Krisis ekonomi yang baru telah membawa tantangan baru bagi demokrasi di Argentina. Flickr/Alex Proimos. Hak Cipta tertentu.

Republik Argentina sedang mengalami kemunduran demokrasi secara mencolok. Ruang lingkup dan kompleksitas dari kemunduran ini sukar dipahami jika kita menggunakan teori-teori demokrasi yang, dengan runtuhnya diktatur militer, telah menjadi kerangka analitis dominan bagi kekuatan kiri dan progresif di dalam negeri dan di Amerika Latin. Demokratisasi kontemporer, yang dipahami sebagai suatu proses sosial berupa ekspansi kekuatan apropriasi publik, terdiri atas tiga vektor (arah) kritis: sebuah vektor teknis-politis, vektor tekno-ekonomis, dan vektor teknis-komunikasional. Masing-masing di antaranya memiliki beberapa dimensi. Di sini saya hanya akan *mendeskripsikan* peristiwa-peristiwa kunci pada tahun 2018 yang telah mencetuskan kemunduran struktural demokrasi di Argentina. Peristiwa-peristiwa tersebut terkait dengan dimensi represi politik dari vektor politik tersebut di atas, dan dengan salah satu dimensi terpenting dari vektor tekno-ekonomis pada suatu negara pinggiran: tingkat otonomi negara untuk menentukan kebijakan ekonomi makronya.

Berkenaan dengan dimensi politik represif, dua peristiwa utama yang saling memperkuat adalah 1) keputusan kekuasaan eksekutif nasional untuk menetapkan, melalui dekret, suatu transformasi doktrin dan fungsi Angkatan Bersenjata dan 2) dukungan pemerintah terhadap didirikannya pangkalan militer AS di beberapa wilayah nasional.

Sehubungan dengan peristiwa pertama, tonggak transformasi yang diajukan kekuasaan eksekutif melalui Dekret N° 683/2018 ialah diberikannya kewenangan bagi Angkatan Bersenjata untuk dapat melaksanakan tugas-tugas keamanan dalam negeri. Dengan cara ini, pembatas antara keamanan dalam negeri dan pertahanan nasional dalam praktik dihapuskan, sehingga memperkuat niat pemerintah untuk melakukan kriminalisasi terhadap protes-protes sosial yang telah meluas di seluruh negara semenjak kemenangan *Cambemos* (koalisi yang berkuasa) pada bulan Desember 2015. Melalui tindakan ini, pemerintah Mauricio Macri berupaya untuk menugaskan Angkatan Bersenjata untuk terlibat

pada program “anti perdagangan narkoba dan anti teroris” agar tugasnya sepenuhnya sesuai dengan agenda politik luar negeri AS. Dengan diterapkannya dekret baru ini, maka, Dekrit N° 1691/2006 dicabut, dan kerangka hukum yang terdiri atas Undang-undang Pertahanan Nasional (1998), Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (1992) dan Undang-undang Intelijen Nasional (2001) hendak diceraikan-beraikan. Peraturan-peraturan tersebut, yang merupakan hasil ekspansi demokratis selama tiga dasawarsa, ditegakkan melalui kesepakatan antarpantai dengan ruang lingkup yang belum pernah terjadi dalam sejarah nasional.

Sehubungan dengan peristiwa kedua, pemerintah sedang mendorong didirikannya pangkalan militer AS di bumi Argentina, yang arahan teknisnya berada di tangan Komando Selatan AS. Selama ini telah diidentifikasi tiga lokasi: perbatasan dengan tiga negara (Argentina, Brasil dan Paraguay), Tierra del Fuego (Ushuaia) dan propinsi Neuquén. Kedua peristiwa diperkuat dengan peristiwa ketiga: kedatangan pasukan AS di wilayah nasional pada tahun ini untuk melaksanakan latihan gabungan dengan pasukan setempat. Sebagaimana diumumkan oleh para pejabat dari kedua negara, latihan gabungan dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi [isyarat] “perlawanan terhadap perdagangan senjata penghancur masa.” Kedatangan pasukan asing memerlukan otorisasi dari Kongres Nasional, tetapi partai yang berkuasa belum mengajukan permohonan otorisasi tersebut.

Sejalan dengan peristiwa-peristiwa ini, perlu diberikan perhatian pada rangkaian peristiwa kedua yang telah menyebabkan, dalam waktu singkat, hilangnya sama sekali dalam waktu singkat otonomi negara nasional untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro. Saya merujuk pada kebijakan pinjaman yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Macri. Dua indikator kunci di sini adalah evolusi pinjaman luar negeri terhadap PNB (produk nasional bruto) Argentina dan ciri-ciri komitmen yang dibuat dengan para kreditor. Dalam kaitan dengan indikator pertama, kita dapat mengamati bahwa Cambiemos telah memicu pertumbuhan pinjaman luar negeri tercepat dalam sejarah nasional dalam kerangka nilai finansial suatu rezim yang baru. Di bawah pemerintah Kirchner (2003-2015), kebijakan ekonomi negara bertujuan mengurangi pinjaman luar negeri melalui penerapan pendekatan garis keras dalam perundingan dengan para kreditor. Keberhasilan relatif dari perundingan seperti itu memungkinkan dilancarkannya perekonomian yang produktif. Untuk sebagian besar hal tersebut memungkinkan pula ditinggalkannya nilai finansial tahun 1976-2001. Sejak Desember 2015 dan sesudahnya, pemerintah Macri telah kembali kepada dorongan pinjaman luar negeri sebagai kunci untuk meluncurkan kembali sistem nilai finansial. Rasio pinjaman luar negeri publik dengan PNB telah meningkat sejak tahun 2011, ketika bernilai 14.2%, tingkat terendah setelah pemulihan demokrasi pada tahun 1983. Sejak masa itu, pinjaman telah mulai meningkat, dan membubung pada masa kebijakan akselerasi pinjaman dalam pemerintahan Macri hingga mencapai

65.5% dari PNB pada bulan Juni 2018. Dengan demikian, dalam waktu sangat singkat koefisien pinjaman di Argentina telah meningkat dari rendah ke tingkat yang sukar dikendalikan. Jumlah seluruh pinjaman dalam mata uang lokal dan asing telah mencapai hampir setara USD 133 milyar, yang telah membuat negara tersebut menjadi suatu negara berdaulat dengan pinjaman terbesar di antara negara-negara sedang berkembang di dunia dalam periode 2016-18.

Berkaitan dengan para kreditor, yang menjadi peristiwa utama dalam siklus pinjaman yang baru ini ialah keputusan untuk menerapkan kembali hubungan ketergantungan dengan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*, IMF) setelah selama empat belas tahun menyelesaikan pinjaman dengan organisasi tersebut. Kembalinya hubungan dengan IMF ini diwujudkan melalui permohonan pinjaman dengan komitmen khusus (*standby loan*). Hal yang baru pada pinjaman besar ini (USD 50 milyar) bila dibandingkan dengan pinjaman dengan komitmen khusus yang sebelumnya ditandatangani Argentina dengan IMF ialah bahwa kali ini yang akan diawasi bukan hanya pajak dan sasaran moneter melainkan juga inflasi. Dengan cara ini, pemerintahan kepresidenan Macri sebenarnya telah mendelegasikan manajemen perekonomian nasional kepada IMF. Dengan bertindak demikian, pemerintahan kepresidenan Macri telah menjadi pelaksana program penyesuaian moneter neoliberal yang dikehendaki oleh IMF.

Kebijakan-kebijakan militerisasi dalam negeri dan pinjaman yang berjumlah besar (*hyper-indebtedness*) dalam kurun waktu singkat (*express*) telah mengikis kedaulatan nasional dan menyebabkan perlawanan masif dan demonstrasi di seluruh wilayah negara. Kekuatan-kekuatan oposisi melibatkan suatu spektrum luas aktor sosial yang telah dirugikan atau tersisih dari masyarakat akibat transformasi sosial yang regresif tersebut. Meskipun hubungan kekuasaan antara para pendukung demokratisasi dengan para pendukung rezim baru yang menerapkan globalisasi apropriasi makro swasta sangat tidakimbang dan menguntungkan pihak kedua, namun untuk sementara waktu masa depan politik nasional tidak dapat diramalkan. Perlu diingat bahwa deskripsi semata-mata terhadap proses erosi demokrasi pada waktu ini belumlah memadai. [Namun] yang penting dalam hal ini adalah *menjelaskan* fenomena dari sudut pandang multidimensi mengenai demokrasi yang digolongkan dalam suatu teori sosial baru mengenai apropriasi dan perubahan sosiohistoris. Suatu perangkat penjelasan seperti itu akan memungkinkan kita untuk mendefinisikan ulang suatu program kiri baru mengenai perubahan sosial yang membahas permainan sosial mengenai apropriasi ke dalam mana kami dilarutkan. Kita harus dapat mencapainya sebelum terlambat bagi demokrasi. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Esteban Torres Castaños <esteban.tc@conicet.gov.ar>

› Penghapusan Perempuan dari Revolusi Mesir

oleh **Amy Austin Holmes**, Universitas Amerika di Kairo, Mesir, dan ilmuwan tamu di Universitas Harvard, AS.



Flickr/lokha. Some rights reserved.

Terpana oleh pemandangan protes massa di *Tahrir Square*, Musim Semi Arab (*Arab Spring*) telah menggiring pembaruan minat pada studi tentang revolusi.

Walaupun literaturnya membanjir, namun perempuan seringkali seakan tidak hadir. Buku *A Revolution Undone* (Sebuah Revolusi yang Tidak Selesai) karya H.A Hellyer dimulai dengan sebuah glosarium mengenai 27 orang tokoh penting dalam revolusi Mesir. Hanya seorang perempuan yang disebut dalam glosarium tersebut, di samping 26 laki-laki. Philip Marfleet dalam *Egypt: Contested Revolution* (Mesir: Revolusi yang Diperebutkan) menampilkan seorang perempuan di sampul depan, tapi tidak banyak perempuan yang dicakup dalam analisisnya. Ilmuwan lain memasukkan perempuan, tetapi terutama sebagai korban dari pelecehan atau kekerasan, bukan sebagai protagonis yang berpengaruh di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Untuk dapat menemukan perempuan di tengah samudra literatur mengenai Musim Semi Arab, kita harus mencarinya di sub-bidang studi gender, karena selama ini mereka sering tidak muncul dalam referensi pustaka yang mengklaim telah memberikan pandangan umum mengenai pemberontakan ini. Sebagai penduduk Kairo yang telah tinggal di Mesir sejak tahun 2008, saya melihat keterlibatan perempuan di setiap protes, di setiap pendudukan, bahkan di semua peristiwa yang saya saksikan. Tetapi perempuan sedang dihapuskan dari sejarah revolusi Mesir. Generasi yang akan datang mungkin akan percaya bahwa perempuan adalah

aktor yang tidak penting dalam peristiwa bernama Musim Semi Arab. Tetapi hal tersebut samasekali tidak benar.

Perempuan tidak hanya mengadvokasi hak-haknya perempuan. Perempuan seringkali berada di garda depan aktivisme revolusi Mesir, sejak dari jaman diktator Mubarak yang telah melalui tahun-tahun bergejolak, hingga saat ini ketika rezim telah mengubah diri di bawah Presiden Sisi. Kembali pada tahun 2005, dalam upaya untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memperkenalkan elemen akuntabilitas di dalam sistem otoriter Mesir, tiga perempuan mendirikan sebuah kelompok yang memantau pemilihan presiden dan parlemen. Mereka menamakan dirinya *Shayfeencom*, yang apabila diterjemahkan berarti “kami mengawasi kalian.” Salah seorang pendirinya, Bouthaina Kamel, kemudian menjadi perempuan pertama di dalam sejarah modern Mesir yang mencalonkan diri sebagai presiden. Sebelum revolusi, *The Nadeem Center* adalah satu-satunya pusat di Mesir yang didedikasikan untuk melayani korban penyiksaan, dan pusat ini didirikan oleh seorang perempuan bernama Dr. Aida Seif El-Dawla. Dan siapakah yang membuat video yang kemudian menjadi viral satu minggu sebelum 25 Januari 2011, yang kemudian menggerakkan jutaan orang untuk turun ke jalan dan melakukan protes? Dia adalah seorang perempuan juga: Asmaa Mahfouz dari Gerakan Pemuda 6 April.



Bouthaina Kamel (dalam foto) di atas Lapangan Tahrir pada tanggal 28 Januari 2011. Ia menjadi perempuan pertama yang mencalonkan diri menjadi presiden di Mesir. Hak Cipta: Amy Austin Holmes.

Setelah Mubarak diturunkan, selama satu setengah tahun Mesir dikuasai oleh suatu junta militer yang dikenal sebagai *Supreme Council of Armed Forces* (Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata). Sebagaimana saya sampaikan di tempat lain, salah satu tuntutan paling radikal dari revolusi ini adalah menghentikan kekuasaan militer. Upaya ini tidak hanya mencakup reformasi atau perubahan bertahap atau semata menurunkan seorang diktator dari jabatannya belaka, melainkan suatu seruan untuk secara mendasar mengubah struktur negara: untuk memperkenalkan kepemimpinan sipil di suatu negara yang dipimpin oleh militer sejak berdirinya di tahun tahun 1952. Militer Mesir didasarkan pada wajib militer bagi seluruh warga laki-laki. Dengan demikian perempuan terekslusi dari institusi paling berkuasa di negara ini. Mungkin bukanlah suatu kebetulan bahwa kebanyakan aktivis anti-militer terkemuka adalah perempuan. Kelompok *No Military Trials* (Jangan Ada Pengadilan Militer) menuntut diakhirinya praktek diadilinya orang sipil di pengadilan militer. Beberapa tokoh terkemuka dalam kelompok ini mencakup Shahira Abou Leil dan Mona Seif. Sebuah kelompok lain mengungkapkan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer melalui penayangan video di ruang publik. Kelompok ini bernama *Askar Kazeboon*, yang berarti Tentara adalah Pembohong, dan didirikan secara bersama oleh Sally Toma, seorang perempuan Kristen Koptik.

Seringkali perempuan menghancurkan tabu sosial dengan cara berbicara tentang kekerasan tak terkatakan yang dilakukan terhadap baik perempuan maupun laki-laki. Adalah Samira Ibrahim yang mengungkapkan praktik militer berupa penyelenggaraan tes keperawanan bagi tahanan perempuan. Heba Morayef, yang pada waktu itu menjadi direktur nasional Mesir dari *Human Rights Watch* (Pengawasan Hak Asasi Manusia) dan satu-satunya perempuan yang ditampilkan dalam glosarium Hellyer, memimpin kampanye agar praktik tes keperawanan diakhiri. Perempuan juga memainkan peran utama dalam mengadvokasi hak-hak kaum pria. Dalia Abdel Hamid, peneliti pada *Egyptian Initiative for Personal Rights* (Inisiatif Mesir untuk Hak-hak Pribadi, EIPR), adalah satu dari sedikit orang yang berasal dari Mesir yang melaporkan penindasan terhadap komunitas LGBTQ pada musim gugur tahun 2017, termasuk dengan paksa melakukan pemeriksaan anal terhadap laki-laki yang dicurigai sebagai homoseksual.

Perempuan selama ini telah berada di garis terdepan dalam ranah media oposisi di Mesir. Lina Attallah adalah pendiri dan pemimpin redaksi *Mada Masr*, suatu situs berita Web yang dideskripsikan oleh *The Guardian* pada tahun 2015 sebagai penjaga keberlangsungan kebebasan pers di Mesir. Karena keberanian mereka bersuara, *Mada Masr* menjadi salah satu situs pertama yang diblokir pada tahun 2017 dan satu tahun kemudian masih disensor.

Generasi baru aktifis dari Nubia melahirkan beberapa perempuan yang menonjol. Fatma Emam bekerja pada komite penyusunan rancangan konstitusi dan telah berhasil menjadikan Nubia bisa untuk pertama kalinya disebutkan di dalam konstitusi Mesir. Sebagai seorang blogger dan peneliti, Fatma terus menyebarkan kesadaran terhadap isu-isu sensitif, termasuk penyitaan tanah tradisional warga Nubia oleh militer di sepanjang perbatasan dengan Sudan. Pada musim semi 2017, Seham Osman, seorang perempuan muda dari Aswan, adalah perempuan pertama yang mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden *General Nubian Union* (Perserikatan Umum Nubia), sebelum pada akhirnya dia harus mengundurkan diri karena mendapatkan tekanan luar biasa.

Terakhir adalah salah seorang pengacara hak asasi manusia paling terkenal di Mesir, Mahienour El Massry. Dia dikenal karena membela hak-hak seluruh warga Mesir, termasuk 21 perempuan pendukung Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*), meskipun dia sendiri tadinya adalah kritikus terbuka terhadap organisasi tersebut. Mahienour juga membela pengungsi Suriah, dan bertahan tidur di samping mereka di kantor polisi untuk memastikan bahwa mereka tidak disiksa atau diperlakukan dengan tidak senonoh. Pada tahun 2014, dia menerima penghargaan hak asasi manusia *Ludovic Trarieux*; pada tahun 1985 Nelson Mandela mendapatkan penghargaan yang sama.

Tulisan-tulisan pendek seperti ini mungkin merepresentasikan topik ini secara keseluruhan. Ini karena sebenarnya terlalu banyak perempuan kalau semua harus disebut. *Women and the Egyptian Revolution* (Perempuan dan Revolusi Mesir) karya Nermin Allam adalah salah satu rujukan untuk analisis yang lebih rinci. Tetapi saya berharap telah menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mengadvokasi hak-hak perempuan. Mereka adalah bagian yang integral dari perjuangan yang lebih besar. Penghapusan perempuan dari sejarah revolusi atau mengecilkan peran mereka ke dalam bidang studi gender berarti mengekalkan struktur-struktur patriarki yang mereka lawan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Amy Austin Holmes <holmes@aucegypt.edu>

› Tata Kelola Global:

Sebuah Konsep untuk Tataan Dunia yang Demokratis?

oleh **Peter Wahl**, anggota dewan eksekutif, Asosiasi Ekonomi, Ekologi & Pembangunan Dunia (WEED), Berlin, serta salah seorang pendiri *Attac Germany*, Jerman



Illustrasi oleh Arbu.

Pada tahun 1990-an, sebuah konsep memulai kariernya: tata kelola global. Konsep ini menjanjikan suatu tipe sistem internasional yang baru dan lebih demokratis serta suatu [sistem] globalisasi yang berwajah manusiawi. Lintasan perkembangan dari konsep ini memberikan hikmah yang menarik.

Pertama-tama: *tata kelola* bukanlah *pemerintah*. Kata aslinya dalam bahasa Prancis, *gouverner*, berarti *menuntun, mengarahkan, mengatur*. Pada pokoknya, poin penting berikut terkait dengan konsep ini:

- Proses ekonomi dari globalisasi lolos dari pengaturan politik (*political regulation*). Hal ini disebabkan oleh kemenangan neoliberalisme, yang bertumpu pada pasar yang mengatur dirinya sendiri, liberalisasi, privatisasi, serta deregulasi.
- Persoalan global baru telah muncul, seperti pemanasan global, yang solusinya di luar kemampuan masing-masing negara-bangsa.
- Persoalan internasional konvensional, seperti keamanan bersama, perlombaan persenjataan, non-proliferasi nuklir dll. menuntut pendekatan baru.
- Bentuk baru dari pengaturan politik dibutuhkan melalui campuran dari perjanjian formal dan mengikat, penentuan standar yang tidak mengikat, perjanjian sukarela, serta jaringan multilateral, yang secara bersama-sama dikombinasikan untuk membentuk sebuah *rezim*.
- Kesemua ini membutuhkan bentuk interaksi baru di antara para aktor dalam sistem internasional, yaitu, pemerintah, lembaga multilateral, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Inklusi, kerja sama, dialog, pembentukan jejaring, negosiasi, serta pengimbangan kepentingan merupakan perangkat utama.

Seiring berakhirnya Perang Dingin, konsep ini nampaknya mempunyai kesempatan yang realistis untuk diterapkan. *Tata kelola global* bertemu dengan semangat zaman dan menjadi populer. Konferensi PBB di Rio pada 1992, kon-

ferensi terbesar dalam sejarah, yang melibatkan lebih dari 100 kepala negara dan keterlibatan besar-besaran dari masyarakat sipil, boleh dianggap sebagai simbol darinya. Rio merupakan terobosan dari narasi “satu dunia,” yang dapat secara bersama terhubung dengan kosmopolitanisme liberal dan internasionalisme sayap kiri.

Namun tak lama kemudian muncul kekecewaan. Dalam konferensi pertama untuk mengevaluasi situasi, yang digelar lima tahun kemudian, menjadi gamblang bahwa globalisasi kapitalisme neoliberal tidak menepati janji-janjinya. Banjir kemakmuran, yang mengangkat derajat baik kelompok kecil maupun besar, tidak terjadi. Sebaliknya, terlalu banyak pihak dirugikan. Menariknya, banyak dari antara mereka hidup dalam masyarakat dengan perekonomian yang maju — dengan dampak yang baru hari ini kita lihat dalam segenap dimensinya, ketika banyak pihak yang dirugikan berpaling ke ekstrem kanan. Sebagaimana diperlihatkan dalam unjuk rasa menghebohkan di pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) di Seattle pada tahun 1999, kian banyak orang menyadari sisi buruk dari globalisasi, di antaranya ancaman terhadap keadilan sosial, lingkungan, serta demokrasi.

Dengan kata lain, dinamika dari ekonomi pasar kapitalis terus lestari. Pada tahun 2008, keyakinan bahwa pasar finansial akan efisien dan dapat mengatur dirinya sendiri secara definitif terbukti tak lebih dari mitos. Kapitalisme finansial kehilangan kendalinya, berujung pada krisis finansial terbesar sejak Depresi Besar. *Tata kelola global* bahkan tidak mampu mempengaruhi proses ini, apa lagi membalikkan arah gelombang pasangunya.

Namun bukan hanya di ranah ekonomi saja pendekatan *tata kelola global* tidak dapat menghasilkan apa-apa. Semangat *tata kelola global* pun tidak berlaku dalam hubungan internasional. Jadi, perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Timur dimulai pada tahun 1997 untuk menghadapi Rusia yang dipimpin Yeltsin. Ketika pada tahun 1999 NATO memulai perangnya di bekas Yugoslavia tanpa mandat PBB, serangkaian aksi politik kekuatan unilateral dan pelanggaran hukum internasional dilakukan. Ini berlanjut dengan “perang terhadap teror” selepas 9/11, serangan terhadap Irak dengan “koalisi di antara mereka yang menghendaknya” yang bersifat global, kemerdekaan unilateral dari Kosovo di bawah perlindungan NATO pada tahun 2008, serta perubahan rezim di Libya pada tahun 2011. Kesemuanya ini merupakan kebalikan dari pendekatan *tata kelola global*.

Berpijak dari latar belakang ini, bukan hal yang mengherankan bila lantas reaksi berlawanan bermunculan. Pada khususnya Rusia, dan secara berangsur-angsur RRT, merasa terdorong untuk keluar dari tatanan dunia pasca-Perang Dingin. Ini bukan hanya suatu gejala yang bersifat sementara. Gejala ini berlandaskan suatu transformasi tektonis mendalam dalam sistem internasional. Kita sekarang menyaksikan transisi menuju suatu tatanan dunia yang polisentris. Ciri mendasarnya yakni kebangkitan RRT

menjadi suatu negara adikuasa, kembalinya kapitalisme negara Rusia sebagai suatu kekuatan yang besar, pergeseran dari pusat gravitasi ekonomi dunia menuju Asia, dan erosi (relatif) dari dominasi AS dan Barat.

Para pendatang baru mengorganisir pihaknya dalam berbagai komposisi dan bersandar pada pusparagam aliansi berbasis isu di kalangan mereka sendiri, seperti Organisasi Kerjasama Shanghai (*Shanghai Cooperation Organization*) atau Brasil, Rusia, India, RRT (BRICS). Mereka mendirikan lembaga finansial multilateral seperti Bank Investasi Infrastruktur Asia (*Asian Infrastructure Investment Bank, atau AIIB*) sebagai alternatif dari Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*) dan membayangkan proyek ekonomi serta infrastruktur besar seperti Jalur Sutra Baru (*New Silk Road*). Hal ini diiringi dengan kemunculan struktur paralel dalam ekonomi dunia, seperti sistem alternatif dari SWIFT — sistem neural elektronik dari keuangan global — oleh RRT dan Rusia, serta sebuah sistem kartu kredit yang mendobrak monopoli dari *Mastercard*, *Visa*, dan *American Express*. Perjanjian perdagangan kian menggeser dolar AS melalui unit tukar yang disepakati secara bilateral, meremehkan salah satu tiang penyangga dari hegemoni AS. Dengan kata lain, terdapat reaksi alternatif terhadap globalisasi yang didasarkan pada gagasan mengenai kekuatan penyeimbang. Satu unsur di antaranya adalah semacam “de-globalisasi selektif.”

Tentu saja, tatanan dunia yang akan datang membawa risiko-risiko baru. Sebagaimana biasanya dijumpai dalam keadaan serupa, kompetisi di antara para pendatang baru dengan para pemain lama yang sudah mapan bermuara pada konflik dan ketidakstabilan. Dengan kemunculan pemerintahan Trump dan unilateralisme ekstremnya yang bertujuan “menjadikan Amerika unggul lagi,” risiko-risikonya memperoleh suatu kualitas baru.

Apabila kita tanyakan mengapa *tata kelola global* tidak bekerja, alasan-alasan utamanya adalah:

- ketidakpekaan mengenai hubungan kekuasaan dalam ekonomi politik dari globalisasi kapitalisme, atau sebagaimana dituturkan oleh Marx, *kekerasan senyap dari hubungan-hubungan ekonomi*;
- ketidakpekaan mengenai hubungan kekuasaan dalam sistem internasional; dan
- pengabaian dari ketidakmampuan negara-bangsa sebagai kerangka yang masih dominan untuk mengorganisasi masyarakat kapitalis.

Tata kelola global sedari awal terlalu ideal sebagai sebuah konsep. Kendati demikian, gagasan dari kerja sama internasional masih relevan dan seyogjanya tidak ditinggalkan oleh teori sosial kritis maupun praxis. Namun, peninjauan lebih cermat terhadap *siapa* yang bermitra *dengan* siapa dan juga *melawan* siapa serta penilaian yang lebih realistik terhadap keseimbangan kekuasaan akan dibutuhkan bila alternatif-alternatif yang masuk akal ingin dikembangkan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Peter Wahl
<peter.wahl@weed-online.org>

› Cendekiawan Unggulan

oleh **Nicolás Lynch**, Universitas Nasional San Marcos, Peru



| Aníbal Quijano in 2015. Creative Commons.

Aníbal Quijano (1928-2018) merupakan cendekiawan kritis unggulan di Peru dan Amerika Latin, seseorang yang bertindak sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Ketika ia tampil sebagai seorang sosiolog

di tahun 1960-an dan 1970-an, kritik terhadap status quo sedang memuncak. Quijano tidak pernah menyerah pada panggilan Marxisme-Leninisme yang mencapai bentuk paling biadab pada *Shining Path* [partai komunis Peru]. Di tahun 1990-an, di puncak

pengaruh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, kutukannya terhadap terpinggirkannya (*subalter-nization*) kategori-kategori sosial tertentu pada akhirnya menggerakannya untuk memberikan suatu sumbangan yang sangat penting dalam menjelaskan proses-proses yang berlangsung di Peru masa kini dan di Amerika Latin pada umumnya.

Quijano terutama bekerja sebagai seorang profesor dan peneliti di Universitas San Marcos di Lima, Peru, dan di sejumlah universitas lain di Amerika Latin dan AS. Sebagai akibat dari keterlibatannya yang singkat dalam politik langsung dengan jurnal *Sociedad y Política* di tahun 1970-an, ia dideportasi ke Meksiko oleh pemerintah militer Juan Velasco Alvarado, sehingga dengan demikian tampil sebagai seorang cendekiawan publik yang memiliki komitmen mendalam dengan perjuangan rakyat Peru dan Amerika Latin. Ia kemudian memang mengabdikan hidupnya untuk mengetahui mengapa proses-proses sosial dan politik yang membentuk masyarakat kita berlangsung seperti yang sekarang terjadi, dan untuk menjajaki mekanisme ke arah transformasinya.

Aspek pertama dari sumbangannya bersifat epistemologi. Quijano memberikan suatu penjelasan “dari Selatan” bagi proses-proses sosial di wilayahnya. Dalam melakukannya, ia menjauhkan diri dari dikotomi tradisi modernitas yang berasal dari sosiologi fungsionalis dan memperjuangkan heterogenitas historis-struktural sebagai narasi utama. Ia melihat adanya seperangkat bentuk-bentuk produksi yang hidup berdampingan dalam masyarakat-masyarakat Ame-

rika Latin, yang diorganisasikan di sekitar modal sebagai suatu fenomena yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga transnasional dan, pada akhirnya, global.

Quijano dengan demikian menanggapi isu kondisi ketergantungan (*dependency*) Amerika Latin. Meskipun ia menolak untuk merujuk pada apa yang dinamakan “teori ketergantungan” (*dependency theory*), namun jelas bahwa ia bagian dari narasi yang diluncurkan oleh Raúl Prebisch dan CEPAL (dalam bahasa Inggris: ECLAC) di tahun 1950-an dan yang kemudian dilanjutkan oleh Cardoso dan Faletto dan akhirnya oleh Ruy Mauro Marini di tahun 1960-an dan 1970-an. Keterlibatannya dengan perdebatan yang muncul di kala itu, dengan sumbangan yang berbeda di bidang perencanaan kota dan tenaga kerja, tiga dasawarsa kemudian secara jitu berujung pada karakterisasi global dari Amerika Latin melalui konsep kolonialitas kekuasaan (*coloniality of power*).

Tetapi Quijano juga memberikan suatu sumbangan yang sangat bermakna pada masalah identitas Amerika Latin: dari sumbangannya pada proses *cholificación* di awal tahun 1970-an di Peru, sampai ke pemulihannya terhadap tulisan-tulisan José Carlos Mariátegui—pemikir besar Marxis kritis di Amerika Latin tahun 1930-an—dan simpatinya yang khusus bagi perjuangan masyarakat adat dan konsep *buen vivir* yang kini dikembangkan oleh berbagai gerakan etnik.

Sumbangannya pada isu identitas didasarkan pada konsep ras. Dalam

pandangan Quijano, konsep ini berawal dari kolonisasi Eropa terhadap apa yang kemudian dinamakan Amerika, dan menjadi suatu unsur sentral dalam klasifikasi hirarki sosial yang berlaku di wilayah tersebut. Identitas dibangun di sekitar ras, dan demikian pula halnya dengan dominasi. Bersamaan dengan ketergantungan, konsep ras hendak dijadikan kunci dalam konstruksi kolonialitas kekuasaan. Quijano berargumen bahwa kolonialitas kekuasaan memerlukan suatu dominasi eksternal, oleh suatu kerajaan terhadap suatu koloni atau neokoloni, mencakup pula dominasi intern oleh elite yang berkuasa terhadap masyarakat—justeru karena adanya konstruksi ras yang berbeda. Dengan demikian kolonialitas kekuasaan menjadi tantangan utama bagi terbentuknya negara-negara nasional dan plurinasional sejati di Amerika Latin.

Sebagaimana dapat kita lihat di sini, kreativitas teoretis Aníbal Quijano dan posisinya dalam tradisi pemikiran sosial otonom di kawasan ini telah menjadikannya seorang tokoh acuan yang penting dalam sosiologi Peru dan benua yang lebih luas. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Nicolás Lynch <nicolaslynch54@gmail.com>

› Kebahagiaan Pejuang

oleh **Raquel Sosa Elizaga**, Universitas Nasional Otonom Meksiko, Meksiko

Pahlawan dari seribu pertempuran, Aníbal Quijano, tercengang ketika Universitas Kosta Rika memberikan padanya gelar Doktor *honoris causa*. Ia bahkan lebih tercengang ketika hadirin di suatu auditorium yang penuh sesak berdiri untuk memberikannya penghormatan padanya. Ia secara hangat berterima kasih kepada para pejabat dan akademisi yang telah “mendekatkan diri mereka dengan hasil karyanya;” dan menekankan rasa terima kasihnya di kala ia menyampaikan pikirannya bahwa pengakuan ini disebabkan oleh suatu cara hidup “yang memberi makna terhadap apa yang dituliskan dan dan dipikirkan seseorang.” Dengan kerendahan hati dan kesederhanaan yang luar biasa ia menawarkan kepada publik apa yang dianggapnya sebagai moto hidupnya: “Hidup di dalamnya dan lawan.” Dan ia menambahkan: “Tidak ada cara lain untuk hidup di suatu dunia yang mempersatukan kekuasaan, eksploitasi, dan kekerasan.”

Saya bertemu Aníbal Quijano bertahun-tahun yang lalu, jauh lebih lama daripada yang dapat saya ingat, di negara saya ketika ia tiba sebagai orang yang diasingkan pada pertengahan tahun 1970-an. Pemikiran anti-imperialis dan perjuangannya; keyakinannya terkait dengan kebutuhan untuk melandaskan pengetahuan sosial pada tuntutan dan perjuangan rakyat Amerika, Asia, dan Afrika; empatinya dengan perjuangan perempuan, kaum muda, masyarakat adat, imigran, orang-orang yang tergusur, dan pengungsi di seluruh dunia, kesemuanya mengarahkan dirinya untuk menempuh perjalanan yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi dikenal dan diterima di berbagai tempat yang jarang dikunjungi para akademisi.

“Moto hidupnya adalah: Hidup di dalamnya dan lawan”

Sejarah panjang perlawanannya memaksanya, ketika ia kembali ke negara asalnya Peru pada awal tahun 1990-an, untuk melepaskan kedudukannya di Universitas San Marco setelah diktator Fujimori memerintahkan militer untuk mengambil alih kendali universitas. Maka ia sekali lagi mencari perlindungan di Universitas Binghamton, dan juga di Paris, dan di tempat-tempat lain; dan baru pada awal dekade kedua abad tersebut Universitas Ricardo Palma di Peru dengan murah hati menawarkan padanya tempat yang baginya merupakan tahun-tahun terakhir perjuangannya. Selama hidupnya ia tanpa mengenal lelah mengorganisir dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik, politik, dan pendidikan, dan secara terus menerus menjangkau rakyat; selalu formatif dan selalu memperlihatkan solidaritas yang tinggi. Ia menulis bab-bab yang brilian dengan berkolaborasi dengan banyak intelektual dan akademisi yang berpartisipasi dengannya dalam Forum Sosial Dunia, termasuk Immanuel Wallerstein and Pablo González Casanova, para sahabat karibnya.

Visinya tentang kolonialitas kekuasaan (*coloniality of power*), yang telah memperoleh pengakuan di seluruh garis lintang di planet ini, berakar dari suatu perjuangan yang bersifat politis maupun akademis. Kenyataannya, saya berpendapat bahwa ini merupakan suatu panggilan moral dan bahkan sebuah tuntutan untuk meningkatkan pandangan dan harga diri seseorang,

untuk tidak lagi menjadi subjek kekuasaan yang ada, baik dalam maupun luar negeri. Ini adalah panggilan untuk beralih ke pengetahuan, sebagai alat dan senjata untuk mencari jalan ke transformasi nyata demi kemanfaatan rakyat di dunia yang telah dicemarkan, dirugikan, dieksklusi, dan diabaikan.

Seperti para pendahulunya Aimé Césaire, Frantz Fanon, dan khususnya José Carlos Mariátegui, Aníbal Quijano membawa makna historis yang asli pada hasil karyanya, berdasarkan pada semangat yang menunjukkan cara melalui mana dunia telah mengalami transformasi sejak abad enam belas, di kala rasisme dan perbudakan telah diubah menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi yang menggerakkan pengembangan kapitalisme. Pemahaman dan penolakan atas siklus penindasan dan alienasi yang tidak berhenti sampai saat ini, menjadi tema yang terus-menerus dalam hidupnya. Mengasingkan diri dari tren dan perayaan-perayaan, tanpa merasa pedih oleh periode isolasi atau ketidakjelasan, penderitaan pribadi atau persekusi politik, itulah cara kegembiraan seorang pejuang. Ia adalah seseorang yang bahagia karena ia mengetahui bahwa ia memperjuangkan suatu tujuan yang lebih besar daripada dirinya. Dan ia menikmati kehidupan, keindahan, keluarganya dan teman-temannya, dengan seluruh kekuatan sejauh umumnya memungkinkannya. Mari kita rayakan keteladanannya yang luar biasa, tekadnya, dan integritasnya! ■

› Ciri-ciri kunci kemiskinan Pasca-Apartheid

oleh **Joshua Budlender**, Universitas Massachusetts Amherst, AS



Frederik Willem De Klerk dan Nelson Mandela di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada tahun 1992.

Hak Cipta: World Economic Forum.

Sudah jamak diterima sebagai kebenaran bahwa meskipun mayoritas kaum kulit hitam Afrika Selatan telah mencapai kemerdekaan politik dengan berakhirnya *apartheid* pada tahun 1994, kemerdekaan ekonomi substantif tetap belum terwujud. Namun ungkapan yang diulang-ulang ini dinyatakan dalam paparan yang sangat umum, atau dalam konteks studi yang sangat khusus terkait fenomena yang sangat khas. Di sini saya mencoba memaparkan bukti dalam cakupan yang lebih luas, untuk menunjukkan apa saja yang telah berubah dan apa yang tidak berubah terkait dengan pertanyaan tentang luasnya kemiskinan material di Afrika Selatan.

› Tingkat kemiskinan di era pasca-apartheid Afrika Selatan

Poin pertama dan paling mendasar yang harus disampaikan adalah bahwa proporsi dari populasi di Afrika Selatan yang secara khusus dikategorikan sebagai "miskin pendapatan" nyaris tidak berubah di era pasca-*apartheid*. Angka-angka yang muncul ditentukan oleh garis kemiskinan yang dipakai, namun umumnya antara 50% dan 65% populasi dikategorikan "miskin," sehingga berdasarkan angka-angka agregat ini, hanya terjadi peningkatan beberapa persen saja sejak tahun 1994. Tingkat kemiskinan ini secara tajam masih terbagi berdasarkan ras sesuai dengan klasifikasi sensus, dengan komposisi 73% kaum kulit hitam Afrika, 48% ras campuran (*Coloureds*), 12% India/Asia, dan 2% kaum kulit putih masuk di bawah garis kemiskinan masa kini.

Agak berkurangnya angka kemiskinan untuk sebagian besar terkait dengan masifnya ekspansi "hibah sosial" dari pemerintahan pasca-*apartheid* - berupa transfer bantuan tunai bulanan tanpa syarat yang menargetkan beberapa kategori kaum miskin. Bagi 40% rumah tangga termiskin di Afrika Selatan, kontribusi hibah sosial pemerintah saat ini umumnya lebih dari setengah dari total pendapatan rumah tangga mereka.

Peningkatan utama lain terkait kondisi material di era pasca-*apartheid* berkaitan dengan dengan beberapa aspek privasi material di luar pendapatan. Beberapa program publik yang besar telah secara dramatis meningkatkan akses pada pasokan saluran air, listrik dan pendidikan, sedangkan angka malnutrisi dan angka kematian telah menurun secara mencolok. Peningkatan-peningkatan di bidang ini merefleksikan pembiaran dan privasi yang sangat luar biasa di era *apartheid*, tetapi telah terjadinya kemajuan substantif tidak bisa dipungkiri, terutama di daerah pedesaan.

Meskipun telah terjadi perbaikan-perbaikan material ini, kemiskinan akut tetap meluas di daerah pedalaman, khususnya di tempat yang dulu dikenal sebagai *homelands* [kawasan hunian mandiri di luar kota khusus bagi warga kulit hitam] di era *apartheid*. Ketika indikator privasi dipakai untuk memetakan kemiskinan di Afrika Selatan, daerah dengan privasi tertinggi sering kali secara sempurna cocok dengan batas-batas bekas *homelands*, yang menunjukkan suatu jejak warisan selama lebih dari dua dekade lalu

semenjak daerah-daerah tersebut secara resmi dimasukkan kembali ke dalam pangkuan Afrika Selatan.

Namun kemiskinan tentu bukan hanya masalah perdesaan. Rumah tangga yang berada di area informal di daerah urban juga punya sedikit peluang lebih baik untuk keluar dari kemiskinan jika dibandingkan dengan rumah tangga sejenis di pedesaan, namun berhadapan dengan halangan struktural. Perencanaan di era *apartheid* telah memaksa kaum pekerja kulit hitam untuk pindah ke daerah pinggiran kota yang jauh, jauh dari tempat bekerja dan fasilitas-fasilitas yang berkembang dengan baik di jantung kota. Di era pasca-*apartheid*, pola ini semakin mengakar lewat perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi dan kebijakan pemerintah, yang mengakibatkan pembangunan rumah bersubsidi di lahan murah di daerah pinggiran. Diperuncing oleh kurangnya layanan sistem transportasi publik, para pekerja Afrika Selatan harus menempuh waktu perjalanan yang panjang dan harus membayar ongkos komuter yang mahal; ini mengakibatkan sampai 40% dari gaji mereka dihabiskan untuk “pajak transportasi.” Yang utama, “kota-kota *apartheid*” nampaknya juga cenderung untuk membuat penghuni kawasan pinggiran mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.

› Pekerjaan terlalu sedikit dan gaji terlalu rendah

Secara umum, tidak berfungsinya pasar tenaga kerja adalah persoalan yang mengganjal di jantung kemiskinan pasca-*apartheid*. Pengangguran jelas menarik perhatian media dan pembuat kebijakan, hal mana lazim mengingat tingginya angka pengangguran. Berdasarkan definisi global yang “sempit” terkait pengangguran, angka pengangguran berkisar antara 25% dan 30%. Sedangkan berdasarkan definisi “luas”—yang lebih masuk akal untuk konteks Afrika Selatan—angka pengangguran berkisar 40%.

Angka pengangguran massal dalam skala ini jelas tidak bisa dianggap remeh. Hal ini, sayangnya, sering mengalihkan perhatian orang dari sangat rendahnya gaji pekerja di Afrika Selatan. Dari sekian rumah tangga di Afrika Selatan yang memiliki seorang pencari nafkah, setengah di antaranya berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan angka kalkulasi garis kemiskinan terbaru di Afrika Selatan (88% dari rumah tangga yang tidak memiliki pencari nafkah juga berada di bawah garis kemiskinan yang sama). Sementara gaji telah semakin meningkat di puncak distribusi, sejak tahun 1994 angka median gaji jumlahnya tetap stagnan dalam arti yang sebenarnya. Bukti-bukti etnografi semakin menunjukkan bahwa para pekerja Afrika Selatan sering kali berhenti bekerja karena gaji mereka masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kombinasi antara ongkos materi dan psikologis (seperti ongkos transportasi dan pengalaman menerima perlakuan tidak hormat) yang terkait dengan pekerjaan mereka, meskipun itu berarti mereka kemudian menjadi pengangguran.

Apa penyebab tingginya angka pengangguran dan gaji yang rendah? Suatu penjelasan favorit yang muncul adalah jeleknya kualitas pendidikan. Berdasarkan teori ini, Afrika Selatan sedang mengalami “ketidaksesuaian ketrampilan” (*skill mismatch*), di mana para pemberi kerja semakin membutuhkan pekerja berketrampilan tinggi tetapi sistem pendidikan dasar terlalu disfungsi untuk dapat menghasilkan pekerja yang dibutuhkan. Tentu benar bahwa meskipun angka penerimaan sekolah meningkat secara dramatis, tetapi sistem pendidikan

dasar di Afrika Selatan sedang berada dalam keadaan krisis yang tidak teratasi, di mana, contohnya, 8 dari 10 orang siswa kelas 4 tidak mampu memahami makna apa yang dibacanya. Namun, pendidikan tak sepenuhnya mampu menjelaskan keseluruhan cerita.

Salah satu persoalan yang harus dipahami adalah minimnya kebutuhan tenaga kerja sektor swasta. Dengan berakhirnya *apartheid*, dan runtuhnya kontrol arus masuk warga (*influx*) di akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, persediaan pekerja meningkat secara dramatis, karena para warga kulit hitam Afrika Selatan yang ruang geraknya semula terbatas pada *homelands* kini dapat mencari penghidupan yang lebih baik di kota-kota. Permintaan terhadap pekerja dalam periode ini tidak dapat mengikuti pertumbuhan persediaan pekerja, sehingga menyebabkan kesenjangan pengangguran struktural yang terus berlangsung hingga hari ini. Meskipun para pelaku bisnis sering mengeluh bahwa peraturan yang sulit menyebabkan penerimaan tenaga kerja menjadi berisiko, data administrasi menunjukkan bahwa sektor swasta Afrika Selatan ditandai oleh tingginya angka pekerja yang berhenti bekerja. Pada saat yang sama, minimnya permintaan pekerja juga terkait dengan rendahnya investasi tetap di sektor swasta. Praktik-praktik pada akhir *apartheid* berupa ekspansi bisnis dengan cara akuisisi daripada investasi produktif telah digantikan dengan model *corporate unbundling* [situasi di mana perusahaan mempertahankan bisnis utamanya, tetapi menjual aset, alur produksi, divisi, dan bagian di bawahnya], *shareholder payouts* [pembayaran pemegang saham oleh perusahaan], dan berpindahnya modal ke luar negeri, tetapi ketiadaan ketertarikan pada investasi domestik produktif tetap sama.

› Kerawanan dan dinamika kemiskinan

Sejak tahun 1994 Afrika Selatan telah mengikuti tren global berupa alih daya (*outsourcing*) dan “*labour broking*” [praktik pengerahan tenaga kerja alih daya lepas melalui perantara] yang menyebabkan meningkatnya angka bentuk-bentuk kerja yang rawan (*precarious*). Analisa dinamika kemiskinan di Afrika Selatan menunjukkan bahwa 40% dari rumah tangga yang tidak miskin bersifat “rentan”—mereka berhadapan dengan risiko serius untuk jatuh miskin di masa depan—sedangkan 80% dari rumah tangga miskin diklasifikasikan sebagai “miskin kronis” karena tidak adanya prospek bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Ungkapan yang menyatakan bahwa kemerdekaan ekonomi substantif tetap belum terwujud di Afrika Selatan menjadi hal yang biasa karena memang sangat berasalan; realitas membuktikan hal tersebut. Namun suatu poin yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar di Afrika Selatan adalah sejauh mana penanganan hal ini membutuhkan restrukturisasi fundamental terhadap ekonomi *apartheid* yang masih ada bersama kita. Tidak diragukan lagi bahwa ekspansi lanjutan pemberian hibah sosial dan layanan dasar akan merupakan tindakan yang progresif. Namun, pasar tenaga kerja Afrika Selatanlah yang merupakan jantung disfungsi ekonomi, dan ruang inilah yang perlu menjadi sasaran intervensi jika ketergantungan pada jalur *apartheid* ingin diputus. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Joshua Budlender <jbudlender@umass.edu>

› Kesejahteraan Pasca-Bailout:

Wajah Baru Kemiskinan di Yunani

oleh **Vassilis Arapoglou**, Universitas Crete, Yunani



Kemiskinan terlukis pada dinding rumah-rumah yang ditinggalkan, sementara bagi banyak orang tidur di jalan menjadi realitas sehari-hari. Sumber: Vassilis Arapoglou.

Setelah delapan tahun menjalani diterapkannya penghematan (*austerity*) yang sangat ketat, Pemerintah Yunani telah mengantisipasi era pasca-*bailout* [*bailout*: upaya penyelamatan lembaga keuangan yang bangkrut] dan mempromosikan “Strategi Pertumbuhan Masa Depan” (*Growth Strategy for the Future*), sebuah rencana yang telah dinegosiasikan dengan Eurogroup [kelompok menteri keuangan negara anggota Uni Eropa yang menggunakan mata uang Euro], Komisi Eropa, dan IMF terkait upaya untuk memperketat bentuk pengawasan fiskal menyusul keluarnya Yunani dari program-program dukungan finansial. Rencana ini menggarisbawahi kendali Yunani terhadap proses reformasi dan upaya untuk memprioritaskan “pertumbuhan yang adil dan inklusif.”

Catatan singkat ini mengulas klaim-klaim rencana ini mengenai suksesnya kebijakan tersebut dengan menempatkannya dalam suatu kerangka ruang-waktu yang lebih luas dan dengan mengkontraskannya dengan temuan-temuan penelitian terbaru saya tentang kemiskinan di kota-kota di Yunani. Percakapan tentang “pasca-*bailout*” bisa dianggap sebagai suatu upaya pembeda menuju “pascakesejahteraan” (*post-welfare*), sebuah strategi desentralisasi dukungan sosi-

al, yang berkembang dengan beragam kecepatan di banyak negara secara global, dan diadopsi oleh Komisi Eropa untuk menyempurnakan deregulasi pasar tenaga kerja dan untuk mengurangi hak-hak sosial. Agenda pascakesejahteraan mencakup penataan ulang hubungan-hubungan lokal negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam bingkai program-program jaringan pengaman sosial dan inklusi sosial. Desentralisasi tanggung jawab kebijakan sosial menghasilkan suatu arena politik untuk persaingan strategi. Di satu sisi, suatu strategi neoliberal bertujuan mentransformasikan lembaga-lembaga dan relawan lokal dan klien mereka menjadi investor modal manusia (*human capital*) dan para konsumen layanan sosial. Di sisi lain, strategi progresif bertujuan melawan proyek dari atas yang menempatkan kesejahteraan dan masyarakat sipil dalam aturan-aturan pasar. Koalisi-koalisi advokasi bertujuan mengintegrasikan pengetahuan dan klaim-klaim insiatif akar rumput, yang memungkinkan mereka mengakses aset-aset lokal dan pembiayaan untuk mengembangkan aktivitas mereka dalam bidang-bidang baru seperti kesehatan dan layanan sosial, perumahan, dan ekonomi digital, dan ekologi urban.

Dua persetujuan *bailout* pertama di Yunani merupakan sua-

tu upaya yang disengaja untuk memperkecil nilai tenaga kerja dan aset-aset para pekerja. Penurunan kondisi hidup secara drastis mulai tahun 2010 telah dihentikan selama dua tahun terakhir ini, tetapi situasi ini tidak bisa diperbaiki secara menyeluruh karena terkait cara kapitalisme Eropa kini diorganisir. Angka kemiskinan di tahun 2016, ketika dikalkulasikan dengan standar kemiskinan tahun 2008, mendekati angka 50%. Ini sesungguhnya berarti bahwa setengah dari populasi Yunani hidup dalam kemiskinan jika kita menggunakan standar hidup Yunani tahun 2008. Bahkan, jika kita tetap menggunakan standar penghasilan saat ini, hampir setengah dari populasi yang berusia kurang dari 25 tahun itu miskin, sangat merana (*severely deprived*), atau pengangguran. Kerja paruh waktu untuk anak muda juga meluap: satu dari empat pekerja berusia di bawah 25 tahun bekerja paruh waktu, dan satu dari lima tergolong pekerja miskin. Yunani telah keluar dari program perjanjian *bailout* yang menghasilkan peningkatan kesenjangan dan setengah dari populasi muda mereka berada dalam kondisi miskin dan kondisi hidup yang rawan (*precarious*). Kemiskinan yang baru ini telah berdampak pada generasi yang lebih muda, imigran, dan para penduduk kota.

Temuan dari riset terbaru (seperti ditunjukkan dalam buku *Contested Landscapes of Poverty and Homelessness in Southern Europe: Reflections from Athens* yang saya tulis bersama Kostas Gounis) menggambarkan bagaimana berbagai langkah-langkah darurat telah mendominasi kebijakan-kebijakan antikemiskinan di tingkat lokal. Upaya pengenalan skema “*social solidarity income*” [penghasilan minimum bagi rumah tangga sangat miskin] mendapatkan posisi utama dalam penurunan pelayanan sosial, tetapi dukungan pendapatan ini tidak memadai dan terkait dengan berbagai persyaratan ketat bagi para *workfarist* [penganggur yang dipekerjakan sebagai ganti bantuan sosial]. Berhadapan dengan terkurasnya sumber daya, badan-badan lokal dan para pelaku masyarakat sipil dipaksa untuk mendisain ulang program inklusi sosial untuk menarik dana swasta. Perlu ditekankan bahwa program-program *bailout* tak hanya telah menghancurkan bentuk-bentuk dukungan yang sudah rapuh dan tak memadai, tetapi juga telah membentuk suatu jalur khas menuju privatisasi layanan publik dan dukungan bagi sumbangan amal.

Hal yang paling mengecewakan adalah temuan bahwa sering dibuat suatu penggolongan semu antara “orang miskin baru,” dengan siapa warga kelas menengah biasa dapat mengidentifikasi diri mereka (sebab orang-orang tersebut mewakili mereka yang bernasib sama dalam hal berisiko jatuh miskin), dan para kaum terpinggirkan lainnya—para pecandu obat-obatan, orang dengan gangguan kesehatan mental, migran ilegal, dan orang yang sedang berpindah (*people on the move*). Dalam hal ini ketidakmampuan kebijakan lokal untuk menanggapi, bukan hanya berarti kegagalan untuk menanggapi kemiskinan material, tetapi juga sebuah ukuran mengenai penggolongan simbolik di antara para kaum miskin sebagai suatu cara untuk menghindari rasa bersalah dan rasa takut.

Bertentangan dengan itu, pluralisme dalam masyarakat sipil telah membuat orang mampu mempertanyakan logika pasar

dan praktek-praktek lama dalam penanggulangan kemiskinan. Iklim harapan telah menyebar ke upaya-upaya yang sedikit-banyak terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan tetapi tidak masuk dalam kategori administratif yang ada. Dukungan informal telah menjadi perisai terhadap semakin dalamnya proses peminggiran, dan inisiatif-inisiatif solidaritas lokal telah menyambut kedatangan para pengungsi di kota-kota Yunani, berlawanan dengan kebijakan Eropa yang mendua terkait kebijakan imigrasi.

Namun “spontanitas” dan “kemauan baik” tidak cukup dalam melakukan perubahan, khususnya ketika inisiatif akar rumput dihadapkan dengan kecurigaan Uni Eropa atau harus beroperasi dalam lingkungan yang sangat birokratis. Bertentangan dengan pandangan umum yang luas, perlu waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan pengetahuan di daerah-daerah yang menurut sejarahnya sejak dulu aktif, di mana sektor relawan, asosiasi profesional, penghuni liar, inisiatif akar rumput bergerak bersama, dan di mana akses ke jaringan advokasi internasional atau gerakan telah didirikan. Namun sebagian besar dari kapasitas ini belum terlalu diuji. Mental otoriter dan *clientelist* [jual-beli dukungan politik] masih hidup di kalangan partai-partai yang berkuasa, karena mereka menggunakan organisasi-organisasi kolektif sebagai perpanjangan tangan negara, merendahkan keahlian sosial (*social expertise*), dan membungkam suara-suara mereka yang berbeda pendapat.

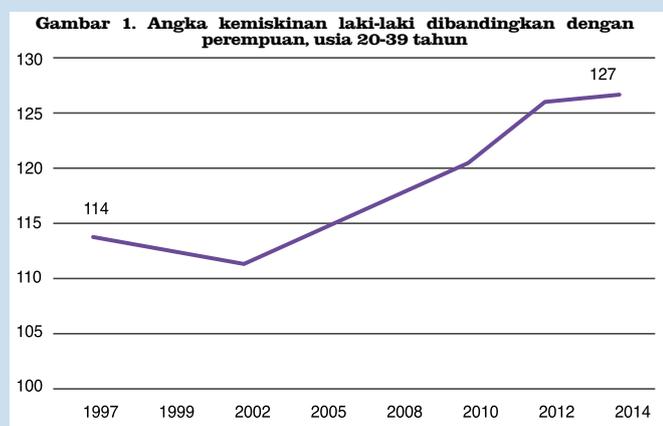
“Strategi untuk pertumbuhan yang adil dan inklusif” mungkin dapat dilihat sebagai sebuah upaya Yunani untuk memperbaiki fragmentasi kebijakan dan untuk mencapai suatu kompromi dengan institusi-institusi Eropa tentang masa depan era pascakesejahteraan. Organisasi-organisasi masyarakat sipil telah mengkritik perumusan rencana tersebut dan negosiasi dengan Komisi karena ketiadaan transparansi. Rencana tersebut tidak menetapkan sasaran yang kongkret mengenai pengurangan kemiskinan dan memuji pentingnya dukungan terarah (*targeted assistance*), tanpa melakukan penilaian terhadap dampak sosial dari dukungan yang sekarang bertingkat rendah. Hal serupa juga terjadi pada upaya prioritas untuk “integrasi ekonomi dan sosial untuk pemuda” dan untuk “ekonomi berorientasi sosial” yang tidak didukung dengan ukuran-ukuran kongkret. Hal yang mengejutkan adalah bahwa isu tentang integrasi pengungsi dan kaum migran amat jarang disebut. Rencana tersebut mengidentifikasi bidang-bidang utama yang dinegosiasikan dengan Komisi, utamanya terkait bagaimana memulihkan perundingan kolektif dan upah minimum, yang menjadi perhatian para aktivis buruh. Namun akan sangat sulit untuk membalikkan perundang-undangan antiperburuhan, dan pajak bagi yang berpendapatan rendah dan kaum muda yang berwirausaha, dan untuk menunda pemotongan pensiun, yang sudah disepakati dengan para pemberi pinjaman. Mengingat kondisi-kondisi yang sedemikian tidak menguntungkan seperti ini, perjuangan lokal untuk pemberdayaan politik dan ekonomi masyarakat sipil merupakan satu-satunya dasar untuk optimisme. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Vassilis Arapoglou <arapov@uoc.gr>

› Mengapa Ada Lebih Banyak Perempuan Miskin di Amerika Latin?

oleh **Juliana Martínez Franzoni**, Universitas Kosta Rika, dan anggota Komite Penelitian Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Sosial ISA (RC19)

Walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi, kompetisi elektoral dan kebangkitan pemerintahan kiri, angka kemiskinan perempuan di Amerika Latin meningkat dari 114 ke 127 di antara 100 laki-laki (Gambar 1). Apa yang salah pada jutaan perempuan di seluruh wilayah ini?



Sumber: Elaborasi sendiri berdasar data ECLAC, CEPALSTAT, 2018.

› Konteks

Amerika Latin sedang bangkit dari suatu "left turn" (tikungan ke kiri) atau "Pink Tide" (Gelombang Pasang Merah Muda) yang dimulai pada tahun 1998 dan berlangsung hingga pertengahan 2010-an. Kompetisi elektoral membawa pengaruh lebih luas terhadap platform progresif dan menggarisbawahi tuntutan bagi kebijakan tenaga kerja dan sosial yang progresif.

Pergeseran ke kiri merupakan capaian politik dari kekecewaan warga negara terhadap janji-janji yang tidak ditepati dari pemerintahan konservatif sebelumnya. Kekecewaan ini bertepatan dengan suatu ledakan ekonomi. Meskipun beragam, partai-partai sayap kiri dan para pemimpin mereka terus menyuarakan tuntutan terhadap perubahan, terutama terkait kondisi hidup. Di tahun 2000, luaran sosial dan kebijakan publik mengalami kemajuan di seluruh wilayah.

› Tindakan negara

Kebijakan ekonomi yang diimplementasikan selama *Pink Tide* memerlukan reformasi kebijakan pasar tenaga kerja yang menaikkan upah minimum riil dan meningkatkan formalisasi.

Belanja sosial menjadi proporsi besar dari total belanja publik, meningkat dari 49% di tahun 2000 menjadi 58% di tahun 2014. Dalam ukuran per kapita, jumlahnya meningkat dari 687 USD di tahun 2000 menjadi 1619 USD di tahun 2014 sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (*Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC*). Meskipun besarnya kenaikan di antara negara-negara bervariasi, trend ini muncul di seluruh wilayah dan bisa dilihat baik dalam program baru maupun program yang direformasi.

Sebagian besar pengeluaran sosial mengutamakan peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya pemerintah melalui transfer dana dan layanan. Sebagian besar intervensi pemerintah di seluruh Amerika Latin membidik para ibu dan perempuan. Perkembangan kebijakan telah meningkatkan proporsi perempuan yang memiliki penghasilan sendiri melalui program Transfer Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfers, CCT*) dan memperluas jangkauan pensiun. Intervensi-intervensi ini meningkatkan akses perempuan terhadap jaminan hari tua atas nama mereka sendiri, dibandingkan dengan jaminan yang diperoleh sebagai anggota keluarga suami (*dependent*). Di samping itu, lama dan jangkauan cuti hamil dan melahirkan meningkat dan lambat laun mengawali suatu reorganisasi perawatan di luar keluarga dan pekerjaan keibuan perempuan yang tak berbayar. Dengan keterlibatan yang lebih besar di pasar tenaga kerja, kehidupan perempuan ditransformasikan.

› Pasar tenaga kerja dan inkorporasi negara (*state incorporation*)

Sepanjang tahun 2000-an, agregat partisipasi tenaga kerja perempuan melambat karena tingginya jumlah perempuan dengan pendidikan tinggi (*tertiary education*): perempuan berpendidikan tinggi berusia 24 sampai 59 tahun mengalami partisipasi tenaga kerja sebesar hampir 90%. Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan menuntut penggabungan perempuan yang berpendidikan lebih rendah. Namun para perempuan-perempuan dari kalangan ini menghadapi hambatan struktural ketika masuk dalam pasar kerja. Secara umum, pola perubahan secara menyeluruh tidak berlaku untuk seluruh perempuan, tetapi kesenjangan pendapatan di antara kaum perempuan juga menjadi tersegmentasi.

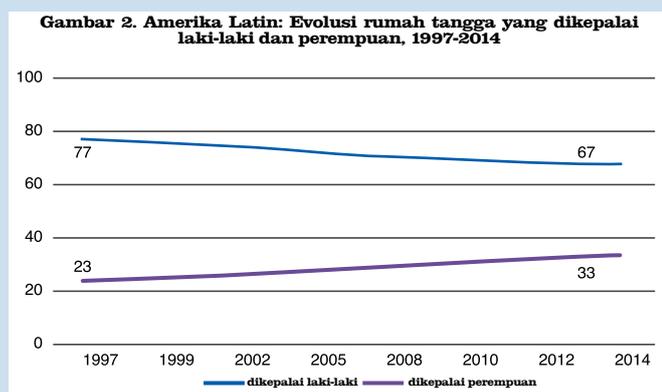
Dengan alasan-alasan yang berbeda, meleburnya perempuan dalam pasar tenaga kerja mencapai suatu titik stagnan baik di kalangan perempuan dengan pendapatan rendah ma-

upun pendapatan tinggi pada awal tahun 2000-an. Di kalangan mereka yang paling mengalami stagnasi, angka partisipasi mencapai puncaknya disebabkan oleh adanya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, tingkat kesuburan reproduksi yang lebih dini dan lebih tinggi, serta sumber daya terbatas untuk bisa membeli jasa layanan di pasar swasta. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang tidak berubah berarti bahwa para perempuan berpendidikan tinggi telah mencapai angka partisipasi tenaga kerja yang sama dengan laki-laki, dengan cara merendahkan dan menunda kesuburan dan membeli jasa layanan dari pasar swasta.

› **Pengaturan keluarga yang berubah**

Keluarga Amerika Latin juga mengalami transformasi mendalam seiring dengan revolusi demografis yang kedua. Relasi perkawinan yang bervariasi berarti opsi lebih luas untuk masuk ke dalam dan keluar dari keluarga serta distribusi hak dan kewajiban yang lebih baik. Meskipun jumlah keluarga lebih sedikit, ini pun tidak stabil dan rentan terhadap keretakan.

Di seluruh wilayah, keluarga inti tergerus karena pengaturan keluarga menurun dan keluarga tunggal, kohabitasi, pasangan pernikahan sejenis, dan bentuk keluarga lain meningkat. Meningkatnya angka perceraian adalah salah satu indikator dari transformasi ini. Gambar 2 menunjukkan menurunnya proporsi orang tua ganda dengan laki-laki sebagai kepala keluarga disandingkan dengan peningkatan proporsi keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Unit keluarga pada dasarnya dapat kooperatif ataupun terlibat konflik. Transformasi keluarga yang sedang berjalan memberi tantangan bagi aspek kooperatif dari keluarga yang terdiri dari orang-orang dewasa yang merawat dan melindungi satu sama lain dan keturunan mereka dari risiko sosial, terutama konflik lama dan konflik baru. Salah satu konsekuensi transformasi ini adalah meningkatnya jumlah anak yang tidak lagi tinggal satu atap dengan ayah mereka.



Sumber: Berdasarkan data ECLAC.

Transformasi keluarga membawa implikasi signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Data catatan nasional menunjuk-

kan bahwa setidaknya 60% kebutuhan konsumsi anak-anak dan pemuda Amerika Latin berasal dari transfer pribadi. Pemeliharaan ekonomi dan perawatan anak-anak terhubung dengan kehidupan para ibu mereka, yang biasanya menjadi wali anak-anak mereka. Perempuan memberi makan, mengasuh, membawa anak-anak mereka untuk cek kesehatan, serta melakukan sederet tugas-tugas lain yang terkait dengan pengasuhan anak. Pemenuhan kebutuhan, nilai, dan konsumsi yang tidak terlihat ini berlangsung di dalam keluarga dan diatasi oleh perempuan yang melakukan perawatan dan pekerjaan domestik tanpa dibayar. Survei-survei regional mengenai penggunaan waktu melaporkan hal ini, terlepas dari pendapatan, umur, dan pengaturan keluarga.

Perempuan mengalami perubahan dalam partisipasi pasar tenaga kerja, namun laki-laki hanya mengalami sedikit perubahan dalam partisipasi domestik. Perempuan tetap melakukan pekerjaan perawatan dan pekerjaan domestik tanpa dibayar dua atau tiga kali lebih besar daripada laki-laki. Lagi pula, di kala keluarga retak, lebih sedikit anak-anak yang tinggal bersama ayahnya. Pembagian kerja domestik yang terjadi terus menerus dan timpang seperti itu memiliki konsekuensi negatif pada akses perempuan terhadap sumber daya. Beban domestik membatasi partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja (misalnya jam kerja berbayar) dan melestarikan segregasi pekerjaan demi mengakomodasi kebutuhan keluarga. Perbedaan pendapatan membatasi kemampuan perempuan untuk mengubah sebagian pekerjaan tak berbayar menjadi pekerjaan berbayar perempuan yang dikerjakan di rumah—suatu ciri inti dari rezim perawatan Amerika Latin yang timpang.

› **Implikasi**

Pengaturan keluarga yang berubah, lebih banyak ayah yang lepas tangan untuk hal-hal di luar relasi perkawinan, dan minimnya keterlibatan langsung negara dalam kesejahteraan materiil anak, secara bersama-sama menciptakan suatu kebutuhan untuk perubahan adaptif pada hukum dan kebijakan negara. Negara-negara menghadapi tantangan dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mampu merespon kebutuhan keluarga bercerai yang jumlahnya meningkat, rumah tangga dengan orang tua tunggal (sebagian besar ibu), keluarga dengan pencari nafkah ganda, mitra sejenis, dan lebih banyak anak dan perempuan yang rentan terhadap kemiskinan. Di samping itu, pengakuan hukum dan hak-hak yang setara bagi pengaturan keluarga yang sangat beragam ini membutuhkan intervensi negara yang mampu menegakkan kerjasama antar berbagai bentuk pengaturan keluarga dan intervensi negara yang melebihi transfer tunai untuk menanggulangi kemiskinan. Kesemua ini merupakan suatu tantangan baru bagi semua aktor politik, termasuk partai-partai sayap kiri. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Juliana Martínez Franzoni <juliana.martinez@ucr.ac.cr>

› “Ekonomi Belas Kasih”

Dalam Bayang-Bayang Negara Kesejahteraan

oleh **Fabian Kessl**, Universitas Duisburg-Essen, Jerman



Di Jerman saja, jutaan orang merupakan pengguna dapur sup, toko pakaian sumbangan, tempat pembagian makanan, dan bank makanan lainnya.
Creative Commons.

Pada bulan Desember 2017 dewan direktur bank pangan lokal (*Tafel*) di Essen (Jerman) memutuskan untuk membatasi akses bagi para pengguna berlatarbelakang migran. Merujuk pada dugaan perbuatan buruk seorang pemuda migran, bank pangan tersebut mencabut akses bagi warga yang tidak punya paspor Jerman. Keputusan untuk membatasi akses ke bank pangan atas dasar garis etnis tersebut telah ramai dibicarakan secara internasional dan dikritik secara keras karena rasisme yang terkandung di dalamnya. Kasus Essen tersebut menunjuk pada satu perubahan dalam persoalan sosial. Bukannya memperhatikan kesenjangan dan hubungan antara “atas dan bawah” di kota seperti Essen, yang sangat terpecah antara yang kaya dan yang miskin, suatu perbedaan baru malah diperkenalkan, yaitu antara “orang dalam dan orang luar.” Perbandingan yang dibuat sekarang adalah antara “pensiunan Jerman yang membutuhkan dan rentan” dengan “laki-laki muda bukan Jerman yang asertif.” Bahkan dalam konteks suatu masyarakat demokratis, perubahan seperti itu perlu dibicarakan secara publik dan ilmiah. Yang tetap dianggap lumrah dalam agenda baru ini, justru, *keberadaan* bank-bank pangan lokal di kota-kota besar Eropa. Hebatnya, debat ini hanya sebentar saja menyentuh persoalan mengapa di abad ke-21 ini orang masih menggunakan bank pangan di suatu negara seperti Jerman—atau di negara-negara Eropa lain dan di negara-negara Amerika Utara—setiap hari.

Di Jerman, angka resmi mengenai bantuan pangan hanya ada berdasarkan data yang disediakan oleh asosiasi-asosiasi nasional seperti Asosiasi Bank Pangan Jerman (*Tafel Deutschland e.V.*). Asosiasi ini melaporkan bahwa ada 934 bank pangan lokal pada tahun 2016, dengan hanya menghitung anggota asosiasi. Bila kita memasukkan organisasi-organisasi lain yang bertugas membagikan bahan pokok kepada “yang membutuhkan,”

kita akan menjumpai sistem tanggap kemiskinan yang jauh lebih luas di seluruh Eropa—bahkan di luarnya. Di Jerman saja, jutaan orang tercatat sebagai penerima bantuan dari dapur umum, toko baju bekas, pusat pembagian makanan, dan bank-bank pangan yang lain. Riset kami sendiri menunjukkan bahwa ada sekitar 5.000-6.000 organisasi di hanya lima dari 16 *Bundesländer* (negara bagian Jerman). Sebuah sistem baru untuk mengatasi kemiskinan telah berdiri sejak 1980an (atau lebih awal seperti di AS). Sistem itu bisa disebut sebagai suatu “ekonomi belas kasih yang baru” (*new charity economy*).

Istilah “ekonomi belas kasih” menggambarkan suatu sistem distribusi di mana bahan kebutuhan pokok dibagikan secara gratis atau dijual murah kepada “orang miskin” atau “orang yang membutuhkan” melalui para relawan atau tenaga yang dibayar murah. Sistem ini mengandalkan persediaan bahan konsumsi sehari-hari yang berasal dari satu dari tiga sumber ini: kelebihan produksi industri; barang yang tidak bisa dijual lagi karena alasan ketentuan standarisasi dan alasan pemasaran; dan barang-barang yang tidak lagi diperlukan oleh rumah tangga.

“Ekonomi belas kasih yang baru” menasar kelompok orang yang tidak punya sarana atau sumber daya untuk berpartisipasi dalam sistem distribusi barang kapitalis. Akan tetapi, ekonomi jenis baru ini terutama hanya menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari. Dengan demikian sistem ini mengubah bentuk jaring pengaman sosial yang dulunya adalah tanggungjawab negara kesejahteraan dan lembaga-lembaganya (sebagaimana kita kenal di Eropa atau Amerika Utara di pertengahan abad ke dua puluh). Dalam sistem jaminan sosial negara kesejahteraan, kekurangan dalam penyediaan kebutuhan pokok karena faktor hukum ditambal terutama dengan bantuan tunai dan ditambah dengan layanan publik. Namun “ekonomi belas kasih baru” menempatkan tunjangan non-tunai, asuransi sosial wajib, rantai pasokan barang, atau struktur kesejahteraan sebagai subsidi bagi mereka yang membutuhkan. Kadang-kadang, sistem ini bahkan menggantikan jaring pengaman sosial itu. Dalam hal ini, para pengguna jaring pengaman sosial dirujuk ke layanan bantuan kehidupan yang baru ini, yang dibiayai oleh sumbangan. Keterseediaannya tidak berdasarkan hak, melainkan atas dasar kemurahan hati (secara implisit mensyaratkan kesetiaan). “Ekonomi belas kasih yang baru” mengubah pengentasan kemiskinan menjadi tanggap kemiskinan dengan mengubah cara penyaluran bantuan: donatur dan relawan bertindak atas dasar belas kasih dan bukan atas dasar “solidaritas dengan orang asing” (*Hauke Bunkhorst*). Yang menandai “ekonomi belas kasih baru” adalah bentuk kepedulian sementara terhadap kemalangan sesama, dan bukan suatu hak resmi untuk membantu.

Tetapi ini juga bukan sistem tanggap kemiskinan berbasis kesetiaan dan belas kasih seperti yang kita kenal dari masa-masa awal industrialisme. “Ekonomi belas kasih baru” harus dimengerti sebagai sistem ekonomi sekunder juga. Terkait erat dengan pasar primer, ekonomi belas kasih membantu proses transfer barang-barang sisa dari ekonomi primer ke sistem sekunder. Transfer ini juga

memberi manfaat ekonomi bagi mereka yang menyumbangkan barang-barang primer tersebut karena mereka menerima keuntungan yang sebanding dengan sumbangan yang mereka berikan. Penyumbang makanan murah masih bisa mengambil untung dari barang-barang yang mereka sumbangkan karena (a) bisa mengurangi ongkos pembuangan dan mungkin juga pajak; dan (b) perusahaan yang menjadi penyumbang atau sponsor resmi bisa memoles citra publiknya sebagai perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Karena itu “ekonomi belas kasih baru” ini menggambarkan kehadiran *negara kesejahteraan bayangan* yang masif dan makin besar. Berbeda dari anggapan orang, bank pangan, dapur umum, toko pakaian bekas bersumber amal dan sejenisnya bukanlah satu-satunya inisiatif berbasis sukarela dalam masyarakat sipil. Riset kami memperlihatkan bahwa di Jerman 90% dari organisasi-organisasi yang masuk dalam “ekonomi belas kasih baru” menyediakan bantuan materi dan berbagai jenis layanan sosial. Maka, ada hubungannya yang kuat dengan negara kesejahteraan formal, yang juga kelihatan dari pembiayaan ekonomi belas kasih: biasanya dijumpai gabungan antara sumbangan, dana sponsor, dana masyarakat, iuran anggota, pendapatan dari penjualan, dan/atau biaya layanan. Selain itu, penyedia bantuan yang berbasis sumbangan seringkali menerapkan syarat-syarat bagi calon penerima (*means-testing*), dengan memakai aturan-aturan negara kesejahteraan yang resmi. Dengan kata lain, yang menghubungkan “ekonomi belas kasih baru” dengan sistem layanan dalam negara kesejahteraan adalah sistem evaluasi (*assessment*) situasi individu yang dibuat oleh administrasi negara. Ini kelihatan dalam kerjasama tak langsung antara otoritas sosial pemberi tunjangan dan layanan-layanan yang diselenggarakan oleh “ekonomi belas kasih baru.” Misalnya, staf pada pusat informasi lowongan kerja dan agen-agen rekrutmen akan mengarahkan orang-orang yang mendaftar untuk mendapatkan tunjangan negara ke layanan-layanan yang tersedia seperti pusat-pusat pembagian makanan. Karena itu terbentuklah relasi subsidiaritas baru—dalam mana unit yang lebih kecil diharapkan memberi bantuan sebelum unit lain yang lebih besar melakukannya. Pegawai administrasi negara memahami layanan-layanan “ekonomi belas kasih baru” sebagai tambahan atau malah pengganti bagi tunjangan-tunjangan negara kesejahteraan meskipun tak ada dasarnya dalam perundang-undangan sosial.

“Ekonomi belas kasih baru” bisa menjadi contoh utama dari pembagian kerja baru antara tiga sektor dalam masyarakat sipil, ekonomi dan negara di mana batas-batas dan logika tindakan mereka masing-masing kabur. Karena itu, saat ini kita sedang mengarah pada suatu perubahan mendasar dalam hal layanan bantuan tradisional bagi orang-orang yang membutuhkan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Fabian Kessi
<fabian.kessi@uni-due.de>

› Wacana

Ketahanan Pangan:

Tantangan untuk Abad 21

oleh **Mustafa Koç**, Universitas Ryerson, Kanada, dan anggota Komite Penelitian Sosiologi Migrasi (RC31) dan Pertanian dan Pangan (RC40) ISA



Ketahanan pangan muncul sebagai wacana selama krisis keuangan global pada pertengahan tahun 1970-an sebagai prioritas internasional untuk mengatasi ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi semua. Salah satu definisi ketahanan pangan yang paling dikenal adalah dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) pada Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia tahun 1996. Berdasarkan definisi tersebut, ketahanan pangan “ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat.”

Meskipun memiliki pengakuan yang luas dari organisasi-organisasi internasional seperti FAO, konsep ketahanan pangan telah menjadi konsep yang membingungkan dengan beragam definisi dan prioritas yang berbeda yang terus berubah selama bertahun-tahun. Kebingungan konseptual dari wacana ketahanan pangan mencerminkan

persaingan imajinasi mengenai bagaimana akses ke makanan harus dikelola dalam ekonomi pasar serta perubahan dalam cara-cara khusus sistem makanan diatur, yaitu kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang mendefinisikan penyediaan makanan di paruh kedua abad kedua puluh.

Sejak tahun 1980-an, konseptualisasi ketahanan pangan telah mengalami revisi dalam lingkungan liberalisasi pasar, intensifikasi hubungan ekonomi global, dan restrukturisasi ekonomi dan negara. Kebijakan neoliberal yang diadopsi sebagai solusi untuk krisis keuangan tahun 1970-an menyebabkan pemotongan pengeluaran program sosial dan perubahan dalam kondisi kerja, menyusutnya peran negara dalam ekonomi, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan. Perubahan-perubahan ini menyebabkan penurunan pekerjaan di sektor manufaktur yang memiliki serikat pekerja, dan pekerjaan rawan dan paruh waktu yang sebagian besar di sektor informal dan layanan. Penurunan program-program sosial membuat situasi memburuk, yang mengakibatkan tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan yang lebih tinggi.

Wacana ketahanan pangan neoliberal mencakup suatu pergeseran dari bahasa berbasis hak di era sebelumnya ke orientasi pasar yang mengidentifikasi makanan sebagai suatu komoditas, dan kerawanan pangan sebagai kegagalan pribadi daripada kegagalan sistem pertanian pangan. Sebuah dokumen Bank Dunia tahun 1993 dengan jelas mencerminkan pergeseran ini: “Namun, dalam praktiknya, makanan adalah suatu komoditas.” Karena fungsi sosial negara kesejahteraan menyusut dan program sosial nasional dialihkan ke pemerintah provinsi dan lokal, bantuan sosial dan fungsi perawatan semakin diserahkan kepada organisasi masyarakat sipil dan keluarga. Organisasi filantropis, seperti bank makanan, mulai mengisi celah yang tersisa dari program-program sosial yang diselenggarakan pemerintah. Bank makanan, yang untuk pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1967, tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas, tidak seperti lembaga kesejahteraan sosial, namun mulai menyebar ke seluruh dunia sebagai mekanisme penting jaminan sosial untuk menyediakan “surplus makanan” ke “surplus populasi.”

Dalam ekonomi pasar, produk yang telah diproduksi untuk konsumsi manusia tetapi tidak dapat dijual di pasar sebelum tanggal terbaik mereka menjadi surplus. Redistribusi surplus pangan telah dipromosikan sebagai solusi untuk menangani limbah makanan dan kemiskinan pangan. Perhatian yang tampaknya mulia ini, bagaimanapun, cenderung mengabaikan peran pemerintah di dalam pemotongan bantuan sosial dan peran tuntutan pemasaran dari perusahaan-perusahaan pertanian pangan dalam meningkatnya kerawanan pangan. Meskipun benar bahwa hingga 40% dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia hilang atau terbuang antara ladang dan piring dan pengurangan limbah ini dapat memungkinkan kita untuk memberi makan kepada semua yang rawan pangan di dunia, penyebab kerawanan pangan bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena ketidaksetaraan akses. Saat ini, sebagian besar biji-bijian dan minyak nabati dunia digunakan sebagai pakan ternak, bahan bakar hayati, dan produk industri seperti sirup jagung fruktosa tinggi, alih-alih sebagai makanan. Pengurangan makanan yang terbuang itu dengan demikian membutuhkan peninjauan ulang secara kritis tentang bagaimana tuntutan keuntungan dari sistem pertanian pangan dan subsidi di sektor-sektor tertentu secara simultan menciptakan surplus yang sangat besar dari makanan dan kelaparan.

› Kemajuan tidak bersifat universal

Pada Konperensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia pada tahun 1996, sebuah komitmen dibuat untuk mengurangi jumlah orang yang kekurangan gizi hingga setengahnya pada tahun 2015. Pada saat itu, perkiraan jumlah ketidakamanan pangan adalah 799 juta. Pada tahun 2009, perkiraan jumlah kerawanan pangan mencapai 1,023 miliar. FAO menanggapi hal ini dengan mengubah metodologi mereka pada tahun 2012. Bahkan dengan metodologi baru ini, jumlah orang yang kurang gizi hanya dapat dikurangi menjadi 815 juta pada tahun 2015. Selain itu, di Afrika dan Timur Tengah, jumlah orang yang kurang gizi menunjukkan peningkatan karena perang dan konflik bersenjata. Dalam beberapa dekade terakhir, konflik bersenjata di berbagai belahan dunia telah mengubah jutaan orang menjadi surplus populasi yang rawan pangan. Menurut perkiraan FAO 2017, sekitar 60% dari 815 juta orang yang tidak aman makanan dan kurang gizi kronis di dunia hidup di negara-negara yang terkena dampak konflik. Sekitar 75% anak-anak menderita pertumbuhan terhambat (*stunting*) akibat kekurangan gizi hidup di negara-negara yang dilanda perang. Kerusakan ekonomi domestik, infrastruktur, dan lembaga-lembaga utama negara akibat perang juga telah menyebabkan jutaan orang menjadi pengungsi, sementara upaya untuk menahan pergerakan populasi di wilayah masing-masing telah mengubah negara-negara tetangga menjadi kamp pengungsi. Enam juta pengungsi Afghanistan di Pakistan dan Iran, dan 5,6 juta warga Suriah di Turki, Yordania, Lebanon, Irak, dan Mesir hanya dua dari contoh pergerakan massa regional

baru-baru ini. Sementara para pengungsi menderita kerawanan pangan jangka panjang dan kronis dan kekurangan gizi, mereka juga menjadi sumber kerawanan pangan dan ketidakstabilan politik di negara-negara tuan rumah.

› Ancaman terhadap ketahanan pangan di masa depan

Pada tahun 2050, populasi dunia diperkirakan mencapai 9 miliar. Ketika ekonomi berkembang mengadopsi pola konsumsi negara-negara kaya yang boros dan konflik bersenjata di seluruh dunia menciptakan gelombang baru pengungsi, tingkat kerawanan pangan bisa bertambah parah. Sejauh ini, kita mengandalkan mencari cara-cara untuk meningkatkan kapasitas produktif kita dan meningkatkan akses ke makanan untuk segmen populasi yang rentan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas produktif melalui metode pertanian industri menyebabkan meningkatnya konsentrasi kepemilikan ke tangan petani-petani yang lebih efisien dan mendorong jutaan petani dan petani kecil ke kota-kota. Meningkatnya penggunaan agrokimia juga menciptakan masalah lingkungan utama, seperti degradasi tanah, polusi udara dan air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pertanian menyumbang sekitar 13% dari emisi gas rumah kaca. Meningkatnya dampak perubahan iklim menciptakan ancaman lain terhadap kapasitas produksi di seluruh dunia. Sementara mencari kebijakan baru untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas makanan dan pengurangan kehilangan dan pemborosan, kita mungkin juga perlu mempertanyakan pola makan, pola konsumsi, dan pengaturan sistem agribisnis pangan kita yang telah berlangsung sepanjang abad yang lalu.

Gerakan kedaulatan pangan yang muncul telah menghubungkan petani, pekerja, dan konsumen makanan dalam upaya untuk bekerja menuju sistem pangan alternatif. Sementara kedaulatan pangan berbagi beberapa wawasan dengan wacana sebelumnya tentang keamanan pangan, dengan penekanannya pada peran negara-negara dalam mendefinisikan kondisi penyediaan makanan dalam batas-batas nasional /lokal, hal itu juga mencakup pengertian baru mengenai perlawanan terhadap globalisasi. Berbeda dengan interpretasi neoliberal tentang ketahanan pangan, wacana kedaulatan pangan mengakui pangan sebagai hak asasi manusia; menggarisbawahi pentingnya kepemilikan dan kontrol atas tanah, air, dan sumberdaya genetik oleh masyarakat lokal/adat; menekankan keberlanjutan dan ketahanan, bukan efisiensi dalam proses produksi; dan menolak penggunaan makanan sebagai senjata. Seperti ketahanan pangan, wacana kedaulatan pangan juga dinamis dan cair, dibentuk oleh perubahan sejarah politik dan ekonomi. Akan menarik untuk melihat peran yang dimainkan kedaulatan pangan dalam merekonstruksi persepsi publik tentang prioritas sistem pangan dan mendefinisikan kembali ketahanan pangan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Mustafa Koç <mkoc@ryerson.ca>

› Modernitas Global

oleh **Sujata Patel**, Institut Kajian Lanjutan India, India dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Sejarah Sosiologi (RC08), Perkembangan Perkotaan dan Regional (RC21), Sosiologi Konseptual dan Terminologis (RC35), Sosiologi Sejarah (RC56), serta anggota dewan RC08

Sejak akhir 1990-an, istilah “modernitas global” (*global modernity*) kian meluas penggunaannya dalam tulisan-tulisan yang mendiskusikan watak dan substansi dari teori-teori tentang dunia yang mengalami globalisasi. Istilah ini sendiri memadukan dua konsep, globalisasi dan modernitas, serta merumuskan ulang masing-masing teori bersangkutan seiring dengan saling bertautnya kedua konsep tersebut.

Teori-teori tentang modernitas global awalnya muncul dari pemikiran sosiologi arus utama yang mempertanyakan relevansi teori-teori klasik dalam menilai perubahan kontemporer di belahan Utara Global. Pertanyaan ini berujung pada perumusan pertanyaan-pertanyaan lainnya, yang salah satunya adalah apakah teori-teori modernisasi tahun 1950-an dan 1960-an yang merujuk pada posisi sosiologi klasik dan bersandar pada pengalaman Eropa dapat tetap berguna untuk memahami modernitas yang bergulir di seantero dunia. Dalam waktu singkat disadari bahwa model modernisasi sesungguhnya menjadikan pengalaman Eropa homogen dan hegemonik dengan berargumen bahwa organisasi institusional serta ciri kebudayaan yang mewakili proses modernisasi di Eropa akan berulang di berbagai belahan dunia. Apa yang dibutuhkan, menurut kajian ini, adalah sebuah perspektif yang menggantikan teori konvergensi mengenai modernitas dengan perspektif lain yang mengakui perbedaan yang mengorganisasi pengalaman modern di berbagai wilayah dunia.

Penerimaan posisi ini dalam sosiologi arus utama telah membuka kotak Pandora. Hal ini membuka celah bagi intervensi terhadap tema ini dari berbagai perspektif dengan akar yang berbeda seperti Weberian, Marxis, strukturalis, serta pascastrukturalis dan menyandingkannya dengan perspektif lain yang berkembang di luar belahan dunia Utara Global, yang dinamakan teori-teori lokal (*indigenous*) dan/atau Selatan. Masuknya sudut pandang baru dan berbeda ini memperluas cakupan dan raihan dari tema ini, menjadikannya suatu area kajian serta refleksi yang terpisah. Saat ini, wilayah kajian yang didefinisikan sebagai modernitas global melibatkan isu yang sangat luas yang berwatak ontologis, epistemologis, serta metodologis

terkait dengan teori-teori modernitas yang substantif, dan karenanya membuka ruang untuk memperdebatkan pilar-pilar dari disiplin sosiologi. Dalam tulisan ringkas ini, saya menunjukkan tiga perangkat perspektif yang muncul sejak akhir 1980-an serta awal 1990-an. Perspektif-perspektif ini adalah teori-teori modernitas jamak (*multiple modernities*), teori lokal dan Selatan, serta sudut pandang dekolonialisme (*decolonialism*).

› Modernitas jamak

Teori modernitas jamak memiliki banyak ragam dan melibatkan banyak penulis. Istilah ini dicetuskan oleh Shmuel Eisenstadt, yang melalui banyak cara telah menjadi penggagas dari posisi ini serta yang mempertautkan modernitas dengan kajian peradaban; kendati demikian, perspektif ini juga melibatkan para pemikir yang tak ingin menandai modernitas sebagai peradaban. Apa yang menghubungkan para pengkaji dari perspektif ini antara lain adalah asumsi-asumsi sebagai berikut: a) terdapat bukan hanya satu melainkan banyak modernitas; dengan kata lain: modernitas tidaklah tunggal melainkan majemuk; b) meskipun ekspresi institusional dari modernitas nampaknya sama, namun perbedaannya terkait dengan latar belakang khas kebudayaan dari tiap masyarakat; dan c) guna memahami perbedaan ini, dibutuhkan perumusan ulang dari teori-teori sosiologi klasik.

Dengan demikian kajian modernitas jamak semula berpijak pada gagasan serta posisi Eropa yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan historis serta filosofis terkait apa yang menyebabkan perbedaan pengalaman modernitas Eropa. Kajian ini lantas mengkaji apakah perbedaan ini menghasilkan sebuah perumusan untuk mengorganisasi sebuah kerangka guna menilai perbedaan di berbagai belahan dunia. Kedua, para pengkaji mencoba untuk mempertanyakan dasar-dasar dari inti (*core*) modernitas dengan menghadapkannya kepada unsur-unsur pinggirannya (*peripheries*). Eisenstadt berargumen bahwa inti dari modernitas merupakan agensi insani (*human agency*). Ia menganggap bahwa agensi ini otonom, rasional, kreatif, serta bebas. Ketiga, bilamana inti dari agensi insani



“Menggantikan praktik keilmuan Barat adalah hal yang penting dilakukan karena hal ini akan menjadikan para subyek menjadi objek telaahan”

adalah rasionalitas, bagaimana inti ini mengejutkan dirinya secara berbeda-beda di berbagai belahan dunia? Eisenstadt menekankan bahwa inti ini—agensi insani rasional—berakar pada religiusitas yang khas dari peradaban Axial. Hanya saja, pada peradaban Eropa-Kristen Axial ciri modernitas muncul pertama kalinya dan selanjutnya menyebarkan. Model Barat ini tidak diterima dalam bentuk serta pola awal mulanya dan ciri kulturalnya diseleksi, ditafsirkan ulang, serta dirumuskan ulang di kala masing-masing terlibat dengan corak yang diterima dari tiap peradaban Axial. Akibatnya, ciri inti baru menyeruak; unsur-unsur ini menjadi pijakan dari versi modernitas belakangan. Dengan demikian, selagi di satu sisi selalu terjadi konvergensi di berbagai belahan dunia terkait aspek-aspek sentral institusionalisasi, seperti struktur pekerjaan dan industrial atau mereka yang di bidang pendidikan serta pembentukan kota, senantiasa ada pula perbedaan dalam hal bagaimana dinamika institusional dan persoalan terkait berkembang di kala agensi dan struktur berinteraksi satu sama lain.

Sebagaimana sudah disampaikan, tesis modernitas jamak menyumbang kepada peralihan kebudayaan dalam teori sosial kontemporer. Sudah jelas dari apa yang disampaikan di atas bahwa dalam diskusi ihwal modernitas ini proses material hanya memperoleh sedikit perhatian atau bahkan tidak memperoleh perhatian sama sekali. Di samping itu, meskipun tesis ini mengadvokasi kesejarahan, tidak ada rujukan pada kolonialisme, cara mengorganisasi modernitas, prosesnya yang eksploitatif, serta hubungannya dengan sistem pengetahuan dan khususnya sistem pengetahuan ilmu-ilmu sosial. Perspektif yang diulas di bawah membahas isu-isu ini.

› Teori-teori lokal dan Selatan

Teori-teori lokal berangkat dari asumsi bahwa ilmu-ilmu sosial seyogianya memiliki otonomi untuk membingkai perhatian epistemik di wilayah mereka. Mereka sepakat dengan argumentasi Raewyn Connell bahwa ketimpangan kekuasaan di antara pusat (*metropole*) dan pinggiran (*periphery*) membentuk wajah ilmu-ilmu sosial dan situasi ini menyebabkan teori-teori Utara serta sudut pandang, perspektif, dan persoalan mereka menjadi universal. Dalam kajian-kajian Selatan, dua konsep menilai proses ini. Pertama yakni “ekstroversi” (*extroversion*) sebagaimana dirumuskan oleh Paulin Houtondji yang mendefinisikannya sebagai ilmu-ilmu sosial yang berorientasi eksternal. Konsep lainnya yakni “ketergantungan akademis” (*academic dependency*) yang dicetuskan oleh Syed Farid Alatas. Konsep ini menekankan bahwa pengetahuan Barat dipaksakan ke seluruh dunia. Karenanya, pengetahuan tersebut tetap tidak kontekstual serta tidak relevan. Para ilmuwan

ini dengan demikian menyebutkan adanya keperluan untuk membingkai sosiologi alternatif dari dalam narasi/kebudayaan setempat.

Teori lokal berargumen bahwa jika ilmu-ilmu sosial berkembang di Barat melalui suatu keterlibatan dengan sistem filosofisnya, maka hal yang sama dapat juga dilakukan melalui kebudayaan serta sistem filosofis lainnya. Teori ini berharap dapat memberikan suara epistemik kepada dirinya sendiri untuk menggantikan kekuatan suara epistemik Barat. Teori ini percaya bahwa ia dapat menciptakan asas/abstraksi yang peka terhadap sejarah dan kehidupan sosial lokal serta membantu merumuskan cara-cara “alternatif” untuk melakukan sosiologi di luar bahasa “sosiologi universal” sebagaimana dirumuskan oleh sosiologi Barat/Utara.

Ada tiga tren yang dapat diidentifikasi dalam perspektif ini. Tren pertama dielaborasi oleh Akiwowo Akinsola, seorang sosiolog Nigeria. Ia membenarkan bahwa sosiologi dapat dibangun di atas dongeng, mitos, serta pepatah masyarakatnya bersama dengan “hukum-hukum kearifan Afrika sejati.” Ia dan para rekannya menghimpun teori sosiologis yang diperahnya dari puisi suku Yoruba di Nigeria. Mereka berargumen bahwa prinsip-prinsip yang termuat dalam puisi ini memperlihatkan bahwa unit dari segenap kehidupan sosial adalah individu dan karena individu sebagai suatu keutuhan “diri jasmaniah membutuhkan kemitraan dari individu lainnya,” maka kehidupan komunitas yang didasarkan pada kepentingan bersama bermakna bagi keberadaan individu. Posisi ini telah dipertanyakan karena adanya masalah-masalah metodologi serta epistemik yang dikandungnya, seperti misalnya penggunaan kebudayaan rakyat untuk menganyam teori sosiologi, “kebenaran” dari terjemahan serta tafsirannya, serta apakah perumusannya dapat ditelaah melalui metode ilmiah.

Tren kedua dari kajian lokal mencoba menjawab pertanyaan terakhir—tentang kemampuan untuk menjawab pertanyaan melalui metode ilmiah—dengan mengusulkan bahwa ilmu pengetahuan Barat tidak perlu dikukuhkan sebagai satu-satunya yang ada di dunia. Karena mendukung suatu ilmu sosial otonom yang relevan sekaligus kritis, Syed Farid Alatas membingkai ulang persoalan teori lokal dengan mempertanyakan apakah kebudayaan yang khas serta epistemologinya dapat dimanfaatkan guna membangun kerja ilmiah kritis yang baru. Ia berpendapat bahwa sistem pengetahuan lokal, sebagaimana yang dimiliki Islam, di dalamnya memiliki kekritisian ilmiah yang memungkinkan telaah kerja empiris. Ia menekankan bahwa prinsip-prinsip ini dapat dipergunakan pula untuk membangun cara-cara dalam melakukan sosiologi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya adalah: bagaimana Islam menye-

diakan dasar metafisis serta epistemologis untuk membangun pengetahuan baru tanpa berkomitmen pada suatu sosiologi yang Islami atau suatu fisika yang Islami? Intervensi yang demikian tidak berarti seseorang harus meninggalkan ilmu pengetahuan, khususnya keterpakuannya terhadap cara berpikir yang kritis serta investigatif, melainkan justru memperluas bingkainya serta melibatkan konsep baru ihwal kekritisannya dari kebudayaan non-Barat.

Pendekatan ketiga terhadap kelokalan diajukan oleh kajian Linda Tuhiwai Smith yang juga berfokus pada ilmu pengetahuan Barat. Ia beranggapan bahwa mengganti praktik keilmuan Barat adalah hal yang penting dilakukan karena hal ini akan menjadikan para subjek menjadi objek telaahan. Ilmu pengetahuan Barat memaksakan “kebenaran” pada orang dan wilayah di seluruh dunia tanpa melibatkan diri dengan pengetahuan orang dalam itu sendiri. Ia menyarankan perlunya merumuskan kembali metodologi ilmu pengetahuan serta mengusulkan ilmu pengetahuan yang peka terhadap nilai kebudayaan dari individu, komunitas, serta orang-orang yang dikaji. Ia meminta para peneliti untuk merenungi cara-cara bagaimana mengguncang kekuasaan dari proses penelitian objektivis dan untuk mengintegrasikan suara dari kelompok terpinggirkan (*subaltern*)/masyarakat lokal ke dalam proses penelitian.

Ketiga tren ini menelaah praktik akademik di Selatan. Sebuah posisi yang lebih revolusioner kini muncul dari perspektif dekolonial yang mengikuti arahan Marx bahwa ilmu-ilmu sosial perlu mengubah dunia alih-alih sekadar merenunginya.

› **Perspektif dekolonial**

Teori/perspektif dekolonial—yang juga disebut program penelitian kolonialisme/ modernitas—merupakan gerakan intelektual yang berasal dari wilayah Amerika Latin. Teori ini berpijak pada kombinasi sejumlah perspektif, termasuk teori-teori ketergantungan, teologi pembebasan, serta pembuatan teori gerakan sosial yang mewakili pengalaman Amerika Latin. Bingkainya luas: teori ini berargumen tentang pentingnya mendorong kritik epistemik dan, dengan sendirinya, metodologis terhadap teori-teori modernitas Eropa sehingga posisi epistemik baru serta berbeda dapat mengemuka. Teori tersebut mengusulkan perumusan ulang ilmu-ilmu sosial melalui penciptaan asumsi-asumsi baru yang dapat memperluas pengkajian terhadap modernitas hingga ke “tapal batas pemikiran.”

Teori dekolonisasi berangkat dari pandangan bahwa kekeliruan utama dalam teori-teori modernitas kontemporer dan dalam sosiologi adalah penghapusan pengalaman kolonial dari bahasa teoretisnya. Teori tersebut berargumen bahwa ketiadaan kekasatmatahan ini telah menyebabkan teori modernitas kontemporer menjadi etnosentris. Teori ini menamakan etnosentrisme tersebut Erosentrisme (*Eurocentrism*). Bagi para dekolonialis Erosentrisme merupakan sebuah epistem yang melekat pada semua cabang ilmu-ilmu sosial dan terutama mengejewantah pada disiplin sejarah serta sosiologi. Tiga kategori menguntai bersama di posisi ini, yakni: “kolonialitas kekuasaan” (*coloniality of power*) yang diteorisasi oleh Anibal Quijano; “interioritas/ekterioritas” (*interiority/exteriority*) yang dikon-

sepsikan oleh Enrique Dussel; dan “perbedaan kolonial” (*colonial difference*) yang dicetuskan oleh Walter Dignolo. Ketiganya beririsan satu sama lain.

Kolonialitas kekuasaan, menurut Quijano, dibangun di atas dua mitos Eurosentris: evolusionisme dan dualisme. Di satu sisi, evolusionisme menata sejarah sebagai suatu narasi yang linear, yang bergerak dari tahapan primitif menuju modern. Linearitas ini, yang dikonsepsikan pada periode awal modernitas Eropa, telah dipaksakan dalam menafsirkan sejarah dunia non-Eropa. Dualisme merupakan suatu alat dan mitos lainnya yang dipergunakan oleh Erosentrisme untuk membedakan sejarah dan masyarakat Eropa dengan non-Eropa. Melalui dualisme, Erosentrisme membangun pengetahuan tentang yang lain sebagai oposisinya serta dalam skema biner. Melekat dalam skema biner ini adalah hierarki: ini mendudukkan sejarah serta masyarakat Eropa sebagai yang lebih unggul (karena merupakan yang pertama kali menciptakan modernitas) dan sisanya sebagai yang lebih rendah.

Kolonialitas kekuasaan berpandangan bahwa Erosentrisme merupakan teori-teori yang membenarkan kontrol terhadap: a) ekonomi melalui perampasan lahan, eksploitasi tenaga kerja, kontrol sumber daya alam; b) otoritas melalui lembaga tentara, polisi, serta kekuatan politik; c) gender dan seksualitas melalui keluarga dan sistem pendidikan; dan d) subjektivitas dan pengetahuan lewat elaborasi sistem-sistem epistemologi/pengetahuan.

Konsep perbedaan kolonial dari Walter Dignolo (pemilihan modernitas dari kolonialitas dan penggunaannya untuk memperdalam keterpilahan serta perbedaan dalam pengetahuan) melanggengkan permasalahan yang diciptakan “kolonialitas kekuasaan” dan mengelaborasinya sebagai suatu alat epistemik yang mengistimewakan ruang intelektual dan politis dari dan untuk orang-orang Eropa. Dignolo menekankan bahwa konsep ini membantu memahami objektivitas dari dunia kolonial dan orang-orangnya, subordinasi dari imajinasi serta pengetahuan mereka.

Enrique Dussel membingkai ulang mitos evolusionisme Quijano untuk memperlihatkan bahwa sejarah kontemporer diciptakan sebagai teori interioritas yang disarikan dari sejarah regional Eropa untuk membangun mitos bahwa sejarah berwatak universal dan linear. Ia menekankan bahwa apa yang diperlukan adalah suatu program penelitian tentang dan untuk modernitas sebagai teori ekterioritas, suatu cara untuk memandang dunia dari luar Eropa, dari suatu sudut pandang dekolonial. Apa yang dibutuhkan ialah untuk menata kembali asumsi-asumsi filosofis, sosial, serta historis kontemporer dalam ilmu sosial dan untuk menyajikan asumsi-asumsi alternatif yang didasarkan pada suara-suara mereka yang tidak terjajah. Di sini tujuannya sangatlah ambisius: yakni guna merombak epistem ilmu-ilmu sosial yang disusun pada akhir abad ke-18 dan mencetuskan agenda penelitian baru untuk merumuskan ulang tema, spesialisasi, serta pertanyaan-pertanyaan untuk membingkai ulang landasan ilmu-ilmu sosial. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Sujata Patel <patel.sujata09@gmail.com>

› Apakah (Di Manakah) Kami Bermakna?

Kilas Balik Sosiologi Polandia¹

oleh **Marta Bucholec**, Universitas Bonn, Jerman dan Universitas Warsawa, Polandia



Leon Petrażycki dan Florian Znaniecki, dua orang tokoh besar dalam sosiologi Polandia.

Sejjarah sosiologi di Polandia sejak awal ditandai oleh ketegangan antara dampak keterlibatan (*consequentiality*) internasional dan keterlibatan lokal. Ketegangan tersebut sulit untuk dinegosiasikan karena menyentuh fondasi mendalam identitas disiplin keilmuannya dan mengesawantah pada strategi-strategi penelitian, berteori, kelembagaan, hingga biografi.

Kukuhnya ketegangan tersebut untuk sebagian disebabkan oleh fakta bahwa sosiologi akademik di Polandia pada dasarnya merupakan sebuah produk impor. Meskipun terdapat banyak pemikiran sosial orisinal di bekas teritori Polandia pada akhir abad kedelapan belas dan kesembilan belas (Polandia sendiri belum berbentuk

negara di sebagian besar periode ini), pemikiran tersebut dianggap sebagai ilmu yang bersifat pribadi. Ketika proses pelembagaan sosiologi dimulai hampir pada waktu yang bersamaan di banyak negara, ilmu baru tersebut dengan cepat mulai mengembangkan beberapa corak yang khas. Hal ini ditandai oleh sirkulasi pengetahuan dan keterlibatan bersama dalam apa yang sering disebut sebagai tradisi sosiologi nasional. Secara retrospektif, nasionalisasi ilmu sosial mempersulit penilaian kontribusi penulis seperti Leon Petrażycki atau Ludwik Gumplowicz. Konsep-konsep mereka yang sangat murni sesuai dengan interaksi antara kepentingan kognitif lokal dengan politik dalam lingkungannya, tetapi mencerminkan pula partisipasi mereka dalam komunitas ilmiah transnasional. Di lain pihak,

dampak pemikiran para ilmuwan dari Eropa Tengah dan Timur pada perkembangan ilmu sosial secara keseluruhan dapat dikatakan cukup tinggi secara tidak berimbang justru karena rintangan yang menghalangi akses pada jaringan ilmiah imperium Eropa sebelum tahun 1918 relatif rendah.

Pengalaman ganda berupa kepentingan mapan terhadap jaringan ilmiah lokal maupun transnasional merupakan takdir para sosiolog Polandia awal yang mengenyam pendidikan di Barat, terutama Florian Znaniecki dan Stefan Czarnowski, yang aktivitasnya dikembangkan di negara-bangsa Polandia yang diciptakan ulang. Pada waktu itu, sosiologi Barat telah dijadikan universal: suatu ilmu pengetahuan baru, gaya berpikir baru, jalur karier baru, moda intelektual baru,

sekaligus mitra yang dihargai dalam perumusan kebijakan publik. Suatu insentif tambahan yang nyata dalam mempelajari ilmu baru ini adalah bahwa penyerapannya merawat suatu jalur komunikasi dengan Dunia Barat. Keseluruhan abad kesembilan belas dalam kebudayaan Polandia dapat dirangkum sebagai sebuah kisah pencarian kepemilikan yang tentunya menembus batasan lokalitas. Menjadi seorang sosiolog adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini.

Apabila generasi pertama sosiolog akademik Polandia di tahun 1920-an dan 1930-an dapat dengan mudah menerima universalitas sosiologi Barat sebagai suatu hal yang sudah lazim, bagi para penerus mereka kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Pada masa-masa kelam Perang Dunia II dan Stalinisme, hubungan dengan komunitas internasional terputus sehingga masalah kepemilikan dan dampak keterlibatan internasional yang bertentangan dengan parokialitas dan marginalitas muncul dengan sangat tajam. Ketika sosiologi Polandia dibuka kembali pada dunia di era 1950-an, strategi kepemilikan harus disempurnakan. Untungnya, masyarakat Polandia di bawah sosialisme ternyata memukau bagi Barat, dan menjembatani kedua dunia menjadi sebuah misi bagi para sosiolog—ilmuwan sosial yang paling kosmopolitan dan berorientasi pada Barat—yang menikmati cukup banyak kebebasan dibandingkan dengan para ilmuwan di negara-negara Blok Timur lainnya. Selama lebih dari tiga dekade, resep terbaik untuk menjadi bagian dari sosiologi adalah dengan cara eklektik dalam teori (dengan pengaruh kuat dari Marxisme Polandia, jauh dari standar-standar Soviet) dan berorientasi lokal dalam penelitian. Barat akan siap memaafkan bahasa Inggris yang kikuk, tulisan akademis yang aneh, kesenjangan dalam perumusan teoretis, dan metodologinya yang seringkali agak kasar, berhubung pada masa-masa tersebut Dunia Barat sangat menyambut kehadiran Timur Liar yang ternyata beradab. Jika pada abad kedua puluh sosiologi Polandia pernah diorientalisasikan sebagai

na dimaksudkan oleh Edward Said, mungkin di masa itulah hal tersebut terjadi. Di sisi lain, beberapa sosiolog, misalnya Stanislaw Ossowski, berhasil mempraktikkan keterampilan untuk berpijak di dua dunia pada saat yang bersamaan.

Kecenderungan ini—saat seseorang yang merupakan sosiolog Polandia dapat secara otomatis mengklaim validitas universal dan dampak keterlibatan internasional—mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Hal ini disebabkan oleh karena lokalitas khas Polandia, yang ditandai oleh “Solidarność,” jelas merupakan hal yang secara universal penting. Hal ini pun sangat menginspirasi secara teoretis sekaligus menantang secara empiris. Namun demikian, efek kebaruan ini usai dengan cepat. Untungnya, dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, peluang baru untuk mengklaim dampak keterlibatan internasional hadir melalui transformasi sistemik: setelah tahun 1989, semua orang tertarik padanya, meskipun Polandia hanyalah bagian dari negara-negara pascasosialis lain, bukan suatu tipe masyarakat yang khas.

Sebetulnya sosiologi Polandia perlu bersyukur atas terjadinya kemunduran demokrasi yang baru-baru terjadi di negaranya. Tahun 2015 menghidupkan kembali layunya minat masyarakat terhadap iklim transformasi di Polandia. Di luar negeri, kami diminta menjawab pertanyaan mengenai apa yang salah setelah tahun 1989, dan dengan menjawab pertanyaan yang pada intinya bersifat lokal ini, kami dapat berkontribusi lagi terhadap perdebatan umum mengenai krisis demokrasi dan supremasi hukum, perang kebudayaan, serta kontra-revolusi populis. Lokalitas kami sekali lagi bernilai bagi orang banyak.

Namun demikian, mari kita asumsikan bahwa kemunduran yang bersifat antidemokratis tersebut dapat ditangani dan stabilitas politik dipulihkan, dan bahwa masyarakat Polandia memasuki fase yang tampaknya telah dicapai setelah 2007: stabilisasi yang tidak menentu. Apa yang kemudian

akan kita lakukan? Sosiologi Polandia, hingga saat ini, untuk sebagian besar merupakan suatu ilmu mengenai masyarakat yang menyatakan diri sebagai masyarakat yang abnormal, suatu penelitian yang menganalisis penyimpangan yang nyata maupun yang imajiner. Kami telah dibiasakan dengan pandangan mengenai terkecualinya (*exceptionalism*) Polandia, tetapi suatu hal yang benar-benar kami harapkan adalah bahwa masyarakat kami tidak lagi menjadi sebuah pengecualian. Namun hal ini berarti bahwa kami harus menemukan cara-cara lain untuk mengatasi tuntutan yang sudah berlangsung selama seratus tahun untuk bersifat penting secara universal.

Tantangan ini bukan hal sepele. Tekanan masa lalu pada dampak keterlibatan internasional yang berakar pada dilema etis kaum intelektual abad kesembilan belas telah memperoleh dukungan tak terduga dari manajemen sains dan pendidikan tinggi yang neoliberal, yang diambil alih secara halus oleh pemerintah nasional-konservatif masa kini dari para pendahulunya yang liberal. Dalam buku saya, *Sociology in Poland: To Be Continued?* (2016), saya berpendapat bahwa mengatasi ketegangan antara dampak keterlibatan internasional dan keterlibatan lokal adalah satu-satunya cara bagi sosiologi Polandia untuk bertahan hidup dan bermakna. Perlawanan terhadap daya tarik imbalan dampak keterlibatan internasional universal yang kadang-kadang bersifat semu adalah suatu cara yang sama pentingnya dengan suatu kesadaran yang tenang bahwa masyarakat kami tidaklah penting bagi kami karena masyarakat tersebut unik bagi orang lain. ■

¹ Penulis memperoleh dukungan dari Pusat Sains Nasional Polandia.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Marta Bucholc <mbucholc@uni-bonn.de>

› Pekerja Muda yang Rawan

di Polandia dan Jerman

oleh **Jan Czarzasty** dan **Juliusz Gardawski**, Sekolah Ekonomi Warszawa, Polandia, **Adam Mrozowicki**, Universitas Wroc aw, Polandia dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Gerakan Buruh (RC44), dan **Vera Trappmann**, Sekolah Bisnis Universitas Leeds, Inggris Raya.



Ada banyak bukti bahwa generasi muda di seluruh Eropa mengalami peningkatan ketidakpastian dalam kehidupan mereka yang disebabkan oleh pertumbuhan pekerjaan sementara dan paruh-waktu yang bersifat terpaksa (*involuntary part-time*), penurunan kepadatan serikat pekerja [rasio perbandingan jumlah anggota se-

rikat dengan jumlah tenaga kerja secara nasional], serta sulitnya transisi dari sekolah ke dunia kerja. Proyek PREWORK berfokus pada dua negara Eropa, yaitu Jerman dan Polandia. Jerman mewakili negara dengan ekonomi pasar yang terkoordinasi (disingkat CME, seperti yang disebutkan Hall dan Soskice) yang secara tradisional dikenal karena memberikan keamanan kerja yang

secara kelembagaan terjamin bagi para pekerja. Namun, reformasi pasar tenaga kerja di tahun 2000-an juga berkontribusi pada penyebaran pekerjaan-pekerjaan alih daya (*agency work*) [atau *outsourcing*], peningkatan pekerjaan tidak tetap (*temporary work*), dualisasi pasar tenaga kerja, stagnasi upah, dan perundingan konsesi (*concession bargaining*) yang dilakukan oleh



serikat pekerja. Di Polandia, yang lebih dekat dengan ekonomi pasar liberal (LME), gelombang prekariatisasi (*precarization*) ketenagakerjaan yang terjadi baru-baru ini berasal dari perubahan hukum yang ditujukan untuk [mendorong] fleksibilisasi pasar tenaga kerja.

Di kedua negara, kaum muda dirugikan dengan keberadaan mereka dalam pasar tenaga kerja yang memiliki tingkat pekerjaan tidak-tetap yang tinggi (di Polandia), peningkatan risiko kemiskinan dan memperoleh pekerjaan yang memiskinkan (di Jerman), dan risiko eksklusi ekonomi yang lebih besar di kedua negara. Kami berasumsi bahwa kerawanan (*precarity*) lebih lanjut yang dialami kaum muda tersebut dapat terlihat dalam lapangan kerja yang tidak pasti, berupa; hilangnya upah layak, keterikatan sosial (*social embeddedness*), dan hak-hak sosial yang penuh; serta perasaan subyektif kerawanan yang didasari oleh hilangnya pengakuan dan integrasi sosial. Namun, terlepas dari perkembangan negatif ini, mobilisasi kolektif kaum muda untuk melawan kerawanan [masih] terbatas, dan kepuasan mereka terhadap kehidupan secara keseluruhan tetap cukup tinggi. Ini mendorong pada pertanyaan: apa hubungan antara kondisi kerja yang semakin rawan (*precarious*) dengan kesadaran sosial dan strategi hidup kaum muda? Apakah kerawanan dianggap sebagai *masalah* oleh para pekerja muda di Polandia dan Jerman? Atau apakah mereka melihatnya sebagai suatu *norma*, bagian yang diharapkan dari lingkungan kerja mereka di mana seorang individu perlu beradaptasi?

PREWORK berusaha mengajukan jawaban melalui dua tingkatan: 1) dengan meneliti dampak kondisi kerja dan hidup yang tidak stabil pada berbagai dimensi kesadaran sosioekonomi pekerja yang rawan melalui survei-survei CATI di Polandia dan Jerman dengan mengambil sampel acak dalam jumlah sangat

besar (N = 1.000 di setiap negara) dari orang-orang yang berusia 18-30 tahun; dan 2) dengan menguji hubungan antara meningkatnya pekerjaan rawan dan strategi hidup/pola karir kaum muda serta bentuk mobilisasi kolektif mereka (dan demobilisasi), melalui lebih dari 120 wawancara narasi biografis dengan para pekerja tidak-tetap muda di Polandia (60) dan Jerman (60), yang berusia 18-35 tahun, yang sedang memiliki pekerjaan non-standar, menganggur, atau mengikuti bentuk-bentuk VET (pelatihan kejuruan) yang rawan.

Studi ini masih berlangsung tetapi beberapa pengamatan tentatif dapat diajukan. Penelitian kuantitatif tersebut menyoroti persepsi subyektif tentang kerawanan: di mana 48,8% dari pekerja muda Polandia dan 31% pekerja muda Jerman mengaku telah bekerja dalam kondisi rawan, yang didefinisikan sebagai pendapatan yang rendah atau bekerja pada kontrak jangka pendek. Namun, kesadaran ekonomi kaum muda di kedua negara bervariasi.

Bertolak belakang dengan harapan kami, status yang rawan dari kaum muda Polandia dan Jerman tidak memiliki dampak signifikan kepada visi normatif mereka tentang ekonomi. Kami berasumsi bahwa memiliki kontrak tidak permanen akan menghasilkan dukungan yang lebih kuat untuk intervensi negara dalam ekonomi dan egaliterisme. Indikator yang digunakan dalam penelitian kami terdiri dari lima belas variabel. Di Polandia, hanya lima variabel yang menunjukkan perbedaan statistik antara tanggapan orang yang mempunyai kontrak permanen dan orang yang memiliki kontrak sementara. Lebih jauh lagi, karyawan dengan kontrak non-permanen menunjukkan sikap yang lebih liberal dalam beberapa dimensi daripada mereka yang memiliki kontrak permanen. Di Jerman, perbedaannya lebih jelas. Orang dengan kontrak non-permanen sedikit kurang men-

dukung prinsip etatisme (33,8% vs. 24,8%), tetapi sedikit lebih condong ke arah egaliterisme sosial (69,1% vs. 65% masing-masing). Pandangan ekonomi dari kaum muda Polandia merupakan kombinasi dari dukungan kuat terhadap "kapitalisme domestik" (preferensi terhadap perusahaan-perusahaan Polandia dan pengaturan ekonomi oleh negara) dengan kecenderungan ultraliberal yang relatif kuat, yaitu: 53,4% orang Polandia yang diwawancarai lebih memilih [tunjangan] pensiun hari tua yang sukarela daripada yang wajib dibandingkan hanya 12,3% orang Jerman. Kesadaran ekonomi kaum muda Jerman lebih condong kepada ekonomi pasar terkoordinasi (CME), dengan dukungan mereka terhadap sistem pengambilan keputusan bersama (*co-determination*) di tempat kerja, kompensasi atas perbedaan pendapatan melalui kebijakan pajak, dan kebebasan pekerja untuk berpindah kerja di Eropa (didukung oleh 88,7% orang Jerman yang diwawancarai, dibandingkan dengan 66,6% di Polandia). Pandangan Polandia muda lebih dekat dengan ekonomi pasar liberal (LME), meskipun ada beberapa ketidakkonsistenan yang mencolok.

Penelitian kualitatif memberi kita wawasan lebih jauh ke dalam pembingkai biografi tentang pengalaman yang terkait dengan pekerjaan. Kami merekonstruksi enam jenis perbedaan strategi tentang kehidupan yang berhubungan dengan pekerjaan, yang secara beragam terkait dengan bentuk-bentuk penanggulangan terhadap kerawanan. Bagi "para buruh"—pekerja kerah biru rawan yang mendambakan pekerjaan yang stabil dan dapat diprediksi—fleksibilitas pekerjaan tidak diterima secara normatif, tetapi disesuaikan dan diatasi dengan cara mencari stabilitas di bidang lain, wilayah-wilayah kehidupan di luar kerja maupun keterbatasan-keterbatasan diri dalam meraih cita-cita. "Para profesional," biasanya mereka yang merupakan pekerja kerah

putih, bercita-cita untuk pekerjaan yang tetap, penuh waktu dengan pendapatan yang lebih tinggi dan prospek karir yang bagus, memilih antara melegitimasi kerawanan sebagai pengalaman yang diperlukan terkait dengan transisi ke pasar kerja atau, terutama pada kohor yang lebih tua, mengkritiknya karena [kerawanan tersebut] memblokir proyek-proyek kehidupan individual. Sebuah pendekatan yang berbeda diperlihatkan oleh "para kreatif," yaitu mereka yang sering melakukan pekerjaan berbasis proyek di LSM, pekerjaan-pekerjaan kreatif dan sektor budaya, yang melihat fleksibilitas sebagai harga yang perlu dibayar untuk memperoleh kebebasan dari rutinitas perusahaan atau pekerjaan pabrik. Bagi para "bricoleurs" (pengrajin), yang bereksperimen dengan berbagai proyek kewirausahaan, kerawanan dianggap sebagai harga yang perlu dibayar untuk memperoleh kemandirian dari ketergantungan mereka terhadap majikan, keluarga, atau dukungan negara. Akhirnya,

ada jenis "yang terblokir", yaitu mereka yang kritis terhadap kerawanan tetapi tidak secara aktif meniadakannya karena masalah psikologis dan/atau menolak risiko kehidupan yang harus dibayar dalam memperoleh keamanan; dan jenis "yang menarik diri", yaitu mereka yang dicirikan oleh keberjarakan informan dari dunia pekerjaan rutin yang telah kehilangan—atau tidak pernah memperoleh—arti kehidupan.

Penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan mengungkapkan bahwa kaum muda di kedua negara merasa rawan tetapi biasanya tidak mengkritik atau menantang kerawanan mereka. Sebagian besar kaum muda tampaknya telah terbiasa dengan kerawanan, melihatnya sebagai hal sementara baik karena tahap kehidupan mereka atau karena investasi yang mereka tanam yang akan berbuah pada akhirnya. Kritik yang dikemukakan lemah dan jarang mengarah pada mobilisasi politik atau serikat pekerja. Dengan

kata lain, kita menyaksikan "normalisasi" kerawanan yang terus berlangsung, yang kemudian diperlakukan oleh banyak kaum muda sebagai kondisi alamiah yang semu. ■

¹ Artikel ini dipersiapkan dalam proyek PREWORK "Pekerja muda yang rawan di Polandia dan Jerman: sebuah kajian perbandingan sosiologis tentang kondisi kerja dan kehidupan, kesadaran sosial dan keterlibatan kewargaan" yang didanai oleh Pusat Ilmu Pengetahuan Nasional di Polandia dan Yayasan Penelitian Jerman (DFG). Tim peneliti di Jerman terdiri dari Vera Trappmann, Jule-Marie Lorenzen, Alexandra Seehaus, Denis Neumann. Tim Polandia terdiri dari Juliusz Gardawski, Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty, Magdalena Andrejczuk, Aleksandra Drabina-Rózewicz, Jacek Burski, Mateusz Karolak, Agata Krasowska.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Adam Mrozowicki (penulis utama)
<adam.mrozowicki@uwr.edu.pl>,
Jan Czarzasty <jczarz@sgh.waw.pl>
Juliusz Gardawski <jgarda@sgh.waw.pl>
Vera Trappmann <V.Trappmann@leeds.ac.uk>

› Mengapa Rakyat Memilih Partai Sayap Kanan?

oleh **Katarzyna Dębska, Sara Herézynska, Justyna Kościńska,** dan **Kamil Trepka,** Universitas Warsawa, Polandia

Meskipun memperoleh dukungan rakyat, pemerintah PiS juga memicu protes yang meluas. Flickr/Platforma Obywatelska RP. Hak Cipta tertentu.

Sebagaimana telah dijelaskan Arlie Hochschild dalam *Dialog Global* pada tahun 2016, para sosiolog perlu mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam judul artikel ini, tidak hanya dalam proses ekonomi dan munculnya sentimen sosial, tetapi juga dalam biografi para pendukung partai-partai tersebut. Intuisi yang sama mendorong tim peneliti kami (yang, di samping para penulis naskah ini, terdiri pula atas Prof. Maciej Gdula sebagai peneliti utama, beserta Stanisław Chankowski, Maja Głowacka, Zofia Sikorska, dan Mikołaj Syska) untuk menjajaki penyebab membesarnya dukungan untuk Partai Hukum dan Keadilan (*Law and Justice, PiS*), partai yang berkuasa di Polandia sejak tahun 2015. Hukum dan Keadilan dianggap sebagai suatu partai konservatif secara sosial: konservatif dalam nilai-nilai dan etatis [mendukung kontrol total negara atas warga] pada dimensi ekonomi. Meskipun pemerintah anti Uni Eropa (*Eurosceptic*) dan nasionalis ini telah menghadapi banyak kritik baik dari Uni Eropa dan bagian yang lebih liberal dari masyarakat Polandia, dukungannya telah terus berkembang: dalam jajak pendapat yang dilakukan pada akhir tahun 2017 dukungan bagi partai ini mencapai 50% suara.

› Memperkenalkan penelitian kami

Penelitian kami dilakukan di sebuah kota kabupaten di Polandia tengah yang kami juluki “Miastko” (“kota kecil” dalam bahasa Polandia). Partai yang berkuasa menerima hampir 50% suara di Miastko pada tahun 2015, dibandingkan dengan 37,6% secara nasional. Laporan kami diterbitkan sebagai “Perubahan yang baik di Miastko:



otoriterisme Baru dalam politik Polandia dari perspektif kota kecil.” Para politisi PiS telah menggunakan gagasan “perubahan yang baik” sejak awal kampanye presiden tahun 2015.

Untuk menjajaki keyakinan politik para pendukung PiS, kami melakukan dua wawancara dengan masing-masing dari 30 responden—penduduk Miastko: wawancara pertama adalah mengenai biografi, dan yang kedua menyangkut pandangan mereka tentang isu-isu seperti aborsi atau kebijakan negara kesejahteraan. Metodologi yang kami gunakan bersumber dari teori perbedaan kelas oleh Pierre Bourdieu dan adaptasinya di Polandia oleh Maciej Gdula dan Przemysław Sadura. Kami membagi responden kami menjadi dua kelompok: kelas pekerja dan kelas menengah. Penting untuk dicatat bahwa kami tidak melakukan wawancara dengan mereka yang disebut “pecundang transformasi,” sebuah istilah untuk merujuk pada orang-orang yang bernasib buruk di bawah perubahan kapitalistik setelah tahun 1989.

› Dua topik yang sangat diperdebatkan: aborsi dan pengungsi

Kelas pekerja yang diwawancarai pada umumnya menentang larangan total terhadap aborsi. Perempuan kelas pekerja yang lebih tua lebih menyukai liberalisasi terhadap undang-undang anti-aborsi yang berlaku. Perempuan kelas menengah biasanya berpenda-

pat perlunya kebebasan memilih bagi perempuan dan menekankan adanya beban atas membesarkan anak yang sakit. Terlepas dari dukungan signifikan beberapa orang yang diwawancarai terhadap kemungkinan liberalisasi peraturan anti-aborsi, nampaknya terdapat juga pendapat kuat yang menentang aborsi pada umumnya.

Sebagian besar yang kami wawancarai menentang menerima pengungsi di Polandia. Kelas pekerja yang diwawancarai berpendapat bahwa para pengungsi tidak akan mau bekerja dan akan mengharapkan jaminan sosial. Mereka menyoroti bahaya potensial kemunculan para pengungsi terhadap stabilitas sistem perawatan sosial Polandia dan ketidakadilan yang muncul dari jaminan yang dapat mereka peroleh. Mereka umumnya menghubungkan situasi pengungsi dengan kondisi perang, dan biasanya mengakui bahwa para korban harus menerima bantuan, namun menolak membantu mereka di wilayah Polandia. Hanya dua orang yang berpendapat bahwa menerima pengungsi ke dalam masyarakat Polandia tidak akan merugikan siapapun—karena sedikitnya jumlah yang diusulkan untuk diterima oleh pemerintah terdahulu.

Kelas menengah yang diwawancarai lebih sering mengklaim bahwa para pendatang mewakili budaya yang berbeda dan tidak mau menerima aturan budaya Polandia dan Eropa. Solidaritas terhadap mereka yang melarikan

diri dari perang, kesamaan pengalaman perang, dan ketidakstabilan politik masyarakat Polandia sangat jarang dirujuk. Menurut kelas menengah yang diwawancarai, pengungsi harus tetap tinggal “di mana mereka berada, di mana mereka memiliki tempat mereka sendiri.” Untuk beberapa orang, gagasan tentang Eropa didefinisikan oleh eksklusivitas; perlindungan terhadap “kemurnian” Eropa menuntut bahwa para pengungsi—yang hanya diidentifikasi berdasar religiusitas dan latar belakang etnis mereka—harus ditinggalkan di luar. Sikap untuk menata dan memberihkan perbatasan muncul dalam suatu solusi dari salah seorang perempuan kelas menengah yang kami wawancarai: jika para pengungsi perlu berada di Polandia, mereka harus dipisahkan dari masyarakat Polandia.

› **Penghancuran institusi supremasi hukum yang demokratis**

Pada bulan Desember 2015, pemerintah mulai menghalangi pekerjaan *Constitutional Tribunal* (Tribunal Konstitusi) yang dimandatkan untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi Polandia. Pemerintah terdahulu telah memilih lima orang hakim ke Tribunal Konstitusi pada bulan September 2015, hanya satu bulan sebelum pemilihan legislatif. Mayoritas parlemen pada waktu itu, sebuah aliansi dari *Civic Platform* (Platform Kewarganegaraan) yang konservatif-liberal dan Partai Petani, memiliki hak untuk memilih tiga hakim, tetapi memilih lima orang. Terlepas dari kenyataan bahwa Tribunal mempertahankan pemilihan tiga hakim (yang dipilih secara hukum) dan membatalkan pemilihan dua hakim (yang dipilih secara ilegal), parlemen baru yang didominasi *PiS* menominasikan lima orang hakim baru dan menghentikan penerbitan keputusan Tribunal. Sumpah jabatan hakim yang baru oleh Presiden Andrzej Duda tidak hanya menyebabkan krisis konstitusional, tetapi juga demonstrasi jalanan di Warsawa dan kota-kota besar lainnya di Polandia. Masalah kabsahan langkah-langkah pemerintah terhadap Mahkamah Konstitusi tidak terbagi menurut garis kelas, melainkan garis partisan: pendukung *PiS* mendukung tindakan partai tersebut serta mengklaim bahwa tindakan tersebut memulihkan “pluralitas” ke sebuah Tribunal yang katanya didominasi Platform Kewarganegaraan; bagi lawan-lawannya, tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu serangan terhadap demokrasi dan upaya yang

berhasil untuk menanggulangi kontrol konstitusional atas pemerintah.

› **Kebijakan sosial *PiS*: program “Keluarga 500+”**

Program “Keluarga 500+” (*Family 500+*) diperkenalkan pada bulan April 2016 sebagai kebijakan sosial unggulan pemerintah *PiS*. Ini jelas merupakan salah satu langkah politik yang paling penting. Program ini adalah suatu program tunjangan anak universal; setiap keluarga menerima 500 zlotys (sekitar 120 Euro) untuk anak kedua dan ketiga (keluarga miskin dapat menerima uang juga untuk anak pertama). Implementasinya menandai perubahan signifikan di Polandia pascakomunis: ini adalah pertama kalinya sejak 1989 bahwa negara Polandia telah menerapkan suatu upaya redistribusi berskala besar yang menguntungkan baik kelas menengah maupun kelas pekerja.

Sebagian besar peserta mendukung implementasi tunjangan anak, kecuali beberapa anggota kelas menengah dari oposisi liberal yang menganggapnya sebagai suatu bentuk “membeli suara.” Manfaat program tersebut disukai oleh mayoritas kelas menengah yang diwawancarai, yang menganggap diterapkannya hal tersebut sebagai suatu simbol kekuatan baru negara. Pembayaran tunjangan anak tidak dilihat sebagai sesuatu yang berlebihan, melainkan sebagai suatu tindakan ukuran “normal” khas yang dijumpai pada negara-negara Barat yang berkembang dengan baik, dan suatu tanda bahwa Polandia bergabung dengan mereka. Peserta kelas pekerja juga mendukung tunjangan anak, meskipun sebagian besar dari mereka juga menyatakan dukungan untuk pandangan bahwa otoritas lokal harus mengontrol pengeluaran sejumlah penerima bantuan.

› **Penyebab munculnya dukungan terhadap *PiS* berlapis majemuk**

Hukum dan Keadilan mewakili suatu model baru dalam memerintah dengan memunculkan suatu program redistributif. Penelitian kami menemukan bahwa para pendukung *PiS* ternyata jauh lebih terdiferensiasi daripada yang diantisipasi oleh opini publik. Dalam artikel ini, kami mencoba untuk menjajaki apa yang merupakan perbedaan-perbedaan sosialnya dan faktor apa saja yang dapat kami kaitkan dengan meningkatnya partai-partai sayap kanan.

Penelitian kami menunjukkan bahwa kemunculan dukungan untuk *PiS*, tidak

saja dipicu karena adanya dukungan finansial untuk orang miskin. Sebaliknya, program redistribusi tersebut berhasil karena tindakan-tindakannya menarik berbagai kebutuhan dan nilai dari semua kelas. Politisi *PiS* menanggapi kebutuhan kelas pekerja akan martabat dan pengakuan sosial dengan mengkritik konsumsi tanpa batas dari para mantan “elit” yang menggunakan dana publik. Mereka juga membicarakan watak kelas menengah yang mendambakan kedaulatan dan ketertiban umum. Studi kami mengungkapkan suatu pola yang sangat menarik: opini dan deklarasi politik tidak selalu tumpang tindih dengan pengalaman pribadi orang yang diwawancarai.

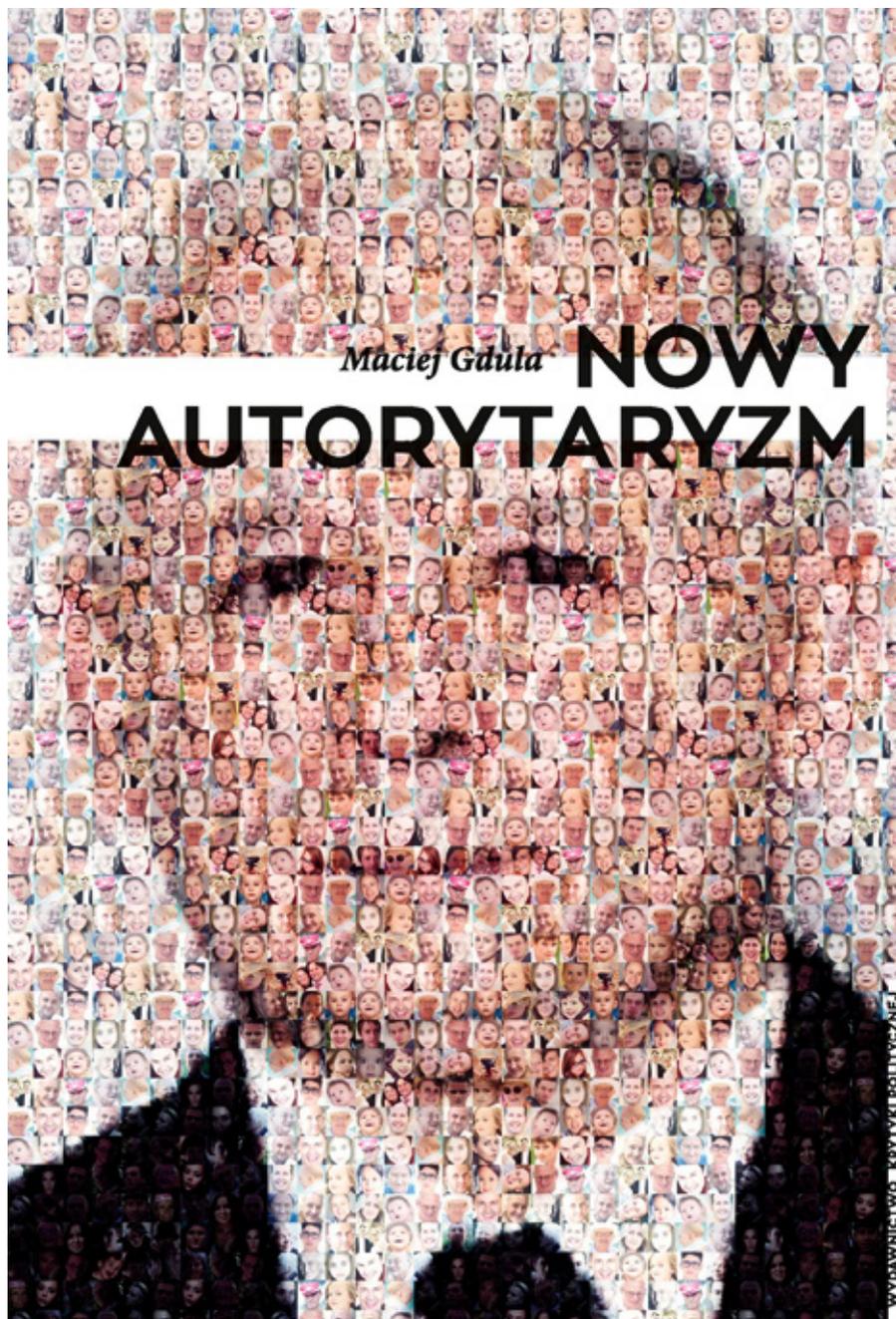
Pada saat yang bersamaan, *PiS* telah mulai menghancurkan lembaga-lembaga demokratis (seperti Tribunal Konstitusi), kesemuanya dengan mengatasmakan demokrasi dan “perubahan yang baik.” Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengikut *PiS* menganggap diri mereka “demokrat,” tetapi menolak bentuk liberalnya yang pada intinya didasarkan pada pembatasan diri. Maciej Gdula menyebut fenomena baru ini sebagai “otoriterisme baru.” Menurut Gdula, kita sekarang mengamati sebuah “otoriterisme baru” yang ditandai dengan perubahan radikal terhadap ruang publik (didominasi oleh Internet, bukan oleh surat kabar seperti di masa lalu) dan suatu hubungan khusus antara pemilih dan pemimpin partai yang berkuasa.

Hasil penelitian kami mengkonfirmasi bahwa penjelasan yang berlaku tentang keberhasilan partai-partai sayap kanan telah habis. Temuan kami mendapat perhatian publik yang sangat besar dan memicu debat publik yang luas yang diikuti baik intelektual sayap kiri maupun kanan, yang terlibat dalam diskusi mengenai perpecahan dalam masyarakat Polandia. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
 Katarzyna Dębska <k.debska@is.uw.edu.pl>
 Sara Herczyńska <sara.herczynska@gmail.com>
 Justyna Kościńska <j.koscinska@is.uw.edu.pl>
 Kamil Trepka <k.trepka@is.uw.edu.pl>

› Prospek bagi Sosiologi dalam Ranah Publik yang Baru

oleh **Maciej Gdula**, Universitas Warsawa, Polandia



Otoriterisme Baru Gdula adalah suatu contoh yang baik mengenai Sosiologi Publik.

Pada bulan November 2017, dua tahun telah berlalu sejak berlangsungnya pemilihan umum yang memungkinkan partai Hukum dan Keadilan (*Law and Justice party, PiS*) untuk membentuk pemerintahnya sendiri. Meskipun selama dua tahun tersebut banyak peraturan demokrasi liberal telah dilanggar, lebih dari 40% para pemilih masih mendukung pemerintah. Pada titik inilah laporan saya "Perubahan yang baik di Miastko: Neo-otoriterisme dalam politik Polandia dari perspektif sebuah kota kecil" diterbitkan.

Laporan ini, yang didasarkan pada penelitian di suatu kota kecil yang terletak di Polandia tengah—Miastko—memicu suatu diskusi yang hangat, dalam mana wartawan, politisi dan ilmuwan ikut serta selama beberapa pekan. Beberapa di antara konsep dan penafsirannya telah menjadi butir rujukan yang konstan dalam perdebatan mengenai politik dan masyarakat. Namun, alih-alih merayakan keberhasilan dari laporan ini, saya ingin memikirkan mengenai kondisi-kondisi sosial bagi kemungkinannya. Hal ini dapat menjadi penting dalam memikirkan ulang strategi bagi kehadiran sosiologi di ranah publik dan untuk memperkuat perannya, bukan hanya

dalam mendeskripsikan tetapi juga dalam mempengaruhi proses sosial. Meskipun saya terutama merujuk pada konteks Polandia, namun hal ini tidak merupakan hal yang unik dalam proses-proses yang berlangsung di Polandia.

› Suatu ranah publik yang baru

Untuk merefleksikan ruang lingkup sosiologi untuk meningkatkan dampaknya pada debat publik orang harus memperhitungkan perubahan terkini di ranah publik. Secara singkat, ini terdiri atas transisi dari dominasi pers ke hegemoni Internet. Ranah publik pers—setidaknya dalam hubungannya dengan politik—diorganisasi seputar pers, dan “para perantara budaya”—wartawan, para ahli dan politisi—memainkan suatu peran penting dalam debat publik. Penyebaran Internet telah memukul pers cetak, baik dalam artian kekuasaan ekonomi maupun simbolis. Di Polandia proses ini berlangsung dengan cepat dan dramatis. Antara 2005 and 2017, misalnya, surat kabar terbesar, *Gazeta Wyborcza*, kehilangan 75% pembacanya

Dalam ranah publik yang didominasi oleh Internet, terdapat penyebaran yang lebih besar dalam produksi isi. Ini ditangani oleh *webcast* [siaran media melalui Internet] yang besar, situs web yang lebih kecil, maupun produsen tunggal seperti para pengguna *YouTube* yang sering berhasil meraih khalayak yang besar. Persaingan antara para produsen ini untuk meraih perhatian sosial telah menjadi semakin ketat, dengan titik berat pada kecepatan dalam bereaksi, dan konflik, skandal, dan moralitas yang lebih besar.

› Kelemahan perantara dan sosiologi

Melemahnya hambatan untuk dapat masuk ke ranah publik berakibat pada penyebaran informasi palsu dan meningkatnya penyebaran wacana yang dengan sengaja melanggar akuntabilitas dalam hal rujukan ke kebenaran, sehingga memunculkan

komsep “pascakebenaran” (*post-truth*). Persaingan yang ganas untuk meraih perhatian publik telah mengusur jurnalisme yang berlandaskan proses pengumpulan bahan yang lebih lama dan produksi teks yang lebih canggih. Cara untuk meraih keberadaan banyak media adalah dengan menciptakan suatu khalayak yang berkaitan dengan identitas, yang terhubung dengan medium oleh suatu rasa keunggulan moral dan partisipasi yang tidak terlalu terkait dengan diskusi mengenai isu publik melainkan dengan suatu perjuangan peradaban.

Politik dan diskusi mengenai masalah publik juga menyesuaikan diri dengan kondisi ini dan para politisi menjadi “kaum militan media” yang mewakili pandangan radikal dan menyiapkan pernyataan yang dapat diklik (*clickable*).

Khalayak berpartisipasi dalam komunikasi cepat, agresif, dan moral, namun masih ada ruang bagi pengetahuan yang berhubungan dengan isu publik yang penting dan pada waktu yang bersamaan menghadapi mereka dengan hasil penelitian. Persaingan yang sengit antara para produsen berarti bahwa debat publik cenderung disterilisasi dan bergerak dalam ruang lingkup suatu komentar yang cepat. Jurnalisme tradisional kehabisan waktu dan dana. Dalam situasi ini, pengetahuan sosiologi yang menawarkan suatu penafsiran yang baru mengenai realitas memperoleh perhatian dan tanggapan yang besar, mempengaruhi arah debat publik.

› Melaksanakan sosiologi yang berdampak

Apa patokannya agar dapat menciptakan pengetahuan seperti itu? Atas dasar laporan mengenai Miastko dan penerimaan terhadapnya, saya akan mengambil risiko untuk merumuskan beberapa tesis.

Pertama-tama, momentum munculnya teks merupakan hal penting. Di Polandia, laporan mengenai sumber dukungan bagi *PiS* muncul pada suatu saat di kala beberapa di antara

penjelasan yang digunakan menjadi semakin kurang meyakinkan. Misalnya, pandangan umum ialah bahwa walaupun *PiS* berjanji untuk membuat perhitungan dengan kaum elite, mereka sendiri menciptakan elite yang baru, dengan kecenderungan untuk melakukan korupsi, yang seharusnya menghasilkan turunnya dukungan karena telah mengkhianati cita-citanya. Sementara itu, hal tersebut tidak terjadi dan *PiS* tetap menikmati dukungan 40% dari penduduk. Laporan menjelaskan hal ini dengan gagasan mengenai neo-otoriterisme yang, bersama-sama dengan isu-isu lain, menanggapi peran seorang pemimpin dalam mengendalikan kaum elite mereka sendiri dan menjaga arah perubahan politik.

Agar studi ini berdampak, sinkronisasi dengan proses sosial yang sedang berlangsung merupakan hal yang penting. Dengan sendirinya hal ini tidak seluruhnya tergantung pada para so-siolog namun kita tidak dapat mengabaikan pertanyaan mengenai kecepatan produksi. Lajunya harus jauh lebih cepat daripada produksi akademik tradisional agar terkait dengan isu-isu yang kini relevan bagi khalayak yang lebih luas. Untuk memperdalam penelitian terhadap para pendukung *PiS* idealnya dilaksanakan penelitian tambahan di berbagai lokasi, menambah jumlah wawancara, dan mengkajinya secara lebih mendalam. Masalahnya ialah bahwa hasil dari upaya demikian dapat diperoleh, misalnya, setelah pemilihan umum berikutnya, di kala hasil tersebut hanya akan menjadi sejarah.

Isu penting kedua ialah hubungan dengan pengetahuan akal sehat. Wacana akademik telah menjadi semakin kompleks, dan masalah penelitian dan kesimpulannya dikonstruksikan dan disajikan dengan cara-cara yang merupakan tantangan bahkan bagi pembaca yang berpendidikan. Di kala mengkonstruksikan pengetahuan yang dimaksudkan untuk dapat membawa suatu dampak sosial, kita harus merujuk pada penilaian yang meluas, bahkan jika—dan mungkin

khususnya di kala—kita tidak sependapat dengan mereka. Nampaknya merupakan hal penting bahwa kita tidak menolaknya sebagai bukti tentang ketidakmatangan, ketidaktahuan, dan keterbatasan mental dan sebagainya, melainkan memperlakukannya sebagai penilaian yang perlu diverifikasi.

Dalam kasus penelitian kami di Miastko, terdapat beberapa penilaian populer mengenai para pendukung *PiS*. Salah satu di antaranya ialah adanya kepercayaan bahwa para pendukung *PiS* terutama adalah orang-orang yang mengalami eksklusivitas atau setidaknya mempunyai perasaan tercedera yang mendalam. Hal ini tidak terkonfirmasi oleh wawancara biografis, karena sebagian besar mayoritas responden berbicara mengenai kehidupan mereka dalam kaitan dengan telah tercapainya tujuan mereka atau bahkan dalam kaitan dengan sukses. Suatu keyakinan lain yang kami perhitungkan ialah asumsi bahwa dukungan bagi *PiS* didasarkan pada rasa terima kasih karena dana dari program *Family 500+* (suatu tunjangan bulanan sebesar sekitar 120 Euro untuk tiap anak setelah anak pertama). Para responden yang memberikan suara bagi *PiS* tidak mendefinisikan program ini dalam artian pemuasan kebutuhan pribadi, melainkan menafsirkannya sebagai bukti mengenai solidaritas negara dan sebagai suatu pertanda bahwa Polandia pada akhirnya bergabung dengan negara-negara yang telah berkembang dalam hal pelaksanaan kebijakan yang komprehensif yang mendukung keluarga.

Ketiga, pengetahuan sosiologis seyogyanya memperkenalkan kompleksitas yang tidak dijumpai pada diskusi publik. Orang-orang menyukai simplifikasi, tetapi keadaannya tidak selalu demikian! Jika ada pengeta-

huan yang menghubungkan mereka dengan pengalaman dan pendapat mereka, tetapi memperdalamnya atau terhubung dengan mereka, hal tersebut akan menarik. Orang-orang yang membaca laporan mengenai Miastko tertarik, misalnya, pada berbagai kritik terhadap kaum elite yang dirumuskan oleh para perwakilan pendukung, *PiS* dari kelas bawah atau menengah. Bagi kelas bawah, kritiknya didasarkan pada pengungkapan alienasi kaum elite dan jaraknya dari orang-orang biasa. Bagi kaum kelas menengah, kaum elite telah kehilangan mandat moralnya untuk memerintah karena telah mengkompromikan diri dengan melakukan korupsi. Ini adalah untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, bahwa topik keanekaragaman kelas muncul dalam debat publik di Polandia.

Bertentangan dengan stereotip, orang tertarik pada isi yang kompleks dan berat. Namun hal ini lebih daripada penampilan kompleksitas ilmiah. Penyederhanaan pesan, yang terdiri atas mempopulerkan pengetahuan dengan tujuan menimbulkan konflik dan persaingan untuk memperoleh perhatian sosial bukanlah jalan yang ditempuh para sosiolog. Sebaliknya, kompleksitas harus diperkenalkan untuk memicu iritasi dan friksi dalam wacana publik.

› Peran sosiologi

Apa yang dapat kita peroleh dari sosiologi yang menghasilkan pengetahuan sosial? Dengan menyadari bahwa tidak akan ada jawaban yang dapat memuaskan semua sosiolog, saya akan menyebutkan opsi-opsi yang secara khusus penting bagi saya.

Sosiologi jenis ini berpeluang untuk mengimbangi bentuk-bentuk komunikasi masa kini yang mempunyai

kecenderungan untuk berakhir dalam konflik ritual, dalam mana kekejaman dan penyederhanaan pesan bersifat utama. Kita tidak dapat menyalahkan para wartawan dan politisi untuk keadaan ini. Mereka bergerak dalam kondisi khas yang tidak dapat mereka tanggulangi dengan mudah. Namun tidak ada alasan mengapa aturan ini tidak dapat ditangkal oleh para sosiolog, dengan menyediakan pengetahuan yang mengimbangi kecenderungan negatif yang menghantui komunikasi public kita.

Suatu tugas yang penting bagi sosiologi ialah untuk memberikan suara yang nyata pada orang-orang yang hanya memiliki sedikit ruang gerak di ranah publik. Bagi saya hal yang secara khusus penting ialah untuk menciptakan suatu ruang bagi kelas-kelas khalayak ramai dan menampilkan perspektif dan pengalaman mereka.

Pertanyaan ketiga ialah bagaimana sosiologi menempatkan dirinya terhadap aktor-aktor lain di ranah publik. Menurut pendapat saya, cara terdekat ialah dengan memandangnya secara berseberangan dengan apa yang dilakukan wartawan dan politisi. Sosiologi berbeda karena kepekaannya dan pengetahuan yang disediakannya, maupun otonominya dari persaingan untuk memperoleh perhatian sosial dan jarak dari tekanan konflik politik. Tipe sosiologi ini dapat mengimbangi peserta lain dalam ranah publik dengan menempatkan pembatasan pada kekuasaannya untuk mendefinisikan realitas sosial. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Maciej Gdula <gdulam@is.uw.edu.pl>